



LOKA MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
TERNATE

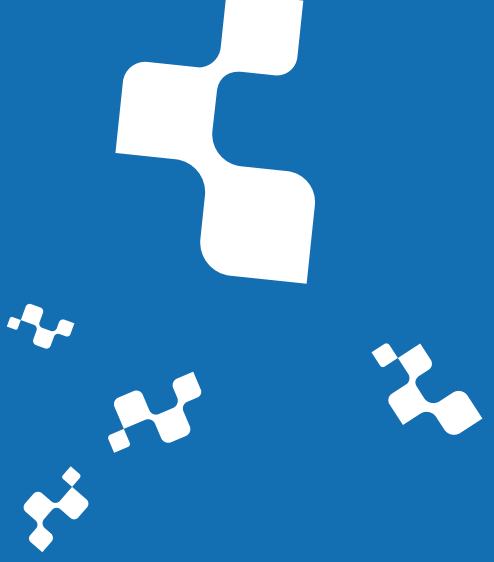


Direktorat
Jenderal
Infrastruktur
Digital

LAPORAN KINERJA

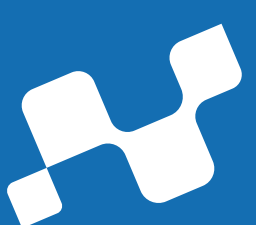
2025





Infrastruktur Digital

Fondasi Akselerasi Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi



01

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan periode yang strategis bagi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah proses transformasi kelembagaan sebagai tindak lanjut restrukturisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor komunikasi dan digital guna menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin dinamis.

Sebagai satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate turut terdampak oleh berbagai penyesuaian yang meliputi aspek kelembagaan, perencanaan, penganggaran, tata kelola organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia. Perubahan tersebut ditandai dengan penyesuaian kode satuan kerja, realokasi dan penyesuaian pagu anggaran, serta penyelarasan proses bisnis dan sistem pelaporan kinerja yang mendukung implementasi struktur organisasi baru. Dalam menghadapi dinamika masa transisi tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate tetap berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio secara profesional, efektif, dan akuntabel. Berbagai langkah adaptif dilakukan melalui penguatan koordinasi internal, optimalisasi sumber daya yang tersedia, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan mekanisme kerja yang selaras dengan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan. Restrukturisasi kelembagaan yang berlangsung sepanjang tahun pelaporan dipandang sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas organisasi dan mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui proses transformasi tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate terus berupaya membangun sistem kerja yang lebih efektif, responsif, dan adaptif dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja organisasi selama periode pelaporan. Laporan ini memuat hasil pencapaian terhadap 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Infrastruktur Digital dengan Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate. Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate mampu melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan akibat proses transformasi kelembagaan dan penyesuaian organisasi. Hasil yang dicapai tersebut mencerminkan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung terwujudnya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, tertib, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan sektor komunikasi dan digital di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Capaian Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
SK 1. Meningkatkan Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi				
1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80%	100%	125%
2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%

3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26
4.	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133.33%
5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	98.75%	116.18%
6.	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%
7.	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	125%	125%
8.	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%
9.	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
10.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
11.	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/ IPKP)	100%	122%	122%
12.	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/ IPAK)	100%	107.5%	107.5%
13.	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%

SK 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

1.	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Ternate Tahun 2025	86.95	84.17	96.8%
2.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09%

Pencapaian dari sasaran kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate pada tahun 2025 dapat uraikan sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE

IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate pada Tahun 2025 ini mempunyai target kinerja berupa pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio pada 80% wilayah kabupaten/kota, yang terdiri dari 15 Pita Frekuensi Termonitor, 60% ISR Termonitor, 80% hasil monitor teridentifikasi dan 100% melakukan tindak lanjut peneraan sanksi terhadap seluruh pelanggaran dari hasil monitor SFR teridentifikasi. Selain itu, Kabupaten/Kota yang memiliki stasiun tetap/transportable dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/transportable. Dari total 10 kabupaten/kota wilayah kerja UPT, hingga akhir Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan monitoring di 10 kabupaten/kota, atau setara dengan capaian sebesar 100% dari target tahunan.

Hasil identifikasi data monitoring menunjukkan bahwa Kota Ternate mencatat jumlah data teridentifikasi tertinggi dengan total 2.313 data, disusul oleh Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 590 data, dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan 453 data. Wilayah lainnya yang juga menunjukkan aktivitas cukup signifikan antara lain Kota Tidore Kepulauan 377 data, dan Kabupaten Pulau Morotai 259 data. Sementara itu, beberapa wilayah mencatat jumlah data yang lebih rendah, seperti Kabupaten Halmahera Tengah 100, Kabupaten Halmahera Utara 69, Kabupaten Halmahera Barat 34, Kabupaten Pulau Taliabu 31, dan Kabupaten Kepulauan Sula 30.

IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio

Target kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, yang dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pemeriksaan ISR microwave link (meliputi remote site dan open shelter), serta pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar pada stasiun radio FM dan TV Digital.

Dari total target 1.563 data pengguna frekuensi point-to-point microwave link (88 open shelter dan 1.475 remote site), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.563 data atau sebesar 100%. Sementara itu target untuk kegiatan pemeriksaan stasiun radio siaran 12 ISR FM dan 7 ISR TV Digital. Hingga Desember 2025,

pemeriksaan stasiun radio siaran telah dilaksanakan terhadap 7 stasiun TV Digital atau sebesar 100%, serta 12 stasiun radio FM atau sebesar 100% dari target, sehingga secara keseluruhan capaian kegiatan pemeriksaan stasiun radio FM dan TV Digital mencapai 100%.

IK-3 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Target indikator kinerja untuk kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 95%. Hingga akhir Desember 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah menerima 1 (satu) pengaduan gangguan dari PT. Meta Sedaya Mineral, dengan gangguan yang disebabkan oleh penggunaan Frekuensi yang sama (co channel) pada band VHF konsesi di area pertambangan Kabupaten Halmahera Tengah.

Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui sistem e-ticket pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan selesainya pengaduan yang diterima, maka capaian kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio hingga Desember 2025 mencapai sebesar 100%, sehingga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

IK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital merupakan indikator baru yang mulai diterapkan dalam Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tahun 2025. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) memberikan mandat kepada UPT untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi (APT), guna memastikan pemenuhan terhadap standar teknis yang berlaku.

Pengawasan APT dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu pemeriksaan sertifikat, pemeriksaan label APT, dan pemeriksaan kesesuaian perangkat. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan standar teknis, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate ditargetkan melaksanakan pengawasan terhadap 8 Kabupaten/Kota dan 300 perangkat APT, dengan fokus pada minimal 3 tiga jenis perangkat prioritas sesuai dengan Nota Dinas Direkur Pengendalian DJID. Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan di 8 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 328 perangkat teridentifikasi dan teridentifikasi 10 perangkat tidak sesuai ketentuan teknis pada Tibnas I telah ditindaklanjuti.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis APT tercatat sebesar 100% dari target Perjanjian Kinerja sebesar 75% sampai dengan akhir tahun 2025.

IK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Keberhasilan operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) di Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate pada tahun 2025 tidak terlepas dari upaya perbaikan dan pemeliharaan yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, telah dilaksanakan perbaikan terhadap beberapa perangkat utama serta kegiatan kalibrasi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi guna menjaga tingkat akurasi dan keandalan fungsi perangkat monitoring.

Selain itu, kegiatan inspeksi rutin, pemeliharaan, dan perbaikan, baik terhadap perangkat utama maupun perangkat pendukung SMFR, terus dilaksanakan secara konsisten sebagai upaya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan sebesar 85%. Hingga Desember 2025, capaian kinerja operasional dan fungsi monitoring SMFR di Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate tercatat berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi mencapai 98.75%, yang menunjukkan keberlanjutan serta efektivitas pengelolaan perangkat monitoring spektrum frekuensi radio.

IK-6 Penanganan Sanksi Denda Administratif

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) memberikan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan observasi dan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio, melakukan pengukuran serta inspeksi guna memastikan bahwa stasiun radio yang beroperasi telah sesuai dengan data perizinan yang berlaku. Selain itu, UPT juga diberikan mandat untuk melaksanakan penertiban serta menangani keluhan dari pengguna berizin. Pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Hingga akhir 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Denda kepada 12 perusahaan pengguna frekuensi radio berdasarkan hasil Tibnas III di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 perusahaan telah menindaklanjuti dengan melakukan pembayaran denda.

Berdasarkan rumusan formula data pelanggaran yang telah dikenai sanksi administratif melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Penetapan Denda sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif tercatat sebesar 100% dan melampaui target Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebesar 80%.

IK-7 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Program pengukuran kualitas layanan (Quality of Service/QoS) merupakan program baru yang mulai dilaksanakan oleh Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate pada tahun 2025, dan menjadi salah satu indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun tersebut. Program ini bertujuan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh operator seluler kepada pelanggan, serta memastikan optimalisasi kualitas layanan telekomunikasi pada kabupaten/kota di wilayah kerja Provinsi Maluku Utara.

Pada 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah melaksanakan kegiatan pengukuran kualitas layanan dengan target 8 kabupaten/kota, dan capaian di 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Ternate 3 kali kegiatan, Kota Tidore Kepulauan 5 kali kegiatan, Kabupaten Halmahera Tengah 3 kali kegiatan, Kabupaten Halmahera Selatan 1 kali kegiatan, Kabupaten Halmahera Utara 2 kali kegiatan, Kabupaten Kepulauan Sula 1 kali kegiatan, Kabupaten Pulau Morotai 2 kali kegiatan, Kabupaten Halmahera Barat 1 kali kegiatan, Kabupaten Halmahera Timur 2 kali kegiatan dan Kabupaten Pulau Taliabu 1 kali kegiatan.

Dengan target pengukuran sebesar 80% dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja, capaian kinerja tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan pada tahun 2025 mencapai 125%.

IK-8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio pada tahun 2025 terdiri atas dua jenis kegiatan utama, yaitu penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) sebanyak 6 kali, serta kegiatan Sertifikasi Jarak Jangkauan Dekat (Short Range Certificate/SRC) dan Jarak Jangkauan Jauh (Long Range Certificate/LRC) untuk IKRAN (Izin Komunikasi Radio Perikanan) sebanyak 1 kali.

Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah melaksanakan kegiatan UNAR sebanyak 7 kali, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 6 kali dan kegiatan sertifikasi SRC/LRC untuk IKRAN terlaksana sebanyak 1 kali kegiatan di Kota Tidore Kepulauan dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dengan demikian, secara keseluruhan capaian kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) tercatat sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

IK-9 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Pada tahun 2025, ruang lingkup pelaksanaan penanganan piutang Biaya Hak Pakai (BHP) frekuensi radio mencakup kegiatan pencegahan dan pengurangan piutang, koordinasi piutang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta pengumpulan dokumen penghapusan mutlak dan Pemberitahuan Penghentian Non-Tagihan Obligasi (PPNTO). Pemenuhan target Perjanjian Kinerja untuk kegiatan ini diwujudkan melalui pengiriman laporan hasil kegiatan secara rutin setiap bulan kepada Direktur Layanan Infrastruktur Digital.

Pada tahun 2025 Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah melaporkan penanganan tagihan Surat Perintah Pembayaran (SPB) BHP frekuensi radio sebanyak 156 invoice, serta melaporkan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL sebanyak 4 kali, sehingga telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan capaian tersebut, tingkat kinerja pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio tercatat mencapai 100%, sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

IK-10 Sosialisasi Pelayanan Publik

Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah merealisasikan 100% target sosialisasi pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan ketentuan minimal 1 kali pelaksanaan dan minimal 30 peserta. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 30 September 2025 di Weda Kabupaten Tengah, dengan jumlah peserta sebanyak 50 peserta.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap adanya Penerapan Sanksi Denda Administratif serta memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi.

IK-11 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Sebagai bagian dari komitmen dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Kantor Loka Monitor Sebagai bagian dari komitmen dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Ternate menetapkan target pelaksanaan survei pelayanan publik sebanyak minimal 1 kali, dengan jumlah responden minimal 30 orang dan nilai capaian minimal sebesar 3,2 pada skala 4.

Pada tahun 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP). Hasil survei menunjukkan bahwa nilai IKM 3,91 dan IPKP 3,91 dari skala 4 dengan jumlah responden 72 orang yang secara kualitas termasuk dalam kategori Mutu Pelayanan A atau SANGAT BAIK.

Berdasarkan hasil survei tersebut, unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah indikator “Persyaratan” dengan skor 3,91, yang mencerminkan bahwa prosedur pelayanan dinilai jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, indikator dengan nilai terendah adalah “Sarana dan Prasarana” dengan skor 3,93, yang menunjukkan masih terdapat ruang untuk perbaikan dari aspek fasilitas fisik maupun sarana penunjang layanan lainnya.

Secara umum, hasil tersebut mencerminkan bahwa Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah mampu menjaga kualitas pelayanan publik secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan kinerja yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan publik.

IK-12 Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Dalam rangka memenuhi target Perjanjian Kinerja (PK) Pelayanan Publik Tahun 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah melaksanakan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Survei tersebut dilaksanakan minimal 1 kali dengan jumlah responden minimal 30 orang serta target capaian nilai minimal 3,93 pada skala 4.

Hasil survei menunjukkan bahwa nilai gabungan IIPP dan IPAK yang diperoleh Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate mencapai 3,87 pada skala 4, dan jumlah responden 72 orang sehingga melampaui target yang telah ditetapkan dan mencerminkan kategori kinerja pelayanan publik yang SANGAT BAIK, khususnya dalam menjaga integritas dan pencegahan praktik korupsi di lingkungan pelayanan publik.

Meskipun hasil survei menunjukkan capaian yang positif, masih terdapat sejumlah masukan dan permasalahan yang diidentifikasi oleh responden dan perlu segera ditindaklanjuti. Masukan tersebut menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait persepsi publik terhadap integritas dan transparansi dalam pelayanan yang diberikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate akan menyusun rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil survei tersebut. Rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem integritas, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan berbasis data.

Dengan demikian, pelaksanaan survei IIPP dan IPAK tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu layanan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas.

IK-13 Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Verifikasi data koordinat site Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan salah satu kegiatan strategis dalam memastikan keakuratan data lokasi (koordinat) pemancar frekuensi radio yang telah memperoleh izin, serta mendukung efisiensi pengelolaan spektrum frekuensi radio secara nasional.

Di tahun 2025, target verifikasi ditetapkan sebanyak 2.162 data koordinat ISR dengan mengacu pada data Report No.226 – Laporan Data ISR Master Data Referensi Site (MDRS) Per UPT. Hingga akhir Desember 2025 dengan berpedoman Nota Dinas Direktur Layanan Infrastruktur Digital nomor: 1346/DJID.4/SP.02.10/07/2025 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi), telah berhasil diverifikasi sebanyak 2.162 data koordinat ISR, atau sebesar 100% dari total target MDRS, dari data tersebut sebanyak 402 hasil verifikasi tidak sesuai ISR dan sebanyak 402 telah ditindaklanjuti dengan menyurat ke operator seluler. Berdasarkan rumus formula perhitungan Capaian tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave link yang tidak sesuai (Prima Aksi), maka sampai dengan Desember 2025 mencapai 100%.

Kegiatan verifikasi ini tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga diharapkan dapat Menurunnya penolakan pengajuan ISR, menurunnya temuan ketidaksesuaian data ISR oleh UPT (Data ISR sesuai dengan data di lapangan), serta tersedianya koordinat site ISR MDRS.

SASARAN KINERJA 2

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien”

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Ternate Tahun 2025

Nilai kinerja anggaran Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dihitung berdasarkan komposit capaian indikator SMART dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate berhasil mencapai nilai kinerja anggaran sebesar 84.17 dari target 86.95 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) telah berada pada kategori baik, namun nilai perencanaan anggaran yang masih rendah berdampak pada belum optimalnya capaian akhir.

Nilai tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Kualitas pelaporan keuangan mengacu pada kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Bobot nilai capaian kinerja sasaran kegiatan berdasarkan kualitas laporan keuangan yang dicapai oleh Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate tercatat sebesar 100.

Nilai tersebut menunjukkan komitmen Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Seiring dengan restrukturisasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada awal tahun 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate mengalami perubahan kode satuan kerja dari semula 654226 menjadi 694723. Sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DIPA dengan Nomor SP DIPA-059.09.2.654226/2025 tanggal 2 Desember 2024 mengalami cut off per tanggal 08 Juli 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.123.468.000,- untuk Dokumen DIPA dengan kode satker baru 694723 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp. 7.500.887.000,- dengan sumber dana terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp. 1.682.963.000,- dan PNPB sebesar Rp. 5.817.924.000,-

Untuk komposisi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 menjadi Rp. 6.135.472.000,- sumber dana terdiri atas Rupiah Murni Rp. 1.884.245.000,- dan PNPB sebesar Rp. 4.251.227.000,- terjadi pengurangan karena adanya kebijakan transfer pagu anggaran belanja barang dan modal antar satker dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.



Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Kata Pengantar

Syahril Amir, ST. M. Eng

Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate atas capaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menjadi wujud komitmen satuan kerja yang terdampak restrukturisasi kelembagaan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dalam penyusunannya, laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan menyajikan informasi dan data secara memadai, sistematis, dan transparan.

Melalui Laporan Kinerja ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai media pertanggungjawaban secara eksternal. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran pegawai Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, guna menghadapi tantangan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Daftar Isi

iii	Ringkasan Eksekutif
ix	Kata Pengantar
x	Daftar Isi

01 Pendahuluan

1	A. Latar Belakang
2	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
3	C. Potensi dan Permasalahan Strategis
4	D. Sistematika Pelaporan

02 Perjanjian Kinerja

6	A. Rencana Strategis
6	B. Sasaran Program
6	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

03 Akuntabilitas Kinerja

8	A. Capaian Kinerja Organisasi
8	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota
13	Pemeriksaan Stasiun Radio
16	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio
19	Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital
23	Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT
25	Penanganan Sanksi Denda Administratif
29	Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan
33	Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)
37	Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio
41	Sosialisasi Pelayanan Publik
44	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)
47	Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)
50	Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)
54	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Ternate Tahun 2025
59	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

04 Penutup



02 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Provinsi Maluku Utara, yaitu wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik dan kompleks. Provinsi Maluku Utara terdiri atas gugusan pulau-pulau yang tersebar di wilayah laut yang luas, dengan kondisi topografi yang beragam mulai dari wilayah pesisir, pegunungan, pulau-pulau kecil, hingga kawasan terluar yang berbatasan dengan jalur pelayaran dan perikanan strategis. Kondisi geografis tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, terutama terkait aksesibilitas wilayah, ketersediaan sarana transportasi, serta faktor cuaca yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan monitoring dan penanganan gangguan frekuensi radio di lapangan.

Di samping tantangan geografis, Provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertambangan, khususnya komoditas nikel, berkembang pesat dan didukung oleh keberadaan kawasan industri pengolahan mineral yang tersebar di beberapa wilayah. Selain itu, sektor perikanan, kelautan, perkebunan, pariwisata, transportasi laut, dan transportasi udara juga terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di daerah. Pertumbuhan berbagai sektor strategis tersebut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital yang andal sebagai pendukung aktivitas operasional, logistik, keselamatan, keamanan, dan pelayanan publik.

Perkembangan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara berdampak langsung pada meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio oleh berbagai pengguna, baik penyelenggara telekomunikasi, lembaga penyiaran, instansi pemerintah, sektor transportasi udara dan laut, industri pertambangan, maupun pengguna frekuensi radio lainnya. Spektrum frekuensi radio menjadi sumber daya terbatas yang memiliki nilai strategis dalam mendukung konektivitas antarmasyarakat, operasional industri, komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan, mitigasi bencana, serta percepatan transformasi digital di wilayah kepulauan.

Meningkatnya intensitas penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut berpotensi menimbulkan berbagai tantangan, antara lain penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukan, gangguan frekuensi radio yang merugikan, penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis, serta kebutuhan pengawasan terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang semakin kompleks. Oleh karena itu, peran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate menjadi semakin penting dalam memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio berlangsung secara tertib, efisien, bebas dari gangguan yang merugikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2025 juga merupakan periode yang ditandai dengan penyesuaian kelembagaan sebagai tindak lanjut transformasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan tersebut mendorong penyesuaian kebijakan, proses bisnis, tata kelola organisasi, serta mekanisme pelaporan kinerja yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 menjadi penting sebagai sarana untuk

mengukur, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memberikan gambaran mengenai capaian kinerja organisasi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Maluku Utara, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penyempurnaan kebijakan dan strategi organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis yang berikutnya disingkat menjadi (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, serta pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Pelaksanaan penertiban dan penyidikan atas pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio serta pelanggaran standar perangkat pos dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian Izin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, serta pendampingan dalam penyelesaian piutang BHP frekuensi radio;
- f. Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta hubungan masyarakat di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun Tim Kerja dilingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate sebagai berikut;

1. Tim Kerja Monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Lingkup tugas Tim Kerja Monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi antara lain;

- a. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pengukuran, pemeriksaan stasiun radio, dan pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio serta pemenuhan standarisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital lainnya;
- b. Pemantauan dan evaluasi penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital lainnya
- c. Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- d. Pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, pemenuhan standarisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta telekomunikasi khusus;
- e. Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.
- f. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang hasil penertiban SFR/APT
- g. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban SFR/APT dan penanganan gangguan SFR
- h. Pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio, kewajiban sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, serta penyelesaian piutang denda administratif;

2. Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan.

Lingkup tugas Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan antara lain;

- a. pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- b. penanganan piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio dan/atau kualitas layanan infrastruktur digital
- d. pelaksanaan ujian amatir radio dan sertifikasi ijin komunikasi radio perikanan
pelaksanaan konsultasi perizinan bidang spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, dan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

3. Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital

Lingkup tugas Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital antara lain;

- a. pelaksanaan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital

- b. Analisis data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital
 - c. Pelaksanaan pembaharuan data kualitas layanan infrastruktur digital
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pembangunan dan penyediaan infrastruktur digital
 - e. Melakukan pemantauan gangguan layanan telekomunikasi.
 - f. Pemeriksaan stasiun radio Microwave Link & Data Seluler
 - g. Verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)
4. Tim Kerja Umum dan Rumah Tangga
- Lingkup tugas Tim Kerja Umum dan Rumah Tangga antara lain sebagai berikut;
- a. Perencanaan dan program, urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan
 - b. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal

C. Potensi dan Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Maluku Utara, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dihadapkan pada berbagai potensi dan permasalahan strategis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. Potensi dan permasalahan tersebut berasal dari karakteristik geografis wilayah, perkembangan ekonomi daerah, peningkatan kebutuhan layanan telekomunikasi, serta dinamika pemanfaatan spektrum frekuensi radio oleh berbagai sektor.

1. Potensi Strategis

Sebagai provinsi kepulauan yang berada pada jalur pelayaran dan transportasi udara kawasan timur Indonesia, Maluku Utara memiliki kebutuhan komunikasi radio yang tinggi untuk mendukung keselamatan pelayaran, penerbangan, kegiatan perikanan, penanggulangan bencana, dan layanan publik. Kondisi ini menjadikan spektrum frekuensi radio sebagai infrastruktur strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan pembangunan daerah. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah penghasil mineral strategis nasional, khususnya komoditas nikel yang menjadi bahan baku utama industri baterai kendaraan listrik. Keberadaan kawasan industri pengolahan dan pemurnian mineral di berbagai wilayah telah mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan sektor pertambangan dan industri tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan layanan telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung operasional perusahaan, sistem keamanan, komunikasi internal, layanan logistik, serta konektivitas digital di kawasan industri.

Peningkatan pembangunan jaringan telekomunikasi, perluasan layanan broadband, serta implementasi transformasi digital di berbagai sektor mendorong peningkatan kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio secara legal, tertib, dan efisien. Kondisi ini membuka peluang bagi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate untuk memperkuat perannya dalam menjamin kualitas penggunaan spektrum frekuensi radio dan mendukung percepatan transformasi digital di wilayah Maluku Utara. Semakin banyaknya pengguna frekuensi radio dari sektor pemerintahan, telekomunikasi, penyiaran, transportasi, pertambangan, dan sektor strategis lainnya mendorong peningkatan kebutuhan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Hal ini sekaligus memperkuat peran strategis Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

2. Permasalahan Strategis

Provinsi Maluku Utara memiliki wilayah kerja yang sangat luas dengan kondisi geografis berupa gugusan pulau-pulau yang tersebar dan dipisahkan oleh perairan. Sebagian wilayah berada pada lokasi terpencil dan memerlukan waktu tempuh yang relatif panjang dengan akses transportasi yang terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, observasi, penanganan gangguan frekuensi radio, penertiban penggunaan frekuensi radio, serta pengawasan perangkat telekomunikasi di seluruh wilayah kerja.

Sebagian besar aktivitas pertambangan dan kawasan industri strategis berada pada wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan dan berada pada lokasi dengan akses transportasi yang terbatas. Kegiatan pengawasan penggunaan frekuensi radio pada kawasan tersebut memerlukan dukungan transportasi yang memadai, waktu pelaksanaan yang lebih panjang, serta biaya operasional yang lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Di sisi lain, tingginya aktivitas komunikasi radio pada kawasan pertambangan meningkatkan risiko terjadinya penggunaan frekuensi tanpa izin maupun penggunaan perangkat yang tidak memenuhi ketentuan teknis.

Meningkatnya penggunaan spektrum frekuensi radio oleh berbagai sektor berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi radio yang dapat memengaruhi layanan telekomunikasi, penyiaran, transportasi udara, transportasi laut, dan operasional industri. Gangguan frekuensi radio yang tidak ditangani secara cepat dan tepat dapat berdampak pada aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran kegiatan ekonomi. Luasnya

wilayah pengawasan yang mencakup seluruh Provinsi Maluku Utara menuntut tersedianya sumber daya manusia, peralatan monitoring, dan sarana pendukung yang memadai. Tantangan ini semakin besar seiring meningkatnya jumlah pengguna spektrum frekuensi radio dan berkembangnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

3. Arah Strategis

Dalam menghadapi berbagai potensi dan permasalahan tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate terus mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio melalui pemanfaatan teknologi monitoring, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara telekomunikasi, pelaku industri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, bebas dari gangguan yang merugikan, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi dan transformasi digital di Provinsi Maluku Utara secara berkelanjutan.

D. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Loka Monitor SFR Ternate berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Kegiatan Pengukuran Stasiun Radio

SUSUNAN TIM DAN SUB TIM KERJA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE



SYAHRIL AMIR

Kepala Loka Monitor SFR Ternate





03 PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital c.q. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan program, kegiatan, serta indikator kinerja unit kerja dengan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan ekosistem digital.

Peran aktif Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate diarahkan untuk memastikan tercapainya tiga tujuan strategis pembangunan sektor digital, yaitu:

1. Terhubung, melalui penguatan konektivitas digital yang inklusif dan merata, menjangkau masyarakat dari pusat pemerintahan hingga wilayah terpencil di Provinsi Maluku Utara;
2. Tumbuh, dengan mendorong terciptanya ekosistem digital yang produktif, inovatif, dan memberdayakan; serta
3. Terjaga, melalui penguatan tata kelola ruang digital yang aman, terpercaya, dan berdaulat.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio secara tertib, efektif, dan akuntabel, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate berperan strategis dalam menjamin ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan infrastruktur digital. Dengan demikian, unit kerja ini turut memperkuat fondasi transformasi digital nasional sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur secara berkelanjutan.

B. Sasaran Kinerja

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025. Program tersebut difokuskan pada percepatan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, serta percepatan pembangunan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional.

Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate berperan strategis dalam memastikan pengelolaan dan pengawasan spektrum frekuensi radio berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel guna mendukung ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital nasional.

Melalui optimalisasi fungsi monitoring, pengendalian, dan pelayanan spektrum frekuensi radio, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem konektivitas yang andal dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Maluku Utara, sebagai bagian integral dari upaya percepatan transformasi digital nasional.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Perjanji Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate merupakan dokumen komitmen formal yang disepakati antara Direktur Jenderal Infrastruktur Digital dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate. Dokumen ini menjadi landasan strategis sekaligus instrumen pengendalian dalam mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Melalui Perjanjian Kinerja tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate menyatakan komitmennya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, pengendalian, serta pelayanan spektrum frekuensi radio secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel. Komitmen ini mencerminkan keselarasan antara perencanaan kinerja unit pelaksana teknis dengan arah kebijakan nasional di bidang infrastruktur digital.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Perjanjian Kinerja juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang digunakan untuk memantau capaian target, mengukur hasil pelaksanaan program, serta memastikan konsistensi antara rencana dan realisasi kinerja. Dengan mekanisme ini, setiap indikator kinerja dapat dikendalikan dan dievaluasi secara sistematis guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Melalui penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate, diharapkan seluruh program kerja dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap tertibnya pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja. Dengan demikian, keberadaan Perjanjian Kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong kinerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target 2025
SK 1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/ Kota	80%
2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
4.	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%
6.	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
7.	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
8.	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%
9.	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
10.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
11.	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
12.	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
13.	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
SK 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien		
1.	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Ternate Tahun 2025	90,85
2.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.258.940.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kode satuan kerja 654226 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DIPA dengan Nomor SP DIPA-059.09.2.654226/2025 tanggal 2 Desember 2024 Rp. 3.123.468.000,- terdiri atas Rupiah Murni Rp. 1.905.138.000,- dan PNPB sebesar Rp. 1.218.330.000,-
2. Untuk Dokumen DIPA dengan kode satker baru 694723 memiliki nilai pagu anggaran sebesar 6.135.472.000,- sumber dana terdiri atas Rupiah Murni Rp. 1.884.245.000,- dan PNPB sebesar Rp. 4.251.227.000,-

04 AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

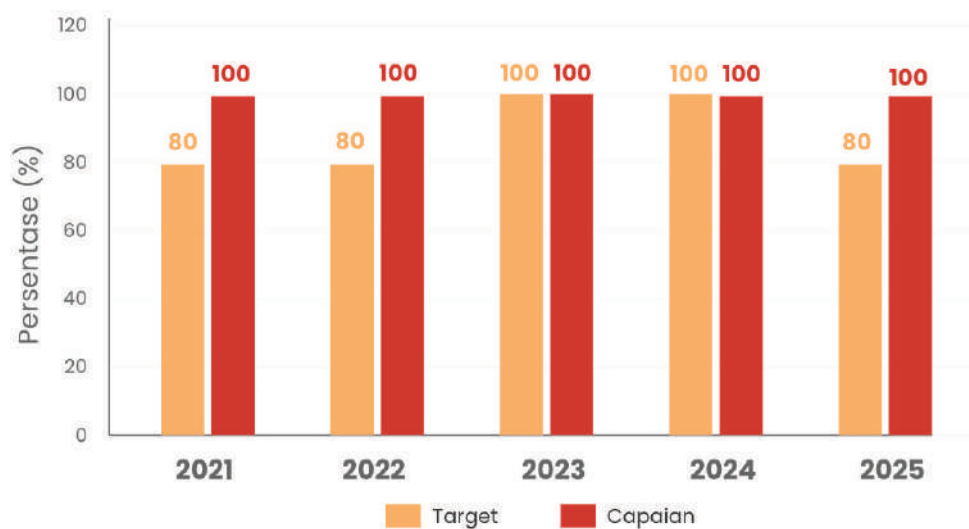
Secara lengkap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Loka Monitor SFR Ternate tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

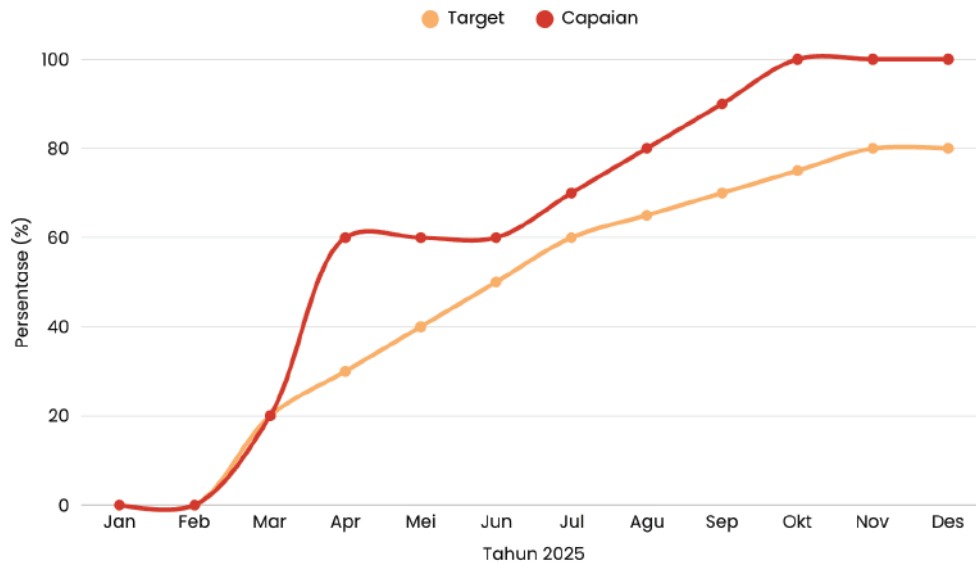
Sasaran Kinerja 1

“Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi”

1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota pada tahun 2025 memiliki target sebesar 80%. Loka Monitor SFR Ternate mampu memonitor seluruh komponen yang dihitung pada perhitungan capaian untuk memenuhi satu Kabupaten/Kota termonitor di tahun 2025, yaitu :

- Monitoring 15 Pita Frekuensi Radio,
- 60 % ISR Termonitor,
- 80 % Hasil monitor teridentifikasi,
- 100 % melakukan tindakan lanjut pengenaan sanksi terhadap seluruh pelanggaran dari hasil monitoring SFR teridentifikasi (jika ditemukan adanya temuan pelanggaran),
- Kabupaten/Kota yang memiliki stasiun tetap/transportable dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/transportable.

Hasil yang dicapai pada tahun 2025 adalah 100% atau sejumlah 10 Kabupaten/Kota termonitor, sehingga capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat kami rincikan sebagai berikut:

- Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Loka Monitor SFR Ternate selaku UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Maluku Utara (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu).

Data pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) pada Tahun 2025 yang didapatkan dari data SIMS adalah sebanyak 4960 ISR yang dimiliki oleh 134 pengguna di Wilayah Maluku Utara. Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang mengatur tentang penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT di lingkungan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2025, menyampaikan 15 subservice/pita frekuensi radio yang dimonitor selama tahun 2025 melalui kegiatan Observasi Monitoring (pengamatan okupansi) sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel Subservice/Pita Target Monitoring UPT Ditjen SDPPI Tahun 2025
15 Pita Target Monitoring**

No.	Pita Frekuensi	Rentang Pita (MHz)
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/ Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174

4	DRM, DAB *INS05	174 - 230
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 - 430
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 - 880
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400

Monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio dengan menggunakan Stasiun Tetap/Transportable dan/atau Stasiun Jinjing/Bergerak. Sedangkan monitoring rutin pita frekuensi marabahaya dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio menggunakan Stasiun Tetap/Transportable pada setiap hari kerja.

b. Sasaran Kegiatan

Berikut sasaran kegiatan Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio selama Tahun 2025 dengan target capaian 100% (pada Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang mengatur tentang penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT di lingkungan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2025) : Monitoring Pita Frekuensi Radio pada 15 pita frekuensi dilakukan di 10 Kabupaten/Kota target 80%.

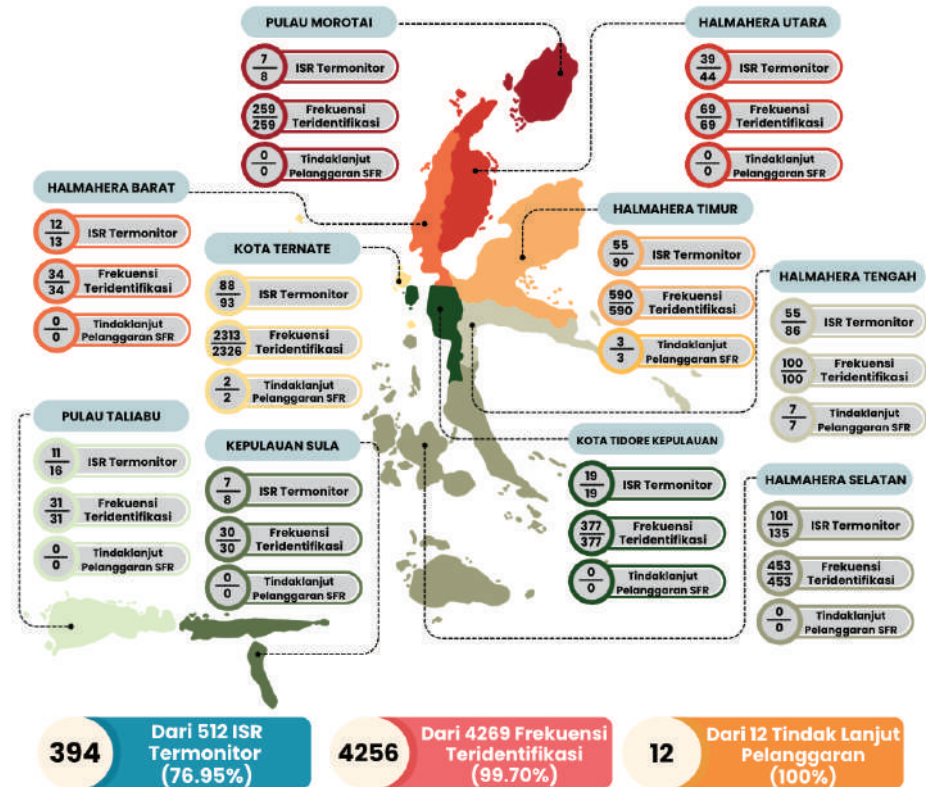
c. Capaian Target

Tabel Capaian Target Monitoring Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80%	100%

Hasil yang dicapai pada tahun 2025 adalah sejumlah 10 Kabupaten/Kota termonitor (Semua Kabupaten/Kota Wilayah Kerja UPT Termonitor), sehingga capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate mampu mencapai 100 % (realisasi 125%) dari target yang telah ditetapkan. Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat kami rincikan sebagai berikut:

1. Monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi) dilakukan di 10 Kabupaten/Kota dengan 15 subservice/pita frekuensi telah termonitor.



Gambar Capaian Monitoring SFR Kabupaten/Kota

2. Persentase Capaian Monitorig SFR 10 Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan % Capaian Monitoring Kabupaten/Kota

Wilayah	% ISR Termonitor	% Frekuensi Teridentifikasi	% Tindak Lanjut Pelanggaran SFR
Kota Ternate	94.62%	99.44%	100%
Kota Tidore Kepulauan	100%	100%	100%
Pulau Morotai	87.5%	100%	100%
Halmahera Utara	88.63%	100%	100%
Halmahera Barat	92.30%	100%	100%
Halmahera Tengah	63.95	100%	100%
Halmahera Timur	61.11	100%	100%
Halmahera Selatan	74.81	100%	100%
Kepulauan Sula	87.5	100%	100%
Pulau Taliabu	68.75	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, monitoring frekuensi radio di 10 Kabupaten/Kota difokuskan pada dua kategori yaitu ISR dinas siaran dan ISR dinas bergerak darat. Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebanyak 60% dari total 512 ISR, atau berjumlah 307 ISR yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, dari target yang ditetapkan Loka Monitor SFR Ternate berhasil mencapai 394 ISR termonitor yang berarti telah mencapai 76.95% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas Loka Monitor SFR Ternate dalam memastikan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih baik, serta mendukung keberlanjutan pengawasan terhadap penggunaan spectrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Maluku Utara.

d. Inovasi/Analisis Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, diantaranya :

1. Peralatan yang digunakan sesuai spesifikasi dan mendukung untuk pelaksanaan monitoring pada 15 pita frekuensi radio.
2. Personel yang terlibat dalam kegiatan kompeten di bidangnya.
3. Perencanaan strategi yang matang dalam pelaksanaan kegiatan monitoring menjadi faktor penting dalam teknis pelaksanaan kegiatan ini.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain:

1. Akses lokasi
 - Beberapa daerah memiliki akses yang sulit dijangkau seperti di wilayah Kepulauan.
 - Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang mendukung, seperti akses jalan/transportasi.
2. SDM
 - Kekurangan pegawai Pengendali Frekuensi Radio dalam monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

e. Dampak

Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate yang mencapai 125% dari target memberikan dampak nyata pada optimalisasi penggunaan spectrum frekuensi radio di seluruh wilayah Maluku Utara. Dengan keberhasilan memonitor 394 Izin Stasiun Radio (ISR)—jauh melampaui target awal sebesar 307 ISR—Loka Monitor SFR Ternate telah memperkuat akurasi database penggunaan frekuensi di lapangan, khususnya pada layanan siaran dan bergerak darat. Efektivitas pengawasan ini tidak hanya memastikan keadilan bagi para pengguna frekuensi resmi, tetapi juga menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih bersih dan minim gangguan di 10 Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, performa yang melampaui target ini membuktikan efisiensi operasional organisasi dalam menjaga keberlanjutan layanan konektivitas digital yang stabil bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

f. Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

1. Mengevaluasi Kinerja Monitoring Spektrum Berdasarkan Laporan Sebelumnya.
2. Memperbaiki Indikator Monitoring Berdasarkan Hasil Evaluasi.
3. Mengimplementasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Indikator Monitoring.

g. Efisiensi Sumber Daya

Dalam upaya efisiensi dalam hal sumber daya manusia dan waktu, dilakukan cara berikut :

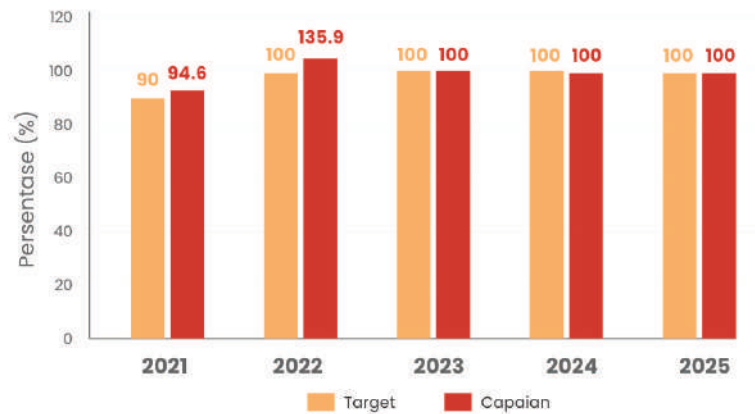
1. Pembekalan keterampilan tentang cara penggunaan alat serta pengetahuan tentang target yang harus dicapai dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang kami miliki.
2. Kolaborasi dengan operator dan atau penyelenggara telekomunikasi sangat efektif dalam percepatan pencapaian target.
3. Sistem pemantauan jarak jauh (remote system) pada peralatan stasiun monitoring transportable memudahkan untuk mendapatkan data dengan lebih cepat.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

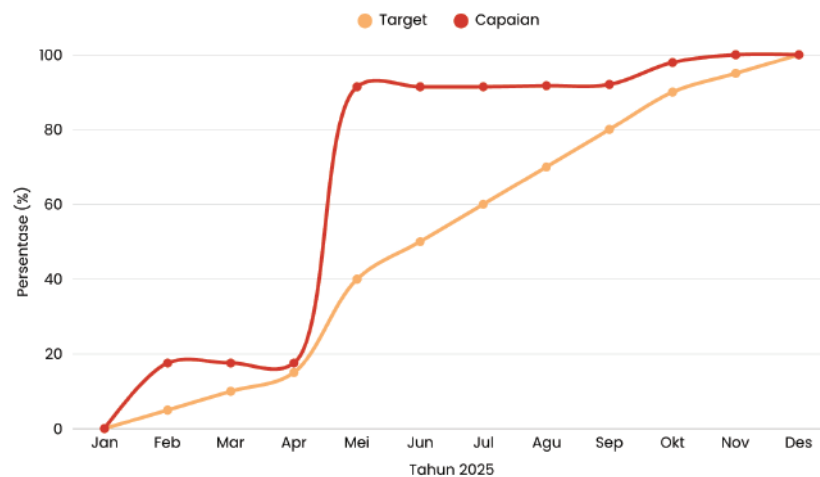
Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut :

1. Setiap anggota tim yang mengikuti kegiatan monitoring Berorientasi pada pemberian pelayanan terbaik yang responsif.
2. Data yang dihasilkan dari setiap kegiatan monitoring dapat dipertanggungjawabkan secara Akuntabel.
3. Personel yang mengikuti kegiatan monitoring memiliki Kompetensi dalam setiap tahapan proses kegiatan.
4. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan kolaborasi yang Harmonis sehingga pelaksanaannya bisa berjalan sesuai target.
5. Nilai Loyalitas selalu menjadi pedoman bagi tim kerja agar setiap tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan penuh semangat.
6. Personel dari tim kegiatan monitoring selalu Adaptif dalam menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang.
7. Dengan semangat Kolaboratif, tim kegiatan membangun sinergitas baik internal maupun eksternal bersama pihak terkait.

2. Pemeriksaan Stasiun Radio



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) memiliki target realisasi sebesar 100%. Capaian Kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Dari capaian indikator kinerja, di sampaikan sebagai berikut :

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pemeriksaan (Inspeksi) Stasiun Radio bertujuan untuk menyamakan database pengguna frekuensi radio yang dimiliki oleh pengguna dengan penggunaan frekuensi actual (lapangan) dengan cara melakukan validasi beberapa parameter penggunaan frekuensi radio. Kegiatan ini dapat meminimalisir penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya agar tidak saling mengganggu. Serta kegiatan tersebut menjadi salah satu evaluasi dalam peningkatan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Telekomunikasi, dengan Jumlah 10 (Sepuluh) kali kegiatan yang mencakup Kota dan Kabupaten yang ada di Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, target kinerja yang ditetapkan untuk kegiatan inspeksi ini adalah 100%. Jumlah ISR Microwave Link dan Penyelenggara Radio Siaran wilayah Maluku Utara yang menjadi target inspeksi di tahun 2025 pelaksanaan remote site dengan target 1475 ISR data remote site, kegiatan openshelter terdapat 88 ISR data untuk 4 pengguna yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Multi Trans Data dan PT. Indosat Ooredoo Hutchison dan Penyelenggara Radio Siaran FM sebanyak 12 ISR dari 6 Penyelenggara LPP dan 6 LPS. Sementara Penyelenggara Televisi siaran digital terdapat 7 ISR dari 2 penyelenggara televisi siaran digital (TVRI dan Trans TV).

b. Sasaran Kegiatan

Berikut sasaran kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio di Loka Monitor SFR Ternate selama Tahun 2025 dengan target capaian 100% (merujuk pada Nota Dinas Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital 2025):

1. Melaksanakan kegiatan remote site terhadap Microwave Link sebanyak 1475 target data ISR;
 2. Melaksanakan kegiatan open shelter terhadap Microwave Link sebanyak 88 target data ISR;
 3. Mengukur parameter teknis subservice radio siaran FM sebanyak 20 ISR dan TV Siaran Digital 7 ISR;
 4. Melaksanakan pengukuran stasiun siaran Televisi Digital Terrestrial sesuai dengan tautan: <https://s.komdigi.go.id/3JSMn>; dan Seluruh stasiun siaran Radio FM pada Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD);
- c. Capaian Target

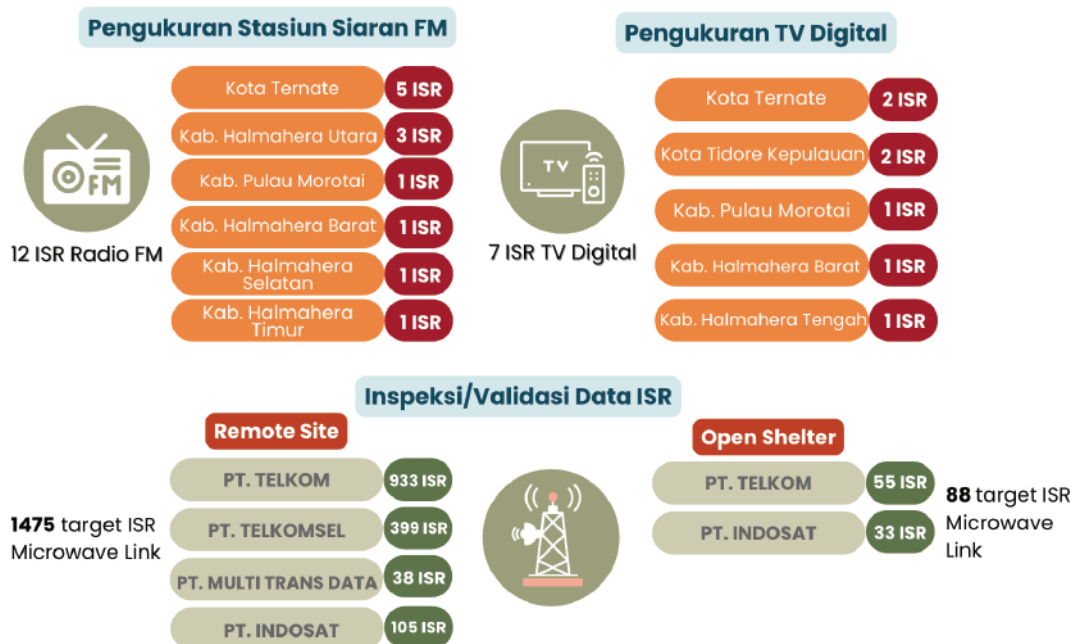
Tabel Capaian Target Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%

Loka Monitor SFR Ternate berhasil memenuhi target 100% pemeriksaan stasiun radio di tahun 2025. Berikut rincian capaian Kinerja sebagai berikut:



Gambar Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio



Gambar Rincian Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio

Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan teknis terhadap pemeriksaan stasiun radio telah dilaksanakan secara optimal. Percepatan kegiatan faktor utama tercapainya target sebelum akhir periode pelaporan. Konsistensi capaian hingga akhir tahun mencerminkan pengendalian kegiatan yang efektif serta kesiapan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan teknis.

Dengan capaian akhir sebesar 100%, indikator ini berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio menunjukkan efektivitas, konsistensi, serta kontribusi nyata dalam menjaga kepatuhan teknis terhadap pengguna ISR microwave Link dan layanan siaran di wilayah kerja.

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi), terdapat faktor-faktor pendukung berhasilnya kegiatan ini, diantaranya :

1. Tim yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai.
2. Kolaborasi yang sinergis dengan operator seluler, pemilik stasiun radio dan stasiun televisi digital.
3. Kelengkapan data dan informasi mempermudah kelancaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio.
4. Perencanaan dalam hal pembagian personel, penentuan titik lokasi dan teknis kegiatan, membuat pelaksanaan kegiatan ini menjadi efektif dan efisien.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) sangat variatif, diantaranya:

1. Akses Lokasi yang Sulit – Banyak stasiun radio berada di daerah terpencil atau di lokasi dengan medan yang sulit dijangkau, seperti kepulauan, daerah pegunungan, dan area pertambangan (objek vital).
2. Kendala Teknis – Peralatan inspeksi bisa mengalami gangguan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis terbaru, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan.
3. Kurangnya Koordinasi dengan Pemilik Stasiun – Beberapa pemilik atau pengelola stasiun radio mungkin tidak kooperatif atau kurang responsif terhadap jadwal pemeriksaan.
4. Perubahan Regulasi – Adanya perubahan regulasi yang cepat dalam bidang telekomunikasi bisa menyebabkan kebingungan dalam implementasi standar inspeksi.
5. Gangguan Cuaca dan Faktor Alam – Inspeksi di luar ruangan, terutama untuk antena dan pemancar, bisa terhambat oleh cuaca buruk seperti hujan lebat, angin kencang, atau petir.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Peralatan – Tim inspeksi mungkin terbatas dalam jumlah personel maupun ketersediaan peralatan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh.
7. Interferensi Frekuensi – Gangguan dari sumber lain yang menggunakan frekuensi berdekatan dapat menyulitkan pengukuran dan analisis spektrum frekuensi.
8. Keamanan dan Keselamatan Kerja – Inspeksi di lokasi yang tinggi (menara pemancar) atau daerah dengan tingkat keamanan rendah dapat meningkatkan risiko bagi petugas inspeksi.

e. Dampak

Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio ini memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan regulasi serta menjaga kualitas komunikasi di berbagai sektor wilayah Maluku Utara. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan spektrum frekuensi yang dijalankan oleh Loka Monitor SFR Ternate, pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan stasiun Microwave Link, radio siaran FM, dan stasiun Televisi Digital Terrestrial.

Dampak utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya kepatuhan para pengguna stasiun radio. Melalui inspeksi berkala, baik secara langsung (open shelter) maupun melalui sistem pemantauan jarak jauh (remote site) pemilik stasiun radio dan penyelenggara TV digital lebih terdorong untuk memenuhi persyaratan teknis serta administratif. Hal ini secara langsung mengurangi risiko pelanggaran yang dapat mengganggu komunikasi publik, layanan data internet, maupun frekuensi operasional industri.

Selain itu, pemeriksaan ini berfungsi sebagai langkah preventif yang sangat efektif terhadap interferensi. Dengan memastikan setiap perangkat beroperasi sesuai parameter teknis yang ditentukan, Loka Monitor SFR Ternate menjamin masyarakat di Provinsi Maluku Utara dapat menikmati kualitas siaran dan layanan telekomunikasi yang bersih, stabil, dan andal.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Dari hasil evaluasi kinerja kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, Loka Monitor SFR Ternate melakukan inovasi dalam menentukan strategi kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mencapai target PK dengan efektif dan efisien.

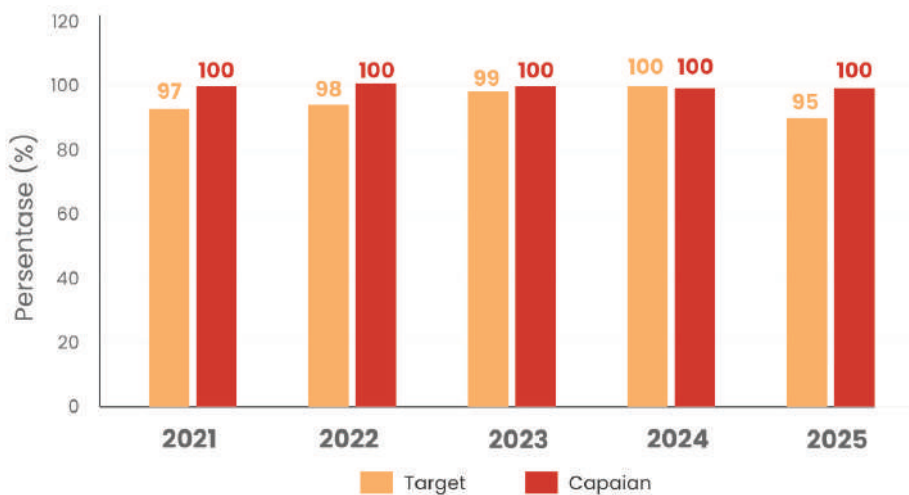
g. Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka mendukung efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Radio (inspeksi), beberapa

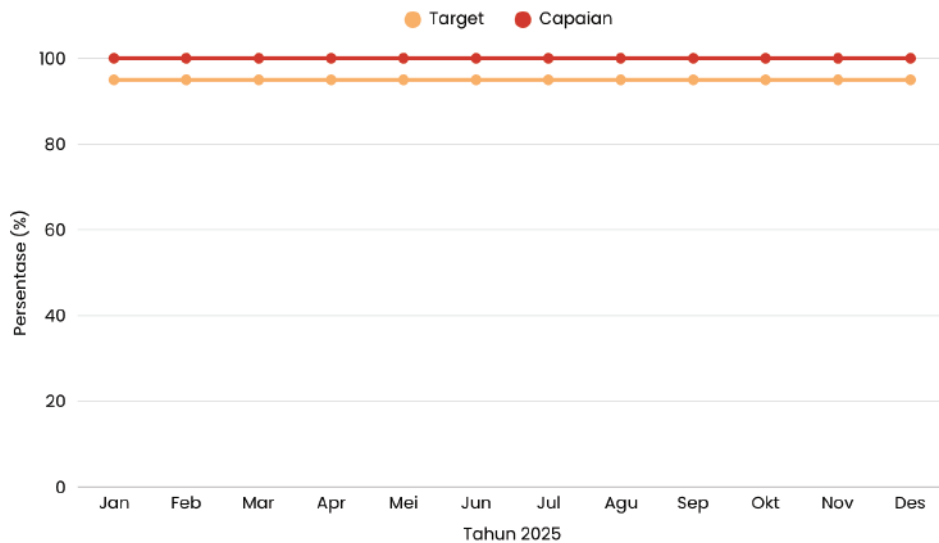
upaya telah dilakukan cara sebagai berikut :

1. Menggunakan sistem berbasis data untuk menentukan lokasi dan jenis stasiun yang perlu mendapat perhatian lebih.
 2. Memberikan edukasi terkait peraturan dan standar teknis yang harus dipenuhi.
 3. Bekerja sama dengan instansi pemerintah, aparat keamanan, dan komunitas radio dalam pengawasan spektrum frekuensi.
 4. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan hasil inspeksi berbasis digital untuk mempermudah akses data serta mempercepat proses evaluasi.
 5. Menyesuaikan strategi inspeksi berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan efisiensi di masa depan.
- h. Implementasi Budaya Nilai pada Kegiatan Ini
- Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi), Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :
1. Setiap pelaksanaan kegiatan inspeksi stasiun radio, personel mengutamakan Berorientasi pada pelayanan yang solutif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 2. Pemeriksaan stasiun radio dilakukan dengan transparan dan Akuntabel agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara.
 3. Personel yang ditugaskan dalam setiap kegiatan sudah pasti memiliki Kompetensi dibidangnya.
 4. Pelaksanaan kegiatan dengan kerjasama tim yang Harmonis mampu meningkatkan kepercayaan antar personel dalam menyelesaikan tanggungjawab.
 5. Dalam melaksanakan kegiatan inspeksi, tentu saja seluruh personel wajib mentaati setiap batasan yang ada, hal ini mencerminkan sikap Loyal dari setiap anggota tim.
 6. Personel tim sangat Adaptif dan sigap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di lapangan.
 7. Kolaboratif dengan berbagai instansi yang ada di wilayah kerja kami, menjadi salah satu kekuatan kami dalam melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi dengan baik.

3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2025 memiliki target sebesar 95%. Capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Penanganan Gangguan Frekuensi Radio merupakan salah satu wujud nyata komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSR) maupun Non Pemegang ISR. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari menerima laporan aduan, proses penanganan gangguan frekuensi radio yang terjadi hingga pembuatan laporan aduan gangguan frekuensi radio dari pengguna frekuensi radio.

Adanya perhatian khusus pada kegiatan Penanganan Gangguan bertujuan untuk menemukan dan mendeteksi stasiun radio dan pengguna frekuensi radio yang mengganggu dan menginterferensi pita frekuensi radio yang digunakan oleh pemegang ISR, IPSR maupun Non Pemegang ISR. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efektif serta bebas dari potensi interferensi dan saling mengganggu.

b. Sasaran Kegiatan

Berikut sasaran kegiatan Penanganan Gangguan selama Tahun 2025 dengan target capaian 95% (merujuk pada Nota Dinas Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital 2025):

1. Menangani 100% aduan gangguan frekuensi radio terhadap seluruh dinas/service yang telah melapor melalui aplikasi gangguan SFR trouble ticket;
2. Melakukan pelaporan melalui aplikasi trouble ticket pada tautan <https://laporgangguanfr.postel.go.id/>.

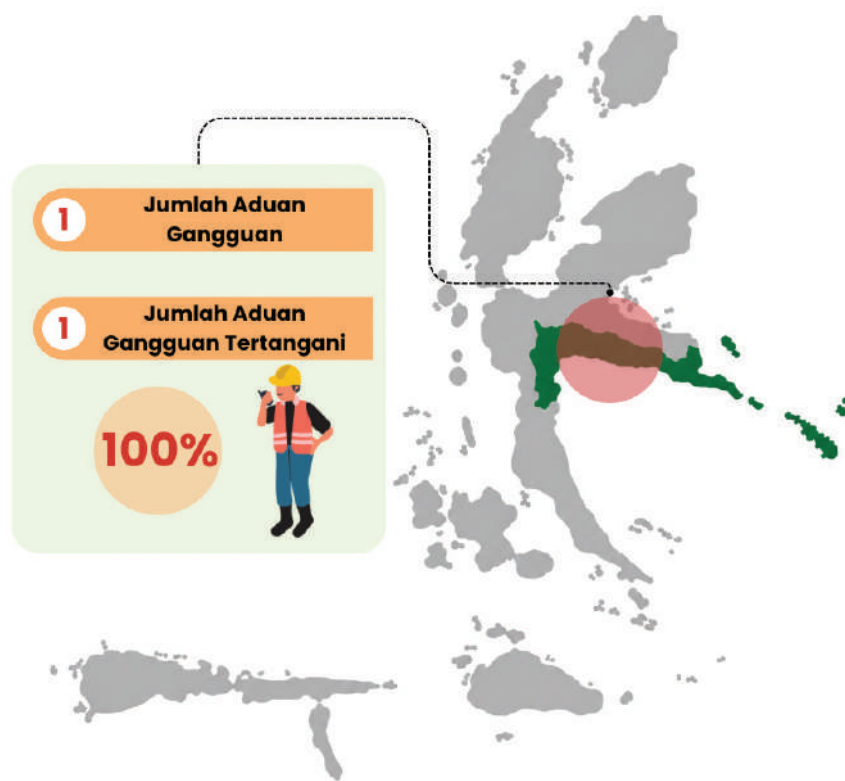
c. Capaian Target

Tabel Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%

Memberikan kelancaran operasional tugas pokok dan fungsi berupa layanan penanganan gangguan frekuensi radio melalui layanan pengaduan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pada tahun 2025 menerima 1 aduan penggunaan SFR pada Dinas Bergerak Darat (Konsesi) dari PT. Meta Sedaya Mineral yang merupakan perusahaan/badan usaha pertambangan di area Fritu Kab. Halmahera Tengah. Gangguan disebabkan oleh penggunaan Fekuensi yang sama (co channel) oleh perusahaan lain di area pertambangan yang sama.



Gambar Capaian Penanganan Gangguan SFR

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

1. Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI.
2. Perbaikan Indikator Layanan Gangguan Berdasarkan Hasil Evaluasi.
3. Implementasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Indikator Layanan Gangguan.

e. Dampak

Capaian kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sebesar 100% pada tahun 2025 memberikan dampak nyata terhadap terjaganya kualitas layanan publik dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Keberhasilan dalam menangani gangguan pada PT. Meta Sedaya Mineral secara langsung mengamankan aktivitas kelancaran operasional pertambangan terutama pada objek vital nasional di wilayah Maluku Utara. Dengan diselesaikannya interferensi (gangguan SFR), pemerintah telah berhasil memberikan keamanan bagi pemegang izin frekuensi yang sah. Selain itu, penyelesaian seluruh aduan melalui aplikasi trouble ticket membuktikan bahwa sistem pelayanan publik telah berjalan efektif dan responsif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat serta instansi pengguna frekuensi terhadap keandalan infrastruktur digital nasional.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

1. Identifikasi Permasalahan dari Laporan Kinerja Sebelumnya;
2. Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Laporan Kinerja;
3. Perbaikan Indikator Kinerja dalam Penanganan Gangguan Spektrum.
4. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut.

g. Efisiensi Sumber Daya

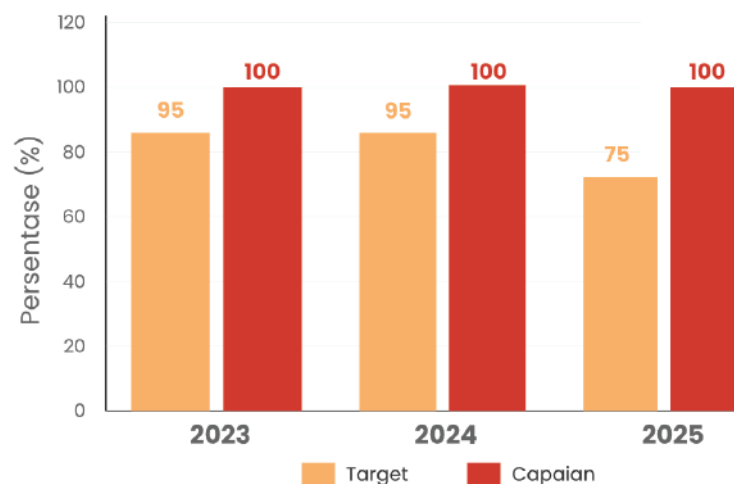
1. Menerapkan sistem otomatisasi dalam analisis data spektrum guna mempercepat identifikasi pola gangguan.
2. Melakukan komunikasi aktif dengan pemegang izin frekuensi untuk mengidentifikasi potensi penyebab gangguan.
3. Memberikan pelatihan berkala bagi petugas dalam penggunaan alat monitoring serta teknik investigasi gangguan spektrum.
4. Melakukan sosialisasi kesadaran kepada pengguna frekuensi mengenai pentingnya penggunaan spektrum yang tertib dan sesuai regulasi.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

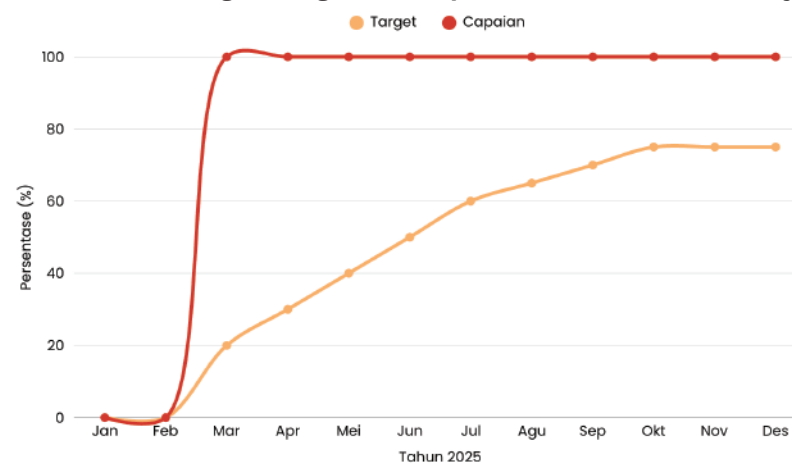
Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio, menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :

1. Berpedoman pada core value ASN, salah satunya Berorientasi pelayanan. Hal ini yang mendasari kami untuk selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik saat terjadi gangguan spektrum frekuensi radio di tengah masyarakat.
2. Setiap menangani gangguan spektrum frekuensi radio, wajib mengedepankan Akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
3. Kompetensi yang dimiliki setiap personel menjadikan setiap aduan yang diterima dapat ditangani dengan tepat dan cepat.
4. Kolaborasi yang Harmonis antara personel dengan seluruh tim kerja membuat setiap pekerjaan mampu terselesaikan dengan cepat.
5. Loyalitas tanpa batas membuat setiap personel bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab kepada bangsa dan negara untuk memberikan pelayanan terbaik.
6. Personel sangat Adaptif dalam menyikapi setiap aduan gangguan yang diterima sehingga mampu mengambil sikap agar memberikan penanganan yang tepat.
7. Kolaborasi yang mengutamakan sinergitas antara instansi dengan masyarakat membuat penanganan setiap gangguan yang ada dapat ditangani dengan baik.

4. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Pengukuran Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital direpresentasikan melalui capaian monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Pada tahun 2025, target kinerja untuk indikator ini ditetapkan sebesar 75%.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan ini berorientasi pada peningkatan kepatuhan standar teknis melalui pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah kerja Maluku Utara. Langkah ini diambil guna memastikan alat dan/atau perangkat digunakan secara bertanggung jawab dan perangkat yang beredar telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Melalui pendekatan pembinaan yang humanis serta penindakan yang tegas, Loka Monitor SFR Ternate berupaya meminimalisir pelanggaran guna menciptakan penggunaan alat dan/ atau perangkat telekomunikasi yang tertib.

b. Sasaran Kegiatan

Terlaksananya pengukuran Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di wilayah Maluku Utara.

Merujuk pada Nota Dinas Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital 2025, Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Pedoman:

1. Jenis Perangkat Prioritas

Tabel Daftar Target Perangkat Prioritas

No.	Nama Perangkat
1	HF All Band Transceiver
2	Mobile Transceiver/Radio Rig
3	Wireless Access Point (WiFi Extender, Wireless Repeater Router)
4	Pemancar FM
5	Sinbou/Mekompasi
6	Fake BTS/IMSI Catcher
7	Repeater/Penguat Sinyal Seluler
8	Jammer
9	GPS Tracker
10	Microwave/ink (IDU/ODU)
11	Handy Talkie (HT)
12	Radio POC
13	Set Top Box
14	Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard dengan dongle, True Wireless Sound (TWS), Wireless microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch)
15	Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT)
16	Alat Perangkat Telekomunikasi Rakitan

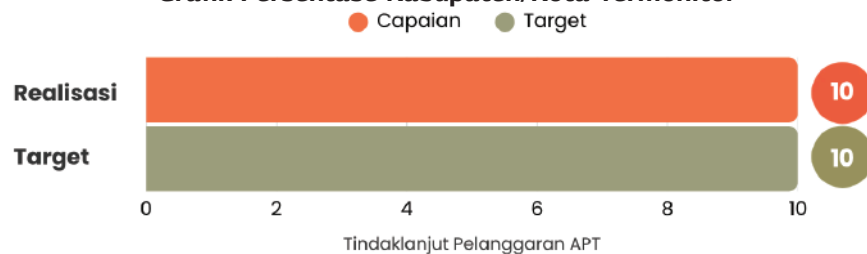
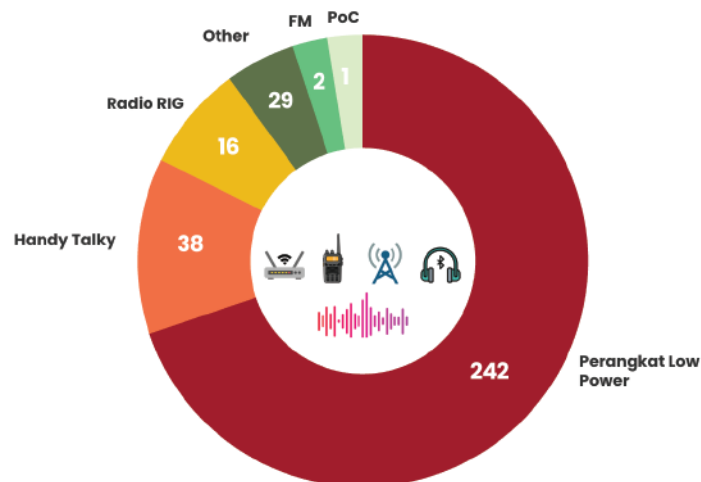
- Monitoring alat perangkat telekomunikasi dilaksanakan di 80% Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT (sekurang-kurangnya 10 Kabupaten/Kota untuk UPT yang memiliki wilayah kerja lebih dari 13 Kabupaten/Kota) sesuai tabel pada tautan <https://s.komdigi.go.id/Target2025>
- Jenis perangkat yang menjadi prioritas pengawasan dan jumlah target perangkat yang wajib dimonitor oleh masing-masing UPT sesuai tabel pada tautan <https://s.komdigi.go.id/Target2025>; target yang ditetapkan untuk UPT Loka Monitor SFR Ternate yaitu berjumlah minimal 300 perangkat dan minimal 3 jenis perangkat prioritas dan 8 Kabupaten/Kota.
- Hasil monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
- Setiap temuan pelanggaran yang ditemukan dari kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi wajib ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pengenaan sanksi.

c. Capaian Target

Tabel Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas di lapangan, Loka Monitor SFR Ternate berhasil mencatatkan realisasi capaian sebesar 100%, melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun rincian kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Grafik Persentase Capaian Perangkat Termonitor****Grafik Persentase Kabupaten/Kota Termonitor****Grafik Persentase Tindakanlanjutan Pelanggaran APT****Grafik Perbandingan Jenis APT Data Hasil Monitoring**

Pada tahun 2025 UPT Loka Monitor SFR Ternate telah melakukan Monitoring alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di 8 Kabupaten/Kota dengan hasil 328 alat/perangkat termonitor, dengan rincian 318 alat/perangkat bersertifikat dan 10 alat/perangkat tidak sesuai ketentuan teknis. Jumlah ini telah melampaui target yakni 300 target sehingga diperoleh capaian 100%.

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Inovasi:

- a. Untuk meningkatkan efektivitas dalam penertiban spektrum dan perangkat telekomunikasi ilegal.
- b. Membantu memprediksi daerah dengan pelanggaran penggunaan SFR dan APT yang tinggi.
- c. IoT-based spectrum monitoring diterapkan untuk pemantauan otomatis di wilayah dengan potensi gangguan tinggi.

Analisis Keberhasilan :

1. Menurunnya Jumlah Pelanggaran Akibat Penggunaan Frekuensi Ilegal.
2. Peningkatan Kepatuhan Pengguna Frekuensi terhadap Regulasi.
3. Peningkatan Efektivitas dalam Pengawasan dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi.
4. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang Legal.

Ketidaktercapaian:

1. Kurangnya Infrastruktur Pemantauan di Daerah Terpencil.
2. Peredaran Perangkat Telekomunikasi Ilegal Masih Tinggi.

e. Dampak

Pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio serta alat dan perangkat telekomunikasi oleh Loka Monitor SFR Ternate berdampak luas dalam menjaga ketertiban dalam pemanfaatan spectrum frekuensi radio di wilayah Maluku Utara. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap perangkat yang beroperasi telah memenuhi standar teknis dan regulasi sertifikasi yang berlaku. Langkah penertiban ini secara efektif mendorong kepatuhan pengguna frekuensi sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan perangkat legal demi menjaga keamanan komunikasi publik. Dengan tegaknya regulasi di lapangan, masyarakat di wilayah Maluku Utara dapat menikmati layanan komunikasi, penyiaran yang lebih aman, terpercaya, dan bebas dari potensi gangguan teknis yang dapat merugikan.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Laporan kinerja sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, serta kendala dalam upaya penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Berdasarkan evaluasi tersebut, langkah-langkah perbaikan telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penertiban.

g. Efisiensi Sumber Daya

- a. Mengidentifikasi wilayah rawan penggunaan frekuensi ilegal atau perangkat tidak bersertifikasi.
- b. Memanfaatkan perangkat untuk melacak sumber sinyal ilegal secara akurat.
- c. Bekerja sama dengan operator telekomunikasi, pemegang izin frekuensi, dan komunitas radio untuk mendapatkan informasi lebih cepat terkait gangguan atau pelanggaran spektrum.
- d. Mengembangkan platform pelaporan online yang memungkinkan masyarakat atau operator melaporkan penggunaan spektrum ilegal secara lebih cepat.
- e. Memanfaatkan sistem berbasis AI atau Big Data untuk menganalisis tren pelanggaran spektrum guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
- f. Melakukan razia berkala untuk mengurangi penggunaan spektrum tanpa izin dan peredaran perangkat yang tidak sesuai standar.

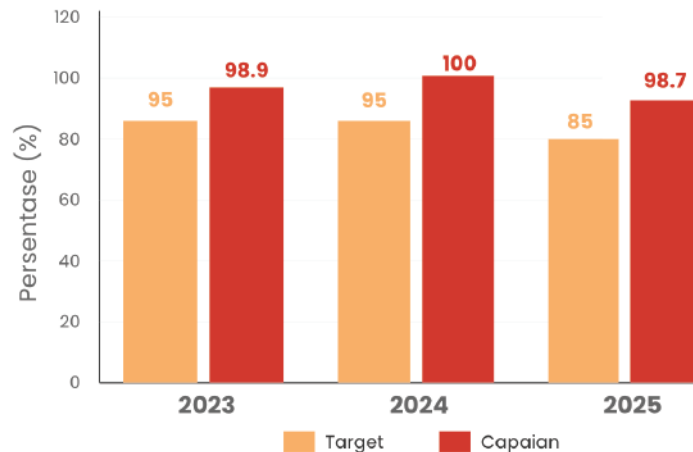
h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi, Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :

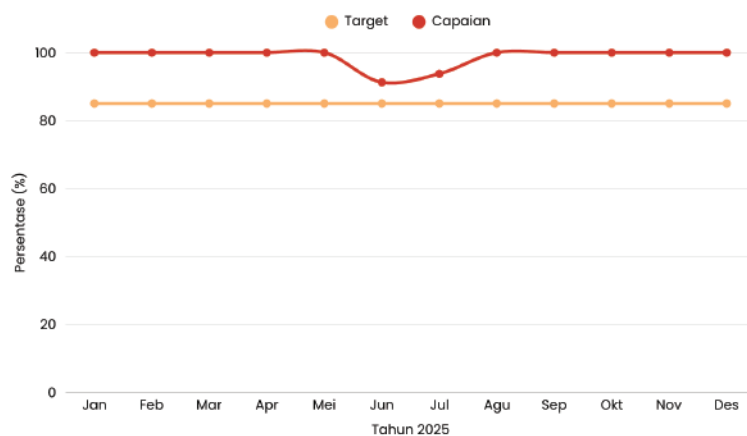
1. Kegiatan penertiban merupakan bagian dari poin Berorientasi pada pelayanan dalam nilai dasar yang wajib dimiliki ASN. Dalam kegiatan ini, kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada bangsa dan negara dengan menertibkan Spektrum Frekuensi dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
2. Pelaksanaan penertiban ini tentu saja didukung dengan data yang Akuntabel, setiap alat/ perangkat teknologi yang beredar di pasaran selalu dipastikan nomor sertifikasinya terlebih dahulu. Jika perangkat tersebut tidak sesuai dan tidak berizin, dengan tegas kami tindak sesuai peraturan yang berlaku.
3. Setiap personel yang turun ke lapangan dibekali dengan informasi dan Kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, sehingga kegiatan penertiban dapat terlaksana sesuai target dan berdasar pada

- aturan yang berlaku.
4. Suasana kerja dibangun dengan diskusi yang aktif membuat jalannya pekerjaan menjadi terasa Harmonis.
 5. Dalam melaksanakan kegiatan penertiban, tentu saja tim kerja mengedepankan Loyalitasnya terhadap kepentingan instansi, sehingga kegiatan penertiban dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.
 6. Mampu berAdaptasi dalam setiap perubahan aturan dan perkembangan teknologi membuat setiap kegiatan penertiban berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dari pimpinan pusat.
 7. Kolaboratif dan transparan dalam setiap kegiatan penertiban menjadi hal mendasar untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.

5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT pada tahun 2025 memiliki target sebesar 85%. Capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 98.7 % dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Stasiun monitor frekuensi radio berperan sangat vital dalam pengelolaan spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya terbatas dan strategis. Spektrum frekuensi digunakan dalam berbagai sektor, seperti telekomunikasi, penyiaran, navigasi, pertahanan, dan layanan darurat. Untuk memastikan pemanfaatan yang efisien dan bebas dari gangguan, diperlukan sistem monitoring yang andal dan terus beroperasi secara optimal.

Keberlanjutan operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio sangat penting untuk menjaga kestabilan komunikasi, menghindari interferensi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi spektrum. Dengan menerapkan modernisasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor, efektivitas stasiun monitor dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi dapat terus ditingkatkan.

b. Sasaran Kegiatan

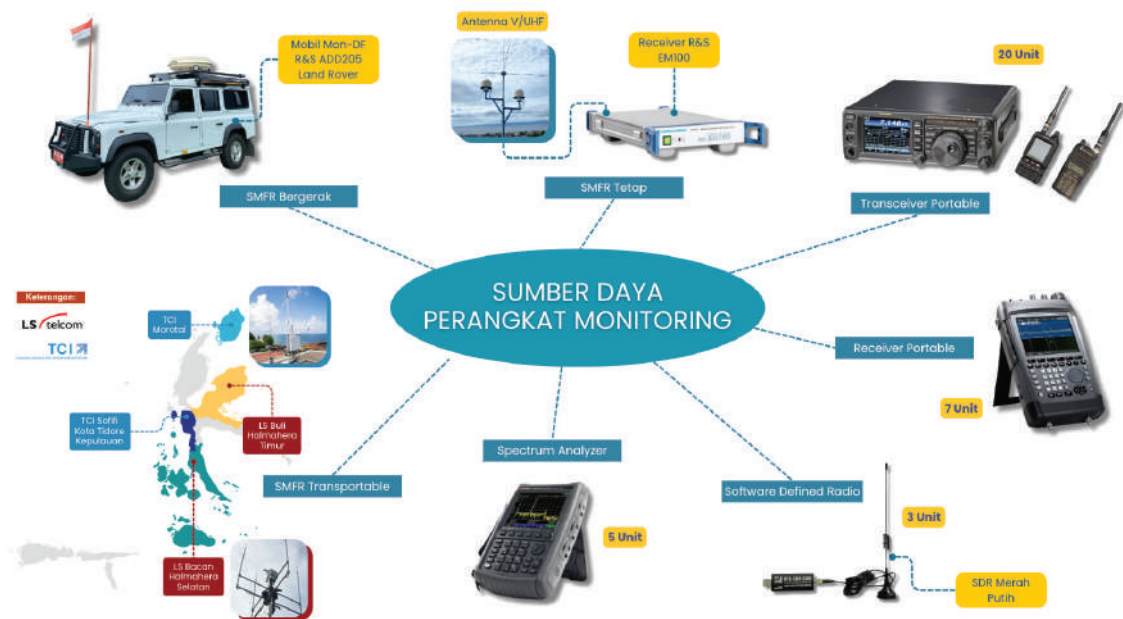
Untuk memastikan stabilitas dan efektivitas operasional Stasiun Monitor Frekuensi Radio, diperlukan sasaran kegiatan yang jelas dan terukur. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan spektrum frekuensi radio, mencegah gangguan, mendapatkan data potensi penggunaan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Capaian Target

Tabel Capaian Target Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	98.7%

Terpenuhinya operasional tugas pokok dan fungsi berupa fungsi kerja perangkat monitoring spektrum frekuensi radio yang stabil dan akurat.



Gambar Sumber daya perangkat monitoring Loka Monitor SFR Ternate TA 2025

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Inovasi :

1. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Monitoring
2. Pemanfaatan IoT dalam Pemantauan Spektrum
3. Peningkatan Kecepatan Deteksi dan Respons Gangguan
4. Optimalisasi Mobilitas Stasiun Monitoring

Analisis Keberhasilan :

1. Terjaganya fungsi kerja perangkat
2. Terpenuhinya kualitas data monitoring/pengukuran/pencari arah
3. Peningkatan Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya

Ketidaktercapaian :

1. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau oleh sistem pemantauan spektrum, terutama di wilayah terpencil.
2. Pengguna ilegal mulai menggunakan teknologi yang lebih sulit dideteksi.

e. Dampak

Keberlangsungan operasional dan efektivitas fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di Loka Monitor SFR Ternate memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban serta kestabilan spektrum frekuensi radio di Maluku Utara. Sebagai bagian integral dari upaya pengawasan infrastruktur digital, stasiun ini berfungsi untuk memastikan seluruh penggunaan frekuensi radio selaras dengan regulasi

yang berlaku. Melalui performa perangkat monitoring yang stabil dan akurat, Loka Monitor SFR Ternate mampu mencegah gangguan serta penyalahgunaan frekuensi yang dapat berdampak negatif terhadap sektor-sektor vital, mulai dari layanan meteorologi hingga navigasi peberangan dan maritime.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas operasional Stasiun Monitor Frekuensi Radio, laporan kinerja sebelumnya telah dianalisis guna mengidentifikasi kelemahan, keberhasilan, serta peluang perbaikan. Tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pemantauan, mempercepat respons terhadap gangguan spektrum frekuensi radio, dan memastikan pemanfaatan yang lebih tertib dan efisien.

g. Efisiensi Sumber Daya

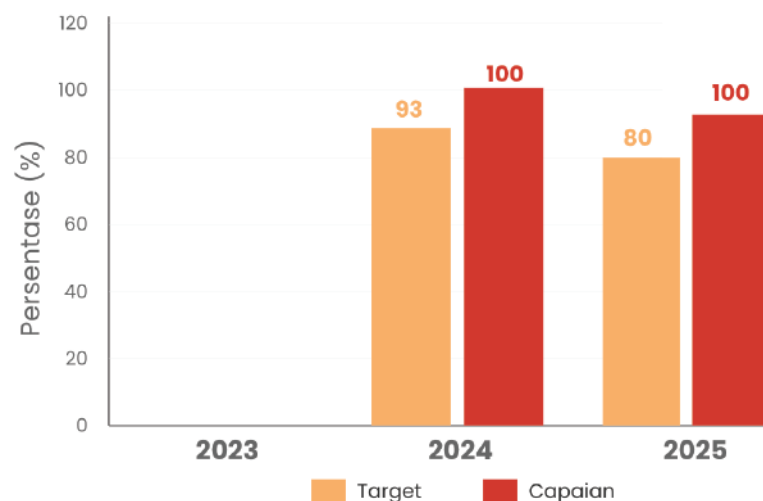
1. Integrasi sistem monitoring dengan pusat data nasional untuk memastikan pengelolaan spektrum yang lebih komprehensif dan berbasis real-time.
2. Mengembangkan sistem informasi berbasis cloud untuk penyimpanan dan analisis data spektrum secara lebih efisien.
3. Menerapkan dashboard pemantauan berbasis web atau aplikasi mobile agar
4. Data pemantauan bisa diakses dengan mudah oleh pihak terkait.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas, petugas berkomitmen untuk Berorientasi pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan respon yang cepat dalam setiap aduan terkait pelayanan ISR di masyarakat.
2. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT dilakukan dengan Akuntabel.
3. Petugas pemeliharaan tentu saja memiliki Kompetensi dibidangnya dan selalu meningkatkan kemampuan agar selalu bisa beradaptasi dengan pembaruan teknologi dan informasi.
4. Dalam pelaksanaan tugas, petugas selalu membangun suasana kerja yang Harmonis. Dalam hal ini, setiap petugas selalu aktif untuk saling berbagi informasi dan ilmu agar setiap petugas memiliki informasi dan ilmu yang setara dalam melaksanakan tugas.
5. Petugas berusaha untuk Loyal terhadap aturan dan Standar Operasional Prosedur pemeliharaan yang telah ditetapkan.
6. Petugas selalu Adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi dalam hal pemeliharaan perangkat.
7. Koordinasi yang Kolaboratif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan infrastruktur perangkat SMFR berada dalam kondisi yang baik.

6. Penanganan Sanksi Denda Administratif



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif pada tahun 2025 memiliki target sebesar 80%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam terbatas ini agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Tren penggunaan media frekuensi radio untuk keperluan telekomunikasi terus berkembang pesat, baik untuk layanan umum seperti seluler dan BWA, maupun keperluan internal institusi. Tantangan wilayah Indonesia yang luas menuntut adanya sistem monitoring yang handal dan perencanaan yang kuat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana ketentuan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Maksud dari kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio adalah untuk menjawab tantangan pengelolaan frekuensi di wilayah yang luas melalui pemanfaatan sistem monitoring/sensor elektronik dan peningkatan kompetensi Fungsional Pengendali Frekuensi Radio. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat mengumpulkan data akurat untuk menjamin penggunaan frekuensi yang tertib dan sesuai peruntukan.

1. Melakukan observasi dan monitoring penggunaan spektrum untuk memastikan tidak adanya penggunaan frekuensi ilegal yang merugikan.
2. Melakukan pengukuran parameter teknis dan inspeksi lapangan guna memverifikasi kesesuaian stasiun radio yang beroperasi dengan data perizinan (ISR) yang dimiliki.
3. Melakukan penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai ketentuan atau tidak memiliki izin.
4. Menangani keluhan dari pengguna frekuensi berizin terkait adanya gangguan (interference) secara cepat dan tepat.
5. Menjamin ketersediaan spektrum frekuensi radio yang bersih dan bebas gangguan guna mendukung layanan telekomunikasi publik dan operasional institusi.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini meliputi pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, baik perorangan, badan hukum, maupun instansi yang terbukti menggunakan spektrum tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) atau mengoperasikan perangkat yang tidak memenuhi standar teknis. Melalui penegakan hukum ini, diharapkan tercipta peningkatan kepatuhan hukum (compliance) yang memberikan efek jera serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya tata tertib frekuensi. Selain itu, kegiatan ini juga menyasar pada optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui mekanisme penagihan dan penyetoran denda yang tertib ke Kas Negara, serta terwujudnya penegakan tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku guna menghindari penyalahgunaan wewenang.

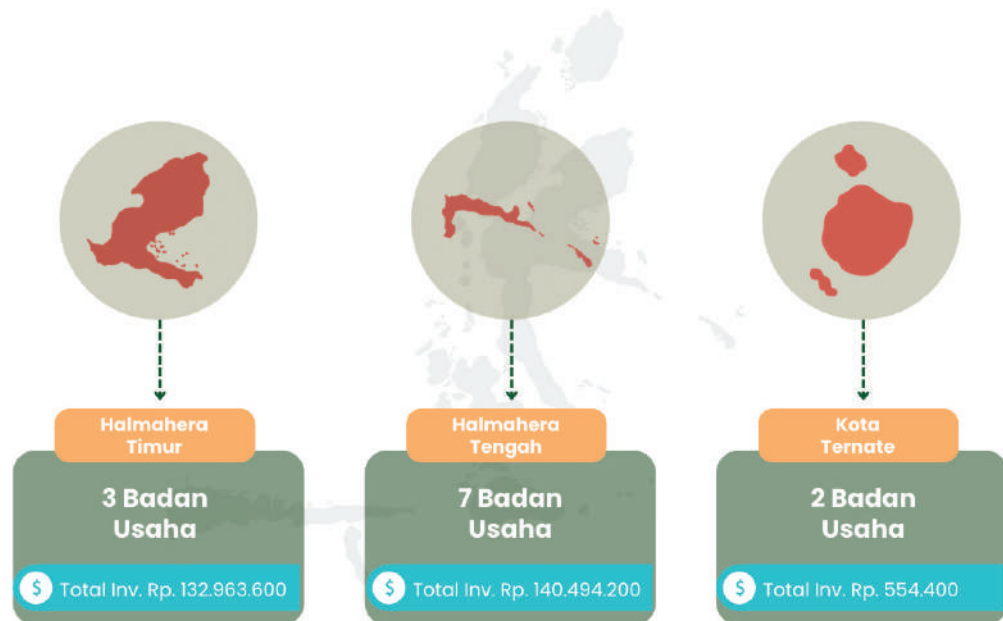
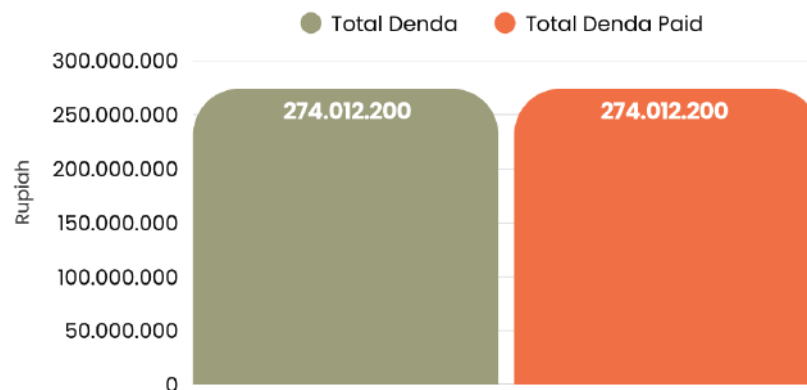
c. Capaian Target

Tabel Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%

Penanganan Sanksi Denda Administratif dapat dilaksanakan jika kegiatan Monitoring dan penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terlaksana. Pelanggaran yang ditemukan dari hasil Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi akan dikenakan sanksi diantaranya sanksi denda administratif. Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi denda administratif meliputi pelanggaran ISR, IPFR dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pada Tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate melaksanakan penanganan sanksi denda administratif sebagai tindak lanjut langsung atas kegiatan monitoring dan penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di wilayah kerja Maluku Utara. Loka Monitor SFR Ternate menerbitkan sebanyak 12 invoice sanksi denda administratif dengan total nilai tagihan sebesar Rp Rp 274,012,200 Seluruh invoice tersebut telah dibayarkan lunas, sehingga tidak terdapat invoice denda administratif yang belum terbayar.

**Gambar Pelanggaran sanksi denda administratif 2025****Grafik Capaian tindak lanjut Pengenaan sanksi denda administratif 2025**

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Inovasi :

1. Penerapan notifikasi digital dan e-Billing untuk percepatan penyampaian tagihan denda.
2. Integrasi data hasil monitoring frekuensi dengan sistem penetapan sanksi administratif.
3. Otomatisasi perhitungan besaran denda berdasarkan regulasi terbaru untuk menghindari kesalahan hitung (human error).
4. Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan penyelesaian sanksi secara hybrid (daring/luring).

Analisis Keberhasilan :

1. Tercapainya target realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor denda administratif.
2. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pengguna frekuensi pasca-penerapan sanksi yang tegas.
3. Terlaksananya proses administrasi penagihan yang transparan, akuntabel, dan sesuai SOP.

Ketidaktercapaian :

1. Masih terdapat kendala dalam penyampaian surat sanksi fisik akibat validitas data alamat pelanggar yang tidak lengkap atau sudah pindah.
2. Tingkat kolektibilitas denda belum mencapai 100% dikarenakan adanya pelanggar yang tidak memiliki kemampuan finansial atau mengajukan keberatan yang berlarut-larut.

e. Dampak

Penerapan mekanisme pembayaran sanksi denda administratif secara langsung pada saat penertiban oleh Loka Monitor SFR Ternate memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum di wilayah Provinsi Maluku Utara. Dengan penyelesaian sanksi yang dilakukan seketika di lapangan, persentase penanganan sanksi denda administratif berhasil mencapai 100%, baik dari sisi jumlah invoice maupun nilai nominal. Selain memastikan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tepat waktu, mekanisme ini juga memberikan efek jera yang efektif serta meningkatkan kesadaran hukum bagi para pengguna spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi agar senantiasa mematuhi standar teknis yang berlaku.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Sebagian besar sanksi denda yang diterbitkan berasal dari hasil operasi penertiban nasional dengan memantau langsung aktual penggunaan frekuensi di lapangan. Sehingga untuk tahun 2025 akan diperkuat kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dan lembaga terkait lainnya demi memperoleh informasi pelanggaran SFR dan APT. Di tahun 2025 ini penerapan sanksi administratif bagi pengguna frekuensi illegal juga dapat berasal dari hasil kegiatan pemantauan SFR dan APT Kabupaten/Kota. Sebaiknya pada prosesnya diawali dengan sosialisasi secara berkala kepada pengguna frekuensi yang diharapkan mampu menekan angka pelanggaran penggunaan SFR dan APT.

g. Efisiensi Sumber Daya

1. Mekanisme Pelaksanaan Pengenaan sanksi diberikan kepada pelanggar Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi (APT), yang didahului dengan penerbitan Surat Teguran serta Berita Acara Penghentian penggunaan SFR dan APT.
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi, baik pada saat momentum Penertiban Nasional maupun saat kegiatan pemantauan rutin SFR dan APT di wilayah Kabupaten/ Kota.
3. Durasi Kegiatan Target waktu penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan penanganan ditetapkan dalam rentang waktu 4 hari.
4. Sumber Daya Manusia Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim yang terdiri dari 4 personil, di mana masing-masing individu memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan peran yang telah ditentukan.

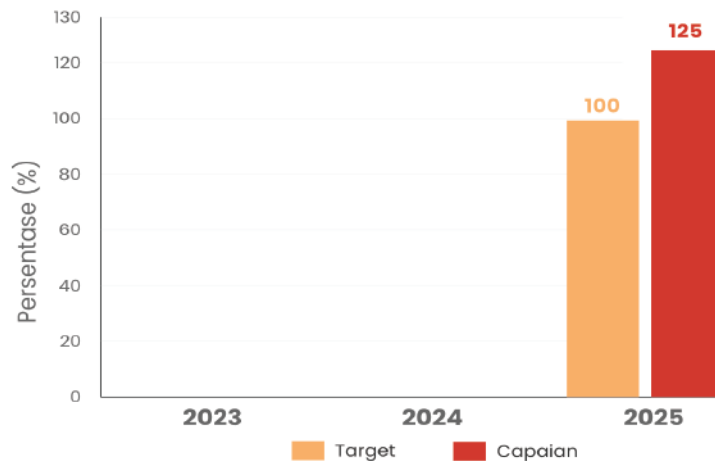
h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Sanksi Administratif, Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut:

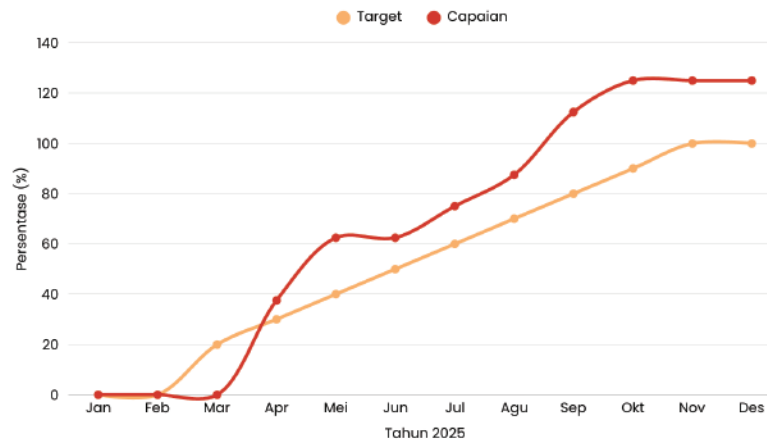
1. Dalam melaksanakan tugas, tim penertiban berkomitmen untuk Berorientasi Pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan komunikasi yang efektif kepada masyarakat, memberikan edukasi mengenai aturan, serta merespon laporan gangguan dengan cepat, khususnya bagi pemegang izin.
2. Setiap tahapan penertiban dilakukan secara Akuntabel. Sistem akuntabilitas diterapkan secara jelas dengan mengedepankan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil serta keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tim kerja yang terlibat adalah personil yang Kompeten, di mana petugas memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang frekuensi radio.
4. Dalam pelaksanaan tugas, petugas selalu membangun hubungan yang Harmonis. Hal ini diwujudkan melalui hubungan yang baik dan kolaboratif antara semua pihak terkait, termasuk otoritas regulasi,

- aparatus penegak hukum, dan pemegang izin.
5. Petugas berusaha untuk Loyal terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika. Setiap tindakan yang diambil oleh tim penertiban dipastikan selalu sesuai dengan nilai-nilai etika dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Tim penertiban selalu Adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, baik dari segi perkembangan teknologi maupun regulasi, serta rutin melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan demi perbaikan yang berkelanjutan.
 7. Menjalinkan kerja sama yang Kolaboratif dengan erat antar pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penertiban frekuensi radio.

7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100% (8 Kabupaten/Kota). Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate pada tahun 2025 mencapai 125% (10 Kabupaten/Kota) dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, layanan telekomunikasi telah menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan layanan yang andal, merata dan berkualitas tinggi merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi digital, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran terhadap kualitas layanan telekomunikasi menjadi kegiatan strategis yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas layanan yang layak dan sesuai standar.

Sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler menyatakan bahwa setiap penyelenggara wajib memenuhi parameter teknis tertentu seperti kekuatan sinyal, kecepatan unduh dan unggah, latensi, serta tingkat kebersihan panggilan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pengguna jasa telekomunikasi. Mendorong peningkatan kualitas layanan oleh penyelenggara.

Menyediakan data objektif sebagai bahan evaluasi dan pengawasan pemerintah dan menjamin layanan telekomunikasi yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Maksud dan tujuan kegiatan pengukuran kualitas layanan antara lain:

1. Melakukan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi untuk mengetahui kualitas layanan (Quality of Service) yang diberikan operator seluler kepada pelanggan secara Drive Test dan Static Test;
2. Memastikan kualitas layanan telekomunikasi optimal pada kabupaten/kota di Maluku Utara khususnya layanan publik seperti jalan protokol, pusat pemerintah, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan rumah sakit.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan mencakup berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari pemerintah selaku regulator yang membutuhkan data dukung akurat untuk pengawasan dan pengambilan kebijakan, hingga penyelenggara jaringan seluler dan lembaga penyiaran yang didorong untuk menjaga kepatuhan standar teknis serta melakukan perbaikan jaringan berdasarkan umpan balik objektif. Selain itu, kegiatan ini juga menasar langsung kepada masyarakat pengguna layanan guna menjamin hak mereka atas akses telekomunikasi yang prima, stabil, dan transparan, sekaligus mendukung pengembangan wilayah dan infrastruktur daerah melalui penyediaan peta sebaran kualitas layanan yang mampu mengidentifikasi kesenjangan akses (blank spot) dalam rangka percepatan transformasi digital.

c. Capaian Target

Tabel Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	125%

Laporan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk kegiatan pengukuran kualitas layanan (QOS) di wilayah kerja UPT merujuk pada Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2025, Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan Terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025. Indikator terlaksananya pengukuran kualitas layanan (QOS) sebagai berikut:

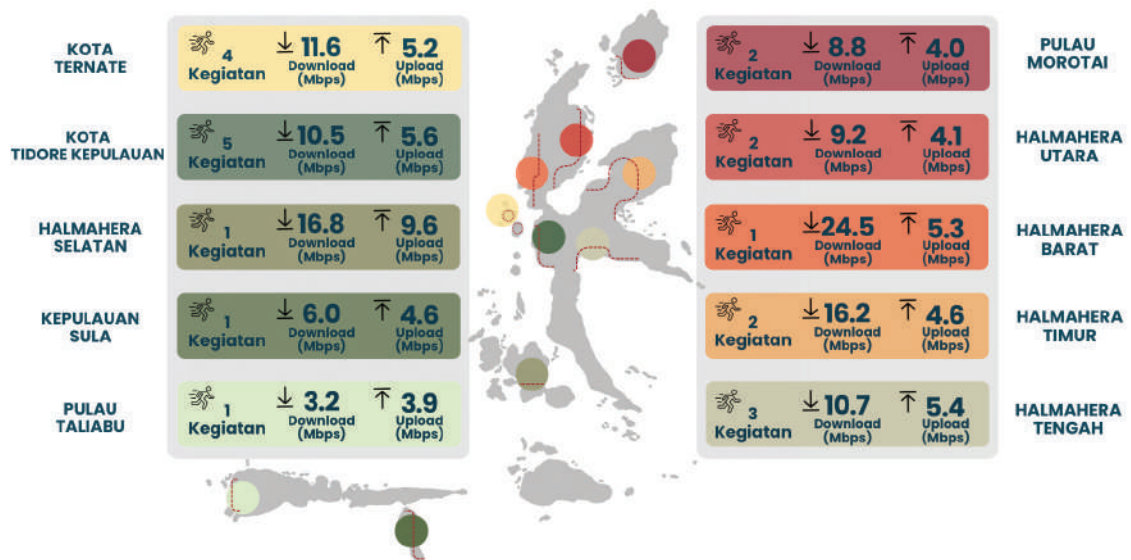
1. Setiap hasil pengukuran kualitas layanan wajib di sampaikan kepada Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital untuk ditindaklanjuti melalui pengolahan data (Post-processing) pada Pusat Monitoring Telekomunikasi.
2. Hasil pengolahan data (Post-processing) disampaikan kembali oleh Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) kepada Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate untuk dianalisis.
3. Pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan terdiri dari Static Test dan Drive Test.
 - **STATIC TEST** merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara tetap di titik-titik yang ditentukan pada 1 (satu) kota atau kabupaten yang berfokus di pusat pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, pemukiman, dan point of interest lain yang diperlukan.

Jenis Pengukuran	
1	Point of interest pengukuran reguler
2	Point of interest pengukuran insidentil (sesuai kebutuhan)
Jenis Layanan yang Diukur	
1	Youtube Streaming
2	Browsing
3	Speedtest Crowdsourcing
4	File Transfer Protocol DL & UL Test
5	HTTP DL & UL Test
6	Ping Test
7	Whatsapp Call
8	Whatsapp Message

- **DRIVE TEST** merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau sarana transportasi umum dengan mengikuti rute yang telah ditetapkan. Rute tersebut meliputi jalan protokol, wilayah bisnis dan pemukiman, sarana transportasi umum, dan rute lain yang diperlukan. Metode ini dapat menjadi acuan kualitas layanan telekomunikasi di suatu lokasi kota atau kabupaten. Penyelenggara jaringan bergerak seluler harus memenuhi parameter dan tolok ukur kualitas kinerja jaringannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jenis Pengukuran	
1	Drive Test Idle (pengukuran di rute penghubung)
2	Mengukur kuat sinyal jaringan bergerak seluler 2G/3G/4G
3	Mengukur kualitas sinyal jaringan bergerak seluler 3G/4G
Jenis Layanan yang Diukur	
1	Youtube Streaming
2	Browsing
3	Speedtest Crowdsourcing
4	File Transfer Protocol DL & UL Test
5	HTTP DL & UL Test
6	Ping Test
7	Whatsapp Call
8	Whatsapp Message

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate telah melaksanakan kegiatan pengukuran kualitas layanan (QoS) di beberapa lokasi strategis dalam wilayah kerja. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang optimal di wilayah Ternate dan sekitarnya, khususnya pada area layanan publik seperti jalan protokol, pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, pelabuhan, bandar udara, dan pusat kesehatan. Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan kegiatan pengukuran kualitas layanan (QoS) terdiri dari 10 Kabupaten/Kota Wilayah Kerja UPT Loka Ternate sebagai berikut: Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, dari target yang ditetapkan yaitu 80% dari jumlah wilayah kerja UPT atau 8 Kabupaten/Kota dari 10 Kabupaten/wilayah kerja UPT, UPT Loka Monitor SFR Ternate mencapai target yang signifikan yaitu 10 Kabupaten/Kota atau 125%.



Gambar Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan (QoE) dan Perbandingan Average Speed Test Tiap Kabupaten/Kota

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Inovasi :

1. Penerapan visualisasi data berbasis GIS (Geographic Information System) untuk pemetaan blank spot dan area lemah sinyal.
2. Pembuatan dashboard visualisasi data hasil pengukuran kualitas layanan pada aplikasi tableau.
3. Pemanfaatan metode Walk Test untuk pengukuran kualitas layanan di area publik indoor (seperti terminal bandara dan pelabuhan).
4. Integrasi data keluhan masyarakat sebagai referensi utama dalam penentuan prioritas rute ukur Drive Test.
5. Percepatan pelaporan hasil ukur melalui sistem pengolahan data (post-processing) terpusat

Analisis Keberhasilan :

1. Tersampainya laporan hasil pengukuran secara tepat waktu ke Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT).
2. Tersedianya data parameter teknis (RSRP, SINR, Throughput) yang valid dan akurat sebagai bahan evaluasi operator.
3. Terpetaknya kondisi riil kualitas jaringan seluler pada area-area vital pemerintahan dan pelayanan publik.

Ketidaktercapaian :

1. Masih terdapat rute pengukuran di wilayah pelosok yang belum dapat terjangkau akibat kondisi geografis yang sulit dan akses jalan yang rusak.
2. Kendala cuaca ekstrem yang seringkali menghambat pelaksanaan Drive Test, sehingga target waktu penyelesaian pengukuran sedikit tertunda.

e. Dampak

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif antara lain:

1. Penyediaan Data Kualitas Layanan yang Akurat dan Akuntabel: Tersedianya basis data hasil pengukuran (drive test) yang objektif sebagai referensi valid dalam mengevaluasi performa jaringan seluler di wilayah kerja Loka Monitor SFR Ternate. Data ini berfungsi sebagai instrumen audit teknis untuk membandingkan realitas kualitas sinyal di lapangan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggara Telekomunikasi: Memperkuat fungsi kontrol Loka Monitor SFR Ternate dalam memastikan kepatuhan operator seluler terhadap regulasi teknis, sehingga setiap penggelaran infrastruktur digital di wilayah Maluku Utara terpantau dengan baik.
3. Jaminan Kualitas Layanan yang Optimal bagi Masyarakat: Mendorong terciptanya konektivitas yang lebih stabil dan inklusif, serta meminimalisir kendala komunikasi seperti putus sambungan (drop call) atau area tanpa sinyal (blank spot).

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Mengingat Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, maka belum terdapat data perbandingan atau evaluasi dari laporan kinerja tahun sebelumnya (2024). Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini tindak lanjut difokuskan pada inisiasi pembentukan basis data (baseline) kualitas layanan seluler di wilayah kerja Loka Monitor Ternate. Strategi pelaksanaan akan diprioritaskan pada pemetaan awal di lokasi-lokasi fasilitas publik vital dan area yang sering dikeluhkan masyarakat (blank spot). Hasil pengukuran perdana di tahun 2025 ini nantinya akan dijadikan acuan utama untuk menetapkan target peningkatan kualitas layanan dan perluasan cakupan pengukuran pada tahun-tahun berikutnya, serta sebagai bahan koordinasi awal dengan penyelenggara telekomunikasi terkait pemenuhan standar kualitas layanan.

g. Efisiensi Sumber Daya

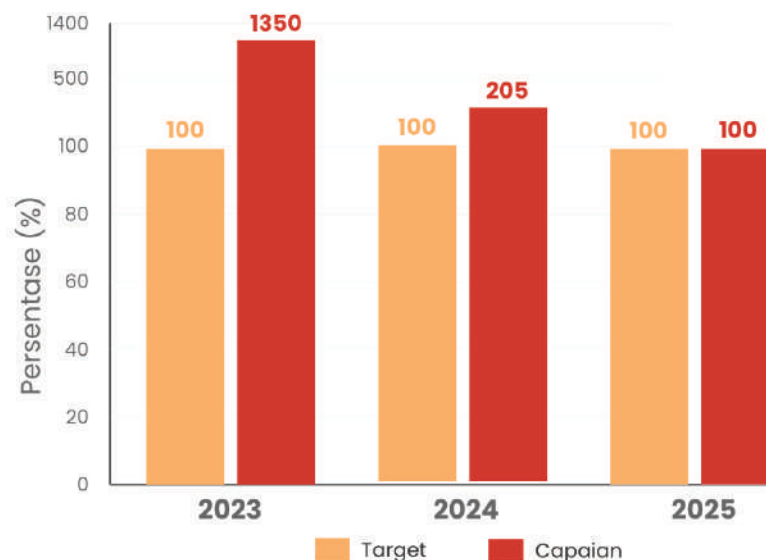
1. Alokasi Sumber Daya dan Waktu Setiap kegiatan pengukuran dilaksanakan dengan melibatkan tim teknis yang terdiri dari 4 (empat) orang personil dengan durasi pelaksanaan tugas selama 4 (empat) hari kerja.
2. Penerapan Teknologi dan Efisiensi Penyelesaian pekerjaan didukung oleh penerapan sistem kerja berbasis teknologi guna mengurangi beban kerja manual serta mempercepat proses analisis data (post-processing) hasil pengukuran.
3. Optimalisasi Jadwal dan Rute Strategi peningkatan produktivitas dilakukan melalui optimalisasi jadwal, yaitu dengan menggabungkan target pengukuran di beberapa kabupaten/kota yang memiliki lokasi berdekatan dalam satu rangkaian kegiatan.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

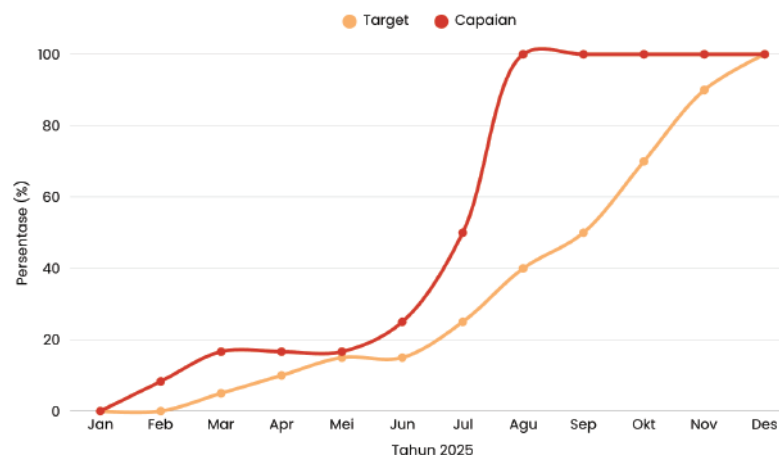
Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Sanksi Administratif, Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas, petugas berkomitmen untuk Berorientasi Pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan tepat waktu.
2. Seluruh hasil kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dilakukan secara Akuntabel. Hal ini dipastikan dengan pendataan yang baik dan pelaporan yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak terhadap hasil pemeriksaan.
3. Petugas pemeriksaan memiliki Kompetensi yang mumpuni dan terus mengembangkan keahlian melalui pelatihan serta sertifikasi agar dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terkini.
4. Dalam pelaksanaan tugas, petugas selalu menjaga hubungan yang Harmonis. Kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dijaga melalui komunikasi yang baik guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
5. Setiap personel menunjukkan sikap Loyal dengan mendedikasikan diri sepenuhnya dalam menjalankan tugas untuk memastikan tegaknya kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi radio.
6. Petugas selalu Adaptif melalui penerapan teknologi baru dan metode kerja inovatif yang terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas serta siap menghadapi tantangan yang berubah-ubah.
7. Membangun sinergi yang Kolaboratif dengan seluruh pengguna frekuensi dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio.

8. Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT dan Program ISR Maritim Nelayan (MOTS-IKRAN) dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan metode ujian yang lebih modern, transparan, dan efisien, serta mempermudah peserta dalam mengakses dan menyelesaikan ujian secara digital.
2. Meminimalisir kesalahan dalam koreksi jawaban sekaligus meningkatkan standar ujian agar sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
3. Memberikan kemudahan akses layanan perizinan secara langsung (jemput bola) bagi nelayan untuk memiliki ISR Maritim atau IKRAN.
4. Memberikan edukasi mengenai dampak penggunaan alat komunikasi yang tidak sesuai standar terhadap keselamatan penerbangan, serta membantu nelayan memenuhi aspek legalitas perangkat telekomunikasi di kapal.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT dan Program ISR Maritim Nelayan (MOTS-IKRAN) adalah:

1. Meningkatkan akurasi, kecepatan evaluasi, serta kredibilitas dan transparansi dalam pelaksanaan ujian negara bagi amatir radio melalui sistem otomatisasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi radio dan mendukung digitalisasi layanan perizinan sebagai bagian dari transformasi teknologi informasi.
3. Mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai peruntukan di sektor maritim guna mengurangi hingga meniadakan gangguan (interference) pada frekuensi penerbangan.
4. Meningkatkan kesadaran hukum serta mendukung kesejahteraan nelayan dan vitalitas sektor maritim melalui jaminan kelancaran komunikasi antar nelayan maupun ke darat.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan Program ISR Maritim Nelayan (MOTS-IKRAN) meliputi:

1. Calon dan Anggota Amatir Radio Individu yang ingin memperoleh Izin Amatir Radio (IAR) baru, serta anggota komunitas atau organisasi amatir radio (seperti ORARI) yang ingin meningkatkan klasifikasi kecakapannya (Kenaikan Tingkat).
2. Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan Nelayan tradisional maupun modern, serta pemilik armada kapal perikanan yang menggunakan perangkat radio komunikasi untuk operasional dan membutuhkan legalitas berupa ISR Maritim atau IKRAN.
3. Operator Radio Sektor Maritim Individu yang bertugas mengoperasikan perangkat radio di atas kapal yang memerlukan kompetensi khusus dan sertifikasi resmi (SRC/LRC) guna menunjang keselamatan pelayaran.
4. Institusi dan Organisasi Penanggulangan Bencana Lembaga, kelompok relawan, atau tim SAR (Search and Rescue) yang memanfaatkan jejaring komunikasi radio untuk koordinasi tanggap darurat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Lembaga Pendidikan dan Riset Instansi pendidikan atau organisasi penelitian yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai media eksperimen dan pengembangan teknologi komunikasi.
6. Sektor Penerbangan dan Navigasi Udara Pihak penerbangan sipil yang menjadi sasaran dampak positif dari program penertiban, yaitu berkurangnya gangguan (interference) frekuensi radio yang membahayakan keselamatan penerbangan.

c. Capaian Target

Tabel Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%

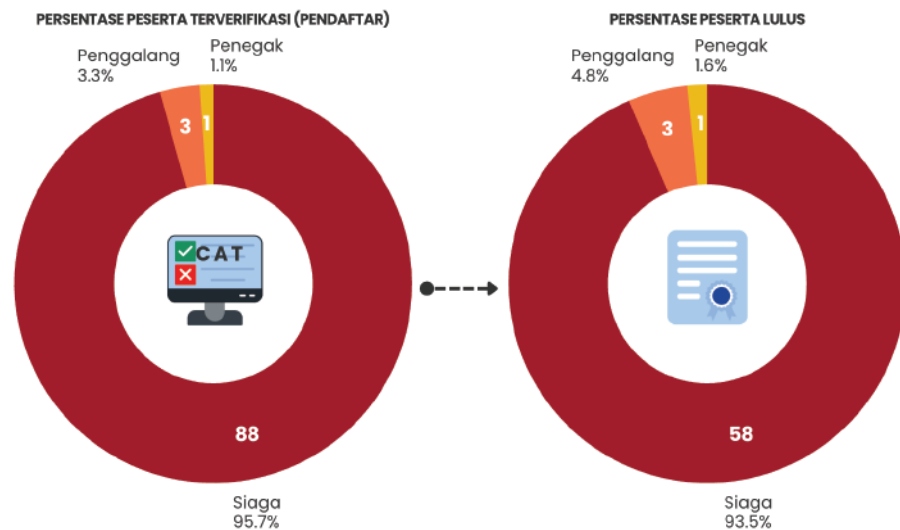
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) bertujuan untuk mencapai beberapa target yang terukur, yaitu:

1. Terlaksananya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) secara berkala guna memfasilitasi masyarakat yang ingin memperoleh atau menaikkan tingkat Izin Amatir Radio (IAR). Indikator ini menilai keberhasilan implementasi sistem ujian yang modern, transparan,

- dan efisien dalam mencetak operator amatir radio yang kompeten.
2. Terlaksananya Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) dan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) untuk memastikan nelayan dan pengguna radio maritim memiliki kompetensi dan legalitas yang sah dalam mengoperasikan perangkat radio, khususnya untuk keselamatan pelayaran.
 3. Tercapainya persentase realisasi kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan, yang mencerminkan komitmen satuan kerja dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Tabel Rincian Capaian Pelaksanaan UNAR

LOKASI UJIAN	PESERTA TERVERIFIKASI			PESERTA LULUS		
	Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak
Kota Ternate (Reguler I)	10	2	0	6	2	0
Kota Ternate (Reguler II)	1	0	0	1	0	0
Kota Ternate (Reguler III)	1	0	0	1	0	1
Kota Ternate (Reguler IV)	1	0	1	1	0	1
Kota Ternate (Reguler V)	5	0	0	5	0	0
Halmahera Tengah (Non Reguler I)	48	1	0	31	1	0
Halmahera Tengah (Non Reguler II)	22	0	0	13	0	0
Sub Total	88	3	1	58	3	1
Total	92			63		

**Grafik Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)****Tabel Rincian Capaian Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Realisasi	Sasaran Output	Hasil
1	Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN	1 Kegiatan	100%	Penerbitan Sertifikat SRC/LRC dan IKRAN	20 LRC
2	Layanan MOTS	12 Bulan	100%	Izin Stasiun Maritim	15 ISR Maritim

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) serta percepatan Program MOTS-IKRAN, beberapa inovasi telah diterapkan, antara lain:

1. Proses penilaian UNAR dilakukan secara otomatis menggunakan sistem CAT sehingga mengurangi human error dan meningkatkan transparansi hasil ujian.
2. Integrasi sistem perizinan dengan database izin amatir radio dan data kapal perikanan (KKP) untuk mempermudah proses verifikasi dan sertifikasi.
3. Pembaruan Bank Soal UNAR secara berkala agar sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan regulasi komunikasi radio yang berlaku.
4. Penyediaan simulasi ujian UNAR (seperti aplikasi SeeNow) bagi peserta agar dapat berlatih dan beradaptasi dengan sistem sebelum ujian resmi.
5. Penerapan layanan “Jemput Bola” pada program MOTS-IKRAN, di mana petugas mendatangi langsung sentra-sentra nelayan dan pelabuhan untuk melakukan sosialisasi, pemberkasan, dan penerbitan ISR Maritim di tempat.

Beberapa indikator keberhasilan dari implementasi ujian berbasis CAT dan Program MOTS-IKRAN meliputi:

1. Efisiensi dan Kecepatan Proses. Pemangkasan waktu penerbitan sertifikat dan izin stasiun radio, baik bagi amatir radio maupun nelayan.
2. Transparansi dan Objektivitas. Hasil ujian UNAR dapat diketahui secara real-time oleh peserta, meniadakan praktik percaloan dan subjektivitas penilai.
3. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Peserta. Meningkatnya animo masyarakat dalam mengikuti UNAR dan kesadaran nelayan untuk mengurus legalitas radio (IKRAN) akibat kemudahan akses layanan.
4. Penurunan Tingkat Gangguan Frekuensi. Berkurangnya laporan gangguan (interference) pada frekuensi penerbangan yang disebabkan oleh penggunaan radio nelayan yang tidak standar, sebagai dampak positif dari edukasi MOTS-IKRAN.

Meskipun sistem CAT dan program jemput bola MOTS-IKRAN memiliki banyak keunggulan, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target belum sepenuhnya tercapai secara optimal, antara lain Kendala Teknis dan Infrastruktur: Keterbatasan jaringan internet dan perangkat komputer di wilayah-wilayah terpencil di sekitar Ternate seringkali menghambat pelaksanaan UNAR berbasis CAT maupun akses aplikasi perizinan online (e-Licensing) di lokasi kegiatan.

e. Dampak

Penyelenggaraan sertifikasi yang optimal oleh Loka Monitor SFR Ternate memberikan dampak signifikan terhadap legalitas dan keselamatan komunikasi di wilayah Maluku Utara:

1. Peningkatan Kompetensi dan Modernisasi Pelayanan Publik: Implementasi Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) menciptakan sistem kelulusan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini menghasilkan operator amatir radio di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya yang lebih kompeten, memahami regulasi, serta mampu menggunakan perangkat radio secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan gangguan bagi pengguna frekuensi lainnya.
2. Penguatan Keselamatan Pelayaran bagi Nelayan: Melalui sertifikasi operator radio (SRC/LRC) dan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN), para nelayan lokal kini memiliki legalitas resmi dan keterampilan teknis yang sah. Dampak langsungnya adalah meningkatnya standar keselamatan di laut, di mana para nelayan mampu mengoperasikan perangkat radio komunikasi secara benar dalam keadaan darurat (distress) untuk koordinasi penyelamatan yang lebih cepat.
3. Peningkatan Kepatuhan Hukum dan Ketertiban Spektrum: Dengan memfasilitasi kemudahan akses sertifikasi bagi masyarakat, jumlah operator ilegal dapat ditekan secara signifikan. Hal ini berdampak pada terciptanya ekosistem penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, terorganisir, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kerja Loka Monitor SFR Ternate.
4. Optimalisasi Kepercayaan Publik terhadap Instansi: Keberhasilan mencapai target sesuai Perjanjian Kinerja (PK) mencerminkan komitmen kuat Loka Monitor dalam memberikan pelayanan prima. Dampaknya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan komunikasi masyarakat, baik untuk hobi (amatir radio) maupun untuk kebutuhan komersial.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan MOTS-IKRAN berbasis Computer Assisted Test (CAT), evaluasi terhadap laporan kinerja sebelumnya menjadi dasar utama dalam merancang langkah perbaikan. Berdasarkan laporan kinerja sebelumnya, teridentifikasi beberapa kendala utama yang mempengaruhi capaian kinerja. Pada penyelenggaraan UNAR, ditemukan bahwa keterbatasan akses ujian berbasis CAT di beberapa daerah menjadi hambatan yang mempengaruhi

persentase partisipasi peserta. Selain itu, masih terdapat peserta yang mengalami kendala teknis karena belum terbiasa menggunakan perangkat komputer. Pada penyelenggaraan layanan SRC/LRC dan IKRAN, umpan balik menunjukkan adanya kesulitan peserta dalam mengikuti pelatihan akibat keterbatasan waktu, serta munculnya hambatan koordinasi antara pihak penyelenggara dengan peserta.

g. Efisiensi

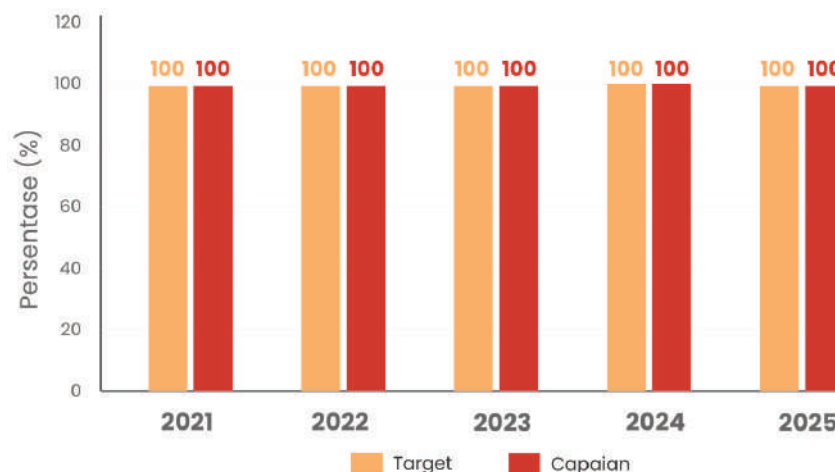
1. Menyediakan pendaftaran online untuk memudahkan peserta dalam mengakses informasi dan memilih jadwal ujian sesuai ketersediaan.
2. Menggunakan sistem verifikasi otomatis untuk validasi data peserta agar lebih cepat dan akurat.
3. Menyediakan helpdesk digital dan chatbot untuk menjawab pertanyaan peserta terkait ujian secara cepat dan efisien.
4. Menyediakan aksesibilitas bagi peserta disabilitas, seperti fitur text-to-speech atau mode high contrast untuk peserta dengan gangguan penglihatan.
5. Menggunakan feedback dari peserta untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam sistem ujian digital.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

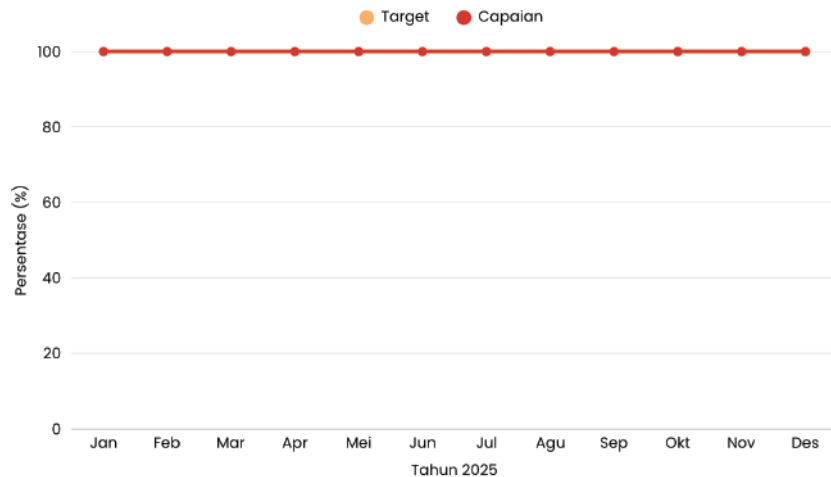
Dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT, Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :

1. Sebagai penyelenggara Sertifikasi Operator Radio, Loka Monitor SFR Ternate Berorientasi pada pelayanan yang prima. Setiap petugas, baik yang terlibat dalam pendaftaran, teknis ujian, maupun pengumuman hasil ujiandan bimbingan Teknis selalu berusaha memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan informatif.
2. Panitia penyelenggara Sertifikasi Operator Radio maupun pengawas selalu mempertahankan Akuntabilitasnya. Semua tahapan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil ujian dan Bimbingan Teknis dijalankan dengan sistem yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Setiap keputusan yang diambil dalam proses ujian dan sertifikasi SRC/LRC, IKRAN dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta dan publik.
3. Panitia maupun pengawas Sertifikasi Operator Radio selalu meningkatkan Kompetensi yang mumpuni dalam mengelola pelaksanaan UNAR, Bimtek SRC/LRC, IKRAN. Oleh karena itu, setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus menambah pengetahuan dalam pelaksanaannya.
4. Kerjasama yang Harmonis antar panitia pelaksana dan selalu merangkul setiap peserta tanpa memandang latar belakang usia, pendidikan maupun profesi peserta Sertifikasi Operator Radio.
5. Sebagai penyelenggara Sertifikasi Operator Radio, Loka Monitor SFR Ternate mengedepankan Loyalitas terhadap instansi dan memegang teguh pakta integritas dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
6. Adaptif terhadap penyediaan pelatihan dan bimbingan kepada peserta tentang penggunaan sistem ujian CAT UNAR, Bimtek SRC/LRC, IKRAN menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap kebutuhan peserta yang mungkin belum familiar dengan ujian berbasis computer dan juga perangkat komunikasi lainnya.
7. Kolaborasi yang sinergis memperkuat kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam ujian negara amatir radio berbasis CAT, Bimtek SRC/LRC, IKRAN untuk memastikan bahwa ujian dan Bimtek Pdpapat terlaksana dengan lancar.

9. Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja :

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengamankan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mengelola keuangan negara secara efektif. Piutang yang tidak tertagih dapat mengganggu optimalisasi pendapatan negara, sehingga diperlukan langkah pencegahan dan penanganan yang terstruktur. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, penanganan piutang—baik melalui penyelesaian mandiri maupun pelimpahan kepada KPKNL—dilaksanakan berdasarkan ketentuan di bawah ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 163/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Maksud dari kegiatan penanganan piutang dan koordinasi dengan KPKNL adalah untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pengurangan piutang negara. Dengan mekanisme monitoring, surat pemberitahuan, hingga kunjungan langsung, pemerintah dapat meminimalisir keterlambatan pembayaran dan memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Adapun tujuan dari pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio ini adalah:

1. Mencegah keterlambatan pembayaran oleh Wajib Bayar dan meminimalisir timbulnya Piutang Negara macet dari sektor PNBP Frekuensi Radio.
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar melalui monitoring status pembayaran, klarifikasi langsung, dan pengingat batas jatuh tempo.
3. Memberikan layanan asistensi dan konsultasi kepada Wajib Bayar terkait migrasi akun e-licensing dan informasi Izin Stasiun Radio (ISR) guna memperlancar kewajiban administrasi.
4. Menyelesaikan piutang macet dengan sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa barang jaminan melalui mekanisme penyelesaian mandiri sesuai regulasi yang berlaku.
5. Mempercepat proses penyelesaian piutang negara melalui koordinasi dan pendampingan dengan KPKNL setempat (seperti KPKNL Ternate) untuk pelimpahan piutang yang telah memasuki tahap penyampaian Surat Paksa, serta pengumpulan dokumen untuk penghapusan mutlak dan PPNT.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, dan penyelesaian tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah sasaran utama dalam kegiatan ini:

1. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring, pencegahan, dan penagihan awal PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk meminimalisir terjadinya piutang macet.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sebagai instansi mitra (khususnya di wilayah kerja Provinsi Maluku Utara) yang berwenang melakukan tindakan hukum dalam upaya penagihan

dan penyelesaian piutang negara macet yang telah dilimpahkan, termasuk penerbitan Surat Paksa hingga proses lelang jika diperlukan.

3. Wajib Bayar (Penanggung Hutang) Pengguna frekuensi radio (instansi, perusahaan, atau perorangan) diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio tepat waktu, atau mematuhi mekanisme penyelesaian yang telah ditentukan oleh KPKNL setelah dilakukan pelimpahan pengurusan.
 4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Pihak Hukum Terkait Pihak internal maupun eksternal yang terlibat dalam verifikasi dokumen untuk proses “Penghapusan Mutlak” atau “Piutang Penyelidikan Nihil Tanpa Opname (PPNTO)” guna memastikan tidak ada kendala hukum dan administratif dalam penghapusan catatan piutang dari laporan keuangan.
 5. Masyarakat dan Stakeholder Terkait Memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik mengenai pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal optimalisasi penerimaan negara dari sektor frekuensi radio.
- c. Capaian Target

Tabel Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%

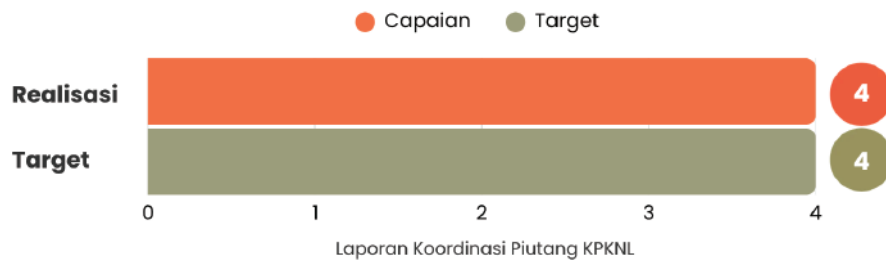
Capaian target kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa target utama yang ingin dicapai:

1. Tercapainya penyelesaian piutang negara (BHP Frekuensi Radio), baik melalui pelunasan langsung oleh Wajib Bayar, mekanisme angsuran, maupun penyelesaian melalui jalur hukum.
2. Terlaksananya koordinasi pelimpahan ke KPKNL dimana pada TA 2025 tidak terdapat Piutang Negara di atas Rp.8.000.000, meskipun demikian koordinasi dan sinergi antar pihak bisa menjadi acuan pencegahan piutang dimasa yang akan datang.
3. Tersesainya pengumpulan dokumen administratif untuk proses Penghapusan Mutlak dan Piutang Penyelidikan Nihil Tanpa Opname (PPNTO) bagi piutang yang telah memenuhi syarat kedaluwarsa atau subjek tidak ditemukan.
4. Terlaksananya kegiatan pencegahan piutang secara efektif melalui monitoring billing, penyampaian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) tepat waktu, dan asistensi kepatuhan Wajib Bayar.

Indikator kinerja penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio memiliki target realisasi sebesar 12 laporan dan pencegahan penanganan piutang ke KPKNL juga rutin dilaporkan sebanyak 4 kali (tiap triwulan) dalam 1 tahun. Dengan telah diterapkannya e-licensing dan penerapan tanda tangan digital dalam perizinan spektrum frekuensi radio maka client/pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki akun e-licensing akan menerima SPP BHP frekuensi radio dan ISR melalui email, sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat penyampaian SPP BHP tetap dilakukan penyampaian secara langsung agar dapat dilakukan koordinasi dan metode pembayaran, denda ataupun informasi lainnya, terkait penggunaan spektrum frekuensi radio.



Grafik Perbandingan percetakan dan penyampaian SPP, rincian tagihan, surat tagihan/surat peringatan



Grafik Capaian Koordinasi penanganan piutang ke KPKNL

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Inovasi dalam Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang negara, berbagai inovasi dapat diterapkan, antara lain:

1. Penggunaan aplikasi monitoring berbasis digital (seperti SIMS/Postel) yang memungkinkan pemantauan real-time atas status pembayaran BHP frekuensi radio oleh wajib bayar.
2. Integrasi data antara Loka Monitor sebagai instansi pemilik piutang dengan KPKNL dan unit keuangan pusat untuk mempermudah koordinasi dan validasi data piutang.
3. Peningkatan mekanisme Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi piutang macet sejak dini dengan memantau masa laku izin yang mendekati jatuh tempo.
4. Implementasi pendampingan konsultasi bagi debitur yang mengalami kesulitan administratif atau teknis dalam proses pembayaran, serta asistensi migrasi sistem perizinan.

Beberapa indikator keberhasilan dari implementasi strategi penanganan piutang ini meliputi:

1. Peningkatan Realisasi PNBP: Adanya kenaikan persentase pembayaran tepat waktu dari Wajib Bayar sehingga target PNBP Loka Monitor Ternate dapat tercapai atau melampaui target.
2. Penurunan Saldo Piutang Macet: Berkurangnya jumlah berkas piutang yang outstanding melalui mekanisme penagihan intensif maupun penyelesaian lewat KPKNL.
3. Validitas Data Piutang: Terwujudnya data piutang yang akurat dan up-to-date melalui kegiatan verifikasi lapangan, sehingga memudahkan proses administrasi penghapusan mutlak atau PPNTD.
4. Efektivitas Koordinasi: Terjalannya sinergi yang baik dengan KPKNL dalam mempercepat proses eksekusi piutang yang telah dilimpahkan.

Meskipun berbagai inovasi telah diterapkan, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target penyelesaian piutang belum sepenuhnya optimal, antara lain Kendala Keberadaan Subjek Pajak: Kesulitan dalam melacak keberadaan Wajib Bayar yang telah pindah alamat, badan usaha yang bubar, atau meninggal dunia tanpa melaporkan perubahan data.

e. Dampak

Implementasi sistem pemantauan yang terstruktur oleh Loka Monitor SFR Ternate memastikan bahwa setiap penyelenggara di wilayah Maluku Utara yang belum memenuhi kewajiban dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif maupun hukum yang tepat. Mengingat spektrum frekuensi radio merupakan aset negara dengan nilai ekonomi tinggi, penanganan piutang yang efektif menjamin pendapatan negara dari biaya penggunaan frekuensi (BHP) tetap terjaga secara optimal. Hal ini memberikan dampak jangka panjang berupa ketersediaan sumber daya finansial negara untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta penguatan fungsi pengawasan spektrum frekuensi yang lebih handal di seluruh wilayah kerja Loka Monitor SFR Ternate.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Laporan kinerja sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan dan kendala dalam Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio. Beberapa temuan utama meliputi:

1. Tingkat penyelesaian piutang yang masih di bawah target akibat kurangnya koordinasi yang efektif.
2. Dokumentasi administrasi pelimpahan yang belum optimal, menyebabkan keterlambatan proses.
3. Kurangnya kesadaran debitur dalam memenuhi kewajiban, mengakibatkan tingginya jumlah piutang macet.
4. Sistem informasi yang belum terintegrasi, menyulitkan pemantauan dan pelaporan status piutang

g. Efisiensi

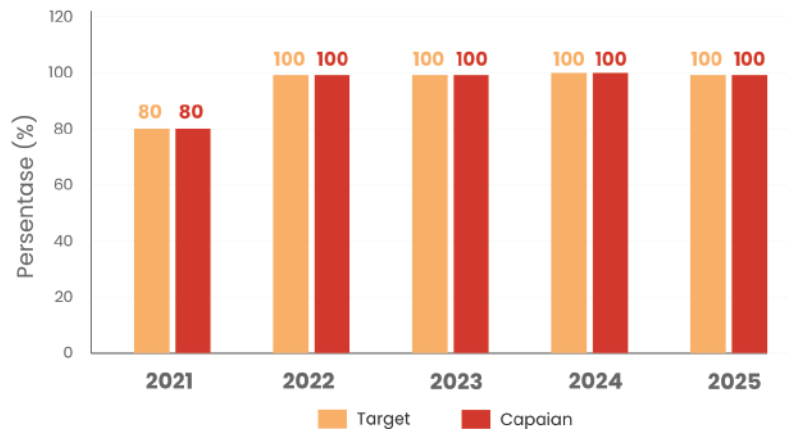
1. Mengelompokkan piutang berdasarkan status, umur piutang, dan kemungkinan penyelesaian.
2. Memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi dengan KPKNL.
3. Memberikan pemahaman terkait regulasi terbaru dalam pengelolaan piutang negara.

4. Meningkatkan upaya negosiasi dan mediasi sebelum pelimpahan ke KPKNL.
 5. Memberikan insentif atau kemudahan bagi debitur yang melakukan pelunasan lebih awal.
- h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

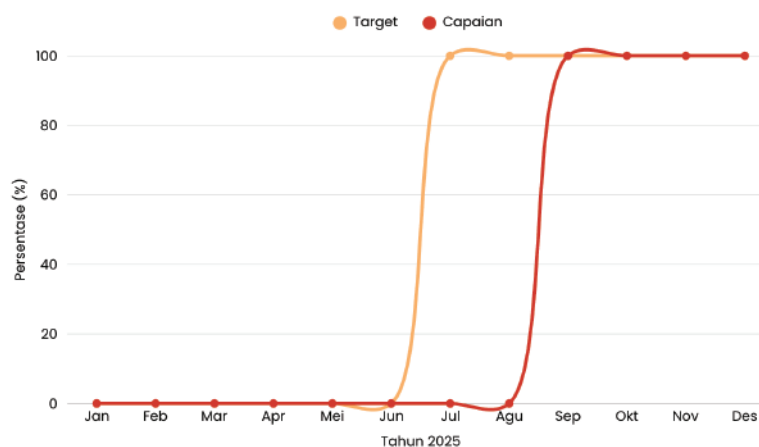
Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio, Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut:

1. Berorientasi pada pelayanan yang maksimal kepada masyarakat merupakan salah satu nilai mendasar yang dipegang teguh oleh setiap personel tim. Pelayanan yang ramah dan solutif selalu diberikan dalam setiap proses penanganan piutang.
2. Integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dengan penyajian data yang Akuntabel adalah bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang jujur dan efektif.
3. Petugas pelayanan berKompeten dalam memberikan pelayanan dalam penanganan piutang dengan kemampuan teknis dan administrasi yang baik, sehingga masyarakat memahami kewajibannya sebagai pengguna ISR yang patuh.
4. Harmonisasi dalam proses penanganan piutang di tengah masyarakat sangat diperlukan, khususnya pada saat memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat.
5. Salah satu bentuk Loyalitas tim pelaksana penanganan piutang dalam melaksanakan tugas, yaitu patuh terhadap SOP yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
6. Tim pelaksana penanganan piutang sangat Adaptif dalam menghadapi setiap proses yang sewaktu-waktu dapat berubah. Tim juga komunikatif dalam memberikan informasi yang mudah dipahami pengguna ISR.
7. Kolaboratif dengan berkoordinasi menggunakan berbagai media yang ada, membuat pihak/instansi terkait dapat menyelesaikan kewajiban untuk membayar BHP sebelum jatuh tempo dengan efisien.

10. Sosialisasi Pelayanan Publik



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pelayanan publik di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio harus diselenggarakan secara adil, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate berkomitmen untuk memenuhi hak-hak masyarakat melalui upaya perbaikan kualitas layanan dan pelibatan aktif masyarakat, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio dimaksudkan untuk:

1. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penggunaan spektrum frekuensi radio.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Izin Stasiun Radio (ISR) sebelum mengoperasikan perangkat.
3. Membangun komunikasi dua arah antara Loka Monitor Ternate dengan pengguna layanan guna menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi publik dalam menjaga ketertiban penggunaan frekuensi demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah:

1. Terwujudnya pengguna frekuensi radio yang legal, memiliki izin yang sah, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
2. Terciptanya lingkungan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, harmonis, dan tidak saling mengganggu (interference free).
3. Memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan transparan seiring dengan kemajuan teknologi.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Loka Monitor Ternate agar lebih tepat sasaran dan akuntabel.

b. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik bertujuan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan publik. Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Masyarakat Pengguna Layanan Publik
2. Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Layanan Publik
3. Badan Usaha
4. Pegawai atau Petugas Pelayanan Publik
5. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

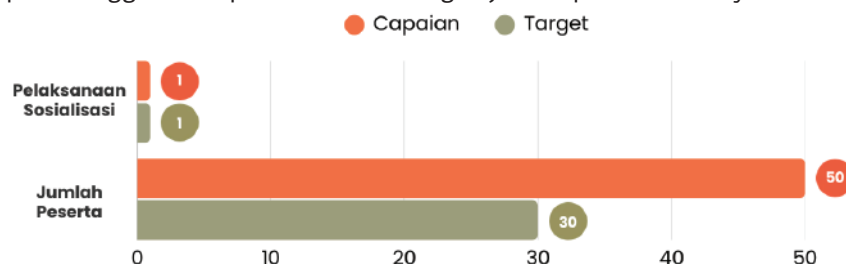
c. Capaian Target

Tabel Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memahami tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Publik, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Layanan Publik, Pengukuran dan Evaluasi Kualitas Layanan Publik, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Instansi Pemerintah, Penguatan Sinergi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan.

Pada tahun 2025 kegiatan sosialisasi pelayanan publik dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan tema “Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perizinan Serta Pengenaan Sanksi Denda Administratif”. Dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang.



Grafik Capaian pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini, beberapa inovasi telah diterapkan, antara lain:

1. Penggunaan platform digital untuk pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), seperti Google Forms, aplikasi mobile, dan portal layanan publik.
2. Penyediaan QR Code di kantor layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses survei kepuasan langsung setelah menerima layanan.
3. Pembuatan infografis dan video edukatif mengenai prosedur layanan publik yang mudah dipahami oleh masyarakat.
4. Kombinasi metode survei offline (tatap muka) dan online (melalui aplikasi dan website) untuk menjangkau lebih banyak responden.

Dari implementasi inovasi di atas, beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan ini meliputi: Peningkatan Jangkauan dan Partisipasi Masyarakat, Perbaikan dalam Penyediaan Layanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik.

e. Dampak

Melalui kegiatan sosialisasi yang intensif, masyarakat di wilayah Maluku Utara kini mendapatkan akses informasi yang lebih transparan terkait prosedur administrasi, kanal pengaduan, serta layanan teknis yang tersedia di Loka Monitor SFR Ternate. Hal ini memudahkan para pengguna frekuensi dalam mengakses layanan secara efektif sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat menjadi instrumen krusial bagi Loka Monitor SFR Ternate untuk mengevaluasi kinerja layanan secara objektif berdasarkan pengalaman pengguna di lapangan. Data yang diperoleh menjadi fondasi utama dalam perbaikan kebijakan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta pengembangan inovasi layanan yang lebih responsif terhadap karakteristik kebutuhan lokal. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan, tercipta sinergi di mana masyarakat menjadi lebih proaktif dalam melaporkan gangguan frekuensi atau penggunaan perangkat ilegal. Partisipasi aktif ini secara langsung memperkuat sistem pengawasan kewilayahan dan mempermudah tindakan penegakan hukum demi ruang udara yang tertib dan aman.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik tidak hanya berhenti pada pelaksanaan semata, tetapi juga memerlukan evaluasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Hasil laporan kinerja sebelumnya menjadi acuan penting dalam meningkatkan efektivitas program ini.

g. Efisiensi

1. Menggunakan media sosial, website resmi, dan aplikasi layanan publik untuk menyebarluaskan informasi secara cepat dan luas.
2. Menggunakan chatbot atau AI untuk menjawab pertanyaan umum masyarakat secara otomatis.
3. Membuat materi sosialisasi yang lebih ringkas, visual, dan mudah dipahami (infografis, video pendek, FAQ interaktif).
4. Menempatkan survei kepuasan di titik layanan publik seperti kantor pelayanan, aplikasi layanan, atau email follow-up setelah pelayanan.
5. Melaksanakan sosialisasi dalam momen atau acara yang sudah ada (misalnya program pemerintah lainnya) untuk menghemat biaya dan tenaga kerja.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

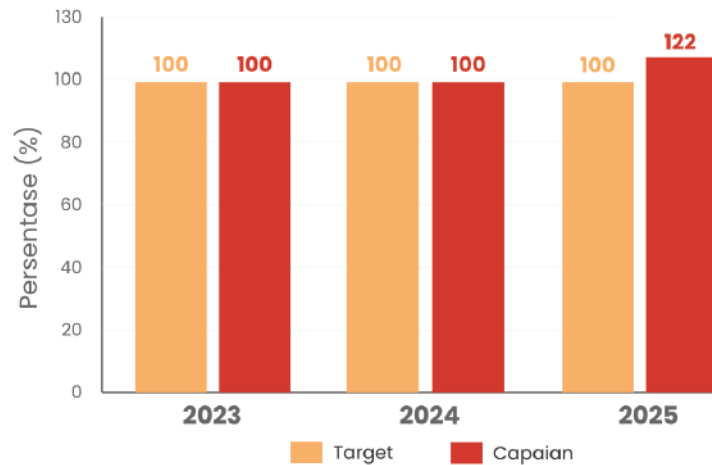
Dalam pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik, Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :

1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat merupakan salah satu core value ASN, yaitu Berorientasi pelayanan. Dalam mewujudkan komitmen ini, kami berupaya menyajikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang kami berikan.
2. Bertanggungjawab, jujur, disiplin dan solutif menjadi komitmen kami dalam mengabdikan sebagai ASN yang Akuntabel.
3. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik, panitia memilih narasumber yang Kompeten kompeten di bidangnya.
4. Harmonisasi dalam Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat sangat diperlukan dalam keterlibatan aktif dari stakeholder, khususnya pada saat kegiatan maupun pengisian survei.
5. Tidak hanya petugas pelayanan, seluruh pegawai Loka Monitor SFR Ternate menjunjung tinggi integritas instansi sebagai bentuk Loyalitas kami terhadap bangsa dan negara.
6. Panitia pelaksana kegiatan sosialisasi Adaptif terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menjadi dasar dalam pengambilan tema dan garis besar materi yang perlu

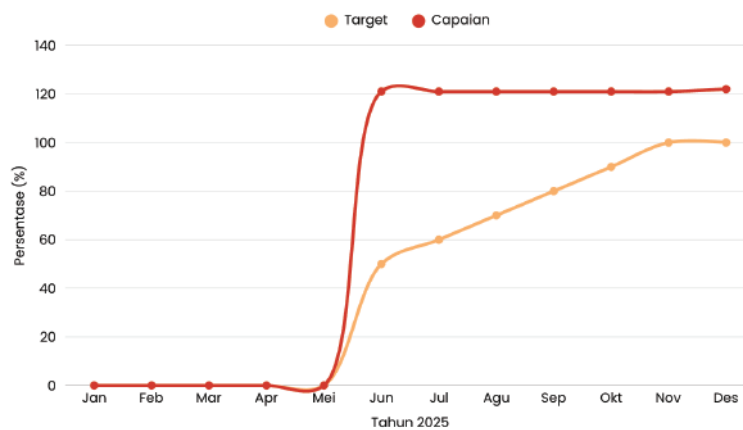
disosialisasikan kepada khalayak ramai.

7. Dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, panitia selalu melakukan Kolaborasi yang aktif dengan tim dan juga dengan narasumber yang akan membawakan materi sosialisasi.

11. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate pada tahun 2025 mencapai 122% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang operasi sumber daya, khususnya perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator, menuntut adanya prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Pelibatan masyarakat dalam proses ini menjadi aspek krusial untuk menjamin pembangunan berkelanjutan serta memastikan kebijakan pelayanan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan sebagai instrumen utama untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang menjadi landasan dalam menangkap aspirasi serta penilaian objektif dari masyarakat guna menghadapi dinamika kemajuan teknologi dan tuntutan pelayanan yang terus berkembang.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai tingkat kepuasan masyarakat melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), sebagai cerminan nyata kinerja penyelenggara dalam memberikan layanan perizinan dan sertifikasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Mengukur secara kuantitatif dan kualitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bahan evaluasi kinerja.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan demi perbaikan kualitas layanan.
4. Menyusun langkah perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna mewujudkan pelayanan prima.
5. Memastikan terpenuhinya harapan dan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas sesuai regulasi yang berlaku.

b. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kinerja pelayanan melalui umpan balik objektif dari pengguna layanan. Sasaran kegiatan ini meliputi:

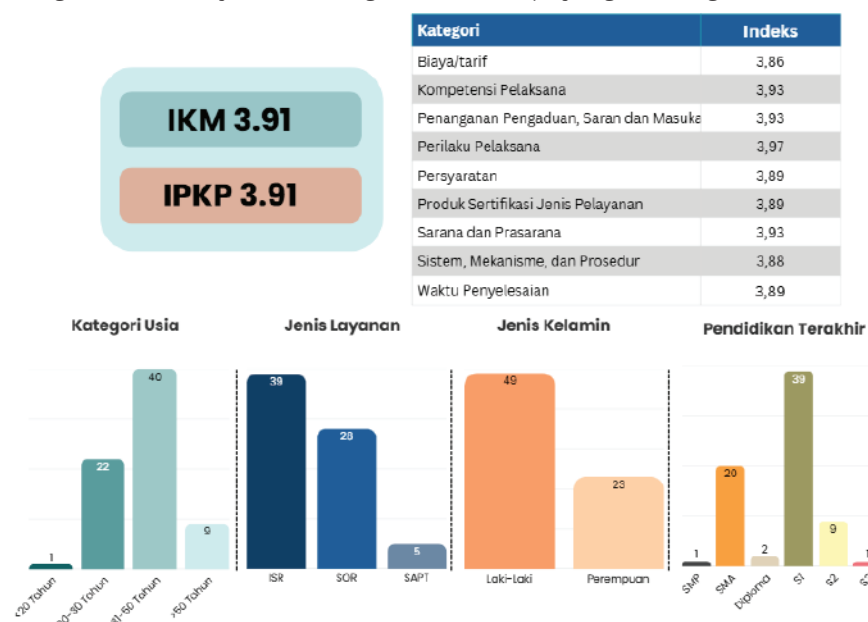
1. Masyarakat Penerima Layanan (Responden) Mencakup pengguna layanan perizinan spektrum frekuensi radio (ISR), peserta sertifikasi operator (UNAR/REOR), serta masyarakat yang menyampaikan pengaduan gangguan frekuensi.
2. Unit Penyelenggara Pelayanan (Loka Monitor Ternate) Sebagai pihak yang dievaluasi kinerjanya untuk mengidentifikasi area perbaikan dan meningkatkan standar kualitas pelayanan prima.
3. Pemerintah Pusat dan Regulator Sebagai bahan masukan strategis bagi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dalam menyusun kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik nasional.
4. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Terkait Termasuk asosiasi, badan usaha, dan organisasi pengguna frekuensi radio yang berkepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Capaian Target

Tabel Capaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IIPP)	100%	122%

Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Publik (IKM/IPKP) dengan minimal 1 kali pelaksanaan survei, jumlah responden 72 dari target 30 responden dan 3.91 dari target 3.2 (skala 4). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan Loka Monitor SFR Ternate menunjukkan kategori Mutu Pelayanan A, dengan mutu kinerja yang terkategori SANGAT BAIK.

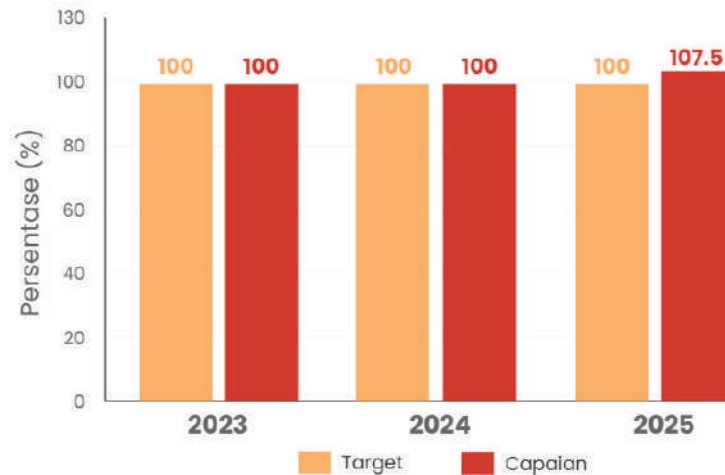


Grafik Hasil Survei IKM/IPKP Loka Monitor SFR Ternate

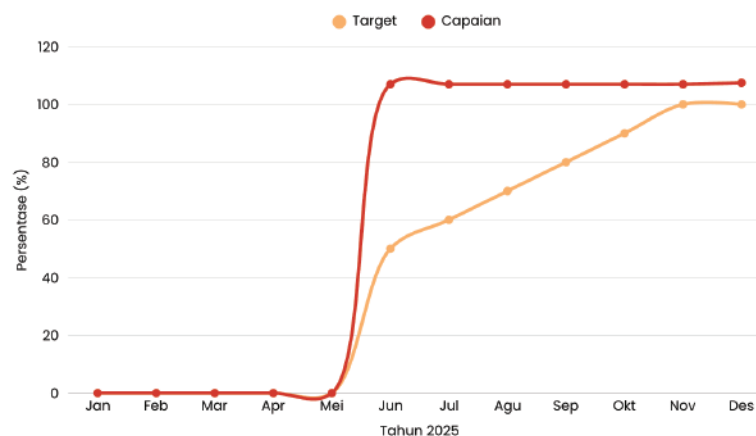
- d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian
Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini, beberapa inovasi telah diterapkan, antara lain:
1. Penerapan e-Survei berbasis QR Code yang ditempatkan di setiap loket pelayanan dan ruang tunggu, memungkinkan pengguna layanan mengisi kuesioner secara cepat melalui smartphone sesaat setelah menerima layanan.
 2. Pemanfaatan WhatsApp Blast untuk mengirimkan tautan survei kepada pengguna layanan (ISR/ UNAR) yang belum sempat mengisi survei di kantor, guna meningkatkan tingkat partisipasi responden (response rate).
 3. Penyediaan Real-time Dashboard IKM di ruang pelayanan publik sebagai bentuk transparansi, sehingga masyarakat dapat melihat langsung tren nilai kepuasan layanan saat itu juga.
 4. Pemberian Reward Sederhana (seperti suvenir atau stiker edukasi) bagi responden yang telah menyelesaikan pengisian survei sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
- e. Dampak
Penerapan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP) oleh Loka Monitor SFR Ternate memiliki dampak strategis sebagai instrumen evaluasi mandiri dalam mengukur kualitas pelayanan frekuensi radio di wilayah Maluku Utara. Hasil survei ini memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan serta membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu diperbaiki dalam prosedur birokrasi maupun teknis lapangan.
Bagi instansi, capaian ini mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Sementara bagi masyarakat dan pelaku usaha pengguna frekuensi, survei ini menjadi sarana penyampaian aspirasi yang berujung pada penyediaan layanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Secara keseluruhan, data yang diperoleh melalui IKM/IPKP digunakan oleh Loka Monitor SFR Ternate sebagai landasan perumusan kebijakan internal dan akselerasi reformasi birokrasi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
- f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan
Dalam upaya peningkatan Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP), Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kualitas layanan yang disediakan. Bentuk perbaikan yang telah dikembangkan diantaranya adalah penyediaan saluran layanan konsultasi berbasis digital (WhatsApp Center) yang responsif, guna mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi, melakukan konsultasi, menyampaikan pengaduan, maupun mendapatkan asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio.
Selain itu, kegiatan sosialisasi dan publikasi informasi layanan terbaru dilakukan secara rutin, berkala, dan aktual, baik secara tatap muka (offline), melalui media elektronik, maupun secara daring (online) melalui kanal media sosial resmi Loka Monitor Ternate.
- g. Efisiensi Sumber Daya
Survei kualitas pelayanan publik dilakukan secara mandiri oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana survei kualitas pelayanan publik ini terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPNPN, di lingkungan Loka Monitor Ternate.
Dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan, Loka Monitor Ternate menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang disesuaikan dengan indeks yang akan diukur, yaitu kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).
Dalam pelaksanaannya, pengisian kuesioner pengukuran kualitas pelayanan publik ini dilakukan secara mandiri dan online melalui tautan *) atau melalui pemindaian barcode yang dikirimkan kepada pengguna layanan melalui email maupun media komunikasi lainnya, seperti WhatsApp.
- h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini
Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP), Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut:
1. Hasil SKM/IPKP mencerminkan mutu kualitas layanan yang diberikan. Sebagai wujud Berorientasi Pelayanan, kami berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan prima serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan demi tercapainya kepuasan masyarakat.
 2. Peningkatan integritas petugas pelayanan dilakukan secara konsisten sebagai bentuk sikap Akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen tidak menerima imbalan apapun, serta bekerja secara jujur, cermat, disiplin, dan bertanggung jawab.
 3. Dalam memberikan layanan yang berkualitas, Loka Monitor SFR Ternate senantiasa meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme petugas melalui pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis agar selalu siap melayani kebutuhan masyarakat.
 4. Terciptanya lingkungan kerja yang Harmonis sangat diutamakan. Hal ini terlihat dari kepekaan petugas layanan dalam membangun kerjasama, sikap saling peduli, tolong-menolong, dan saling menghargai perbedaan.
 5. Petugas layanan memiliki dedikasi tinggi dan sikap Loyal dengan senantiasa menjaga nama baik

- pimpinan dan instansi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dalam setiap tugasnya.
6. Petugas layanan selalu Adaptif terhadap perubahan organisasi dan perkembangan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan yang prima.
 7. Petugas layanan mampu membangun kerjasama yang Kolaboratif dan bersinergi, baik secara internal tim maupun dengan pihak eksternal, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

12. Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate pada tahun 2025 mencapai 107.5% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, khususnya untuk izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR), Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate diwajibkan untuk melaksanakannya secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, yang mewajibkan penyelenggara pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelibatan masyarakat ini menjadi aspek krusial dalam menjamin pembangunan berkelanjutan serta mendorong kebijakan pelayanan yang lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat serta merespons tuntutan kemajuan teknologi, diperlukan upaya perbaikan kualitas pelayanan yang berkelanjutan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan Loka Monitor Ternate adalah melaksanakan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat serta persepsi integritas dalam penyelenggaraan layanan. Hasil survei ini akan

digunakan sebagai bahan evaluasi komprehensif bagi penyelenggara untuk terus melakukan perbaikan demi tercapainya pelayanan prima. Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran data yang akurat mengenai tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap integritas layanan publik.
2. Menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi Loka Monitor Ternate dalam memperbaiki kelemahan sistem pelayanan.
3. Mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) agar kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.
4. Memastikan harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi dengan baik.
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan melayani.

b. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur kejujuran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Masyarakat Pengguna Layanan (Responden) Mencakup pengguna layanan perizinan (ISR), peserta sertifikasi (UNAR/REOR), dan mitra kerja yang dimintai persepsinya mengenai perilaku koruptif, diskriminasi, serta transparansi biaya layanan yang mereka alami.
2. Unit Penyelenggara Pelayanan (Loka Monitor Ternate) Sebagai unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas (ZI), hasil survei ini menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan korupsi internal dan kesiapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Kementerian PANRB dan Regulator Pusat Sebagai bahan evaluasi nasional dalam menilai Indeks Reformasi Birokrasi dan efektivitas implementasi budaya anti-korupsi di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).
4. Ekosistem Sektor Telekomunikasi dan Penyiaran Termasuk pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat umum, yang membutuhkan jaminan kepastian hukum dan iklim pelayanan yang bersih dari praktik percaloan, pungli, dan gratifikasi.

c. Capaian Target

Tabel Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

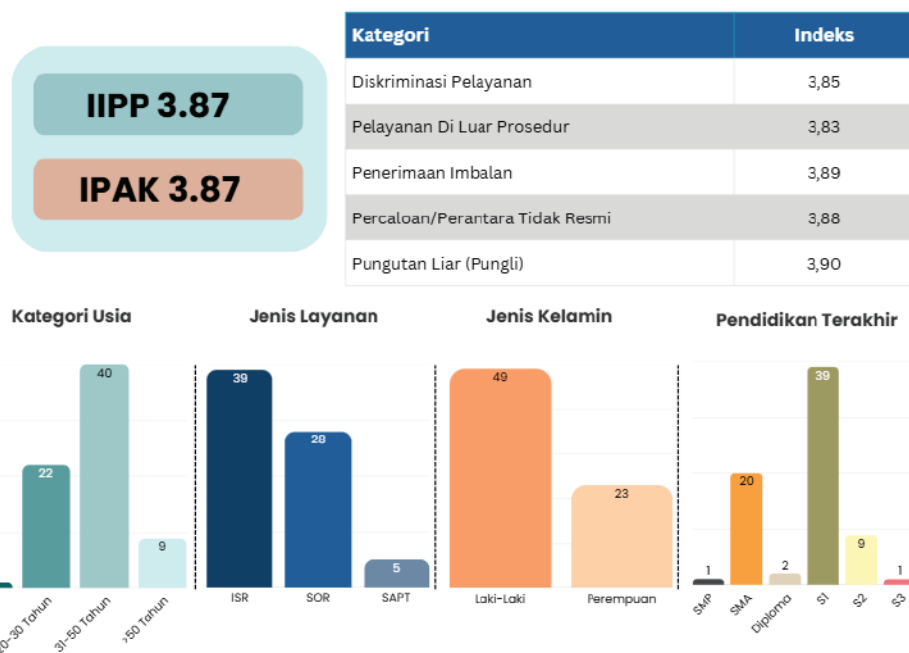
Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	107.5%

Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Publik (IIPP/IPAK) dengan minimal 1 kali pelaksanaan survei, jumlah responden minimal 30 responden dan 3,6 (skala 4).

Nilai Indeks Kepuasan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan yang dilakukan Loka Monitor SFR Ternate adalah sebesar 3,87 (skala 4).



Kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



Grafik Hasil Survei IIPP/IPAK Loka Monitor SFR Ternate

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini, beberapa inovasi telah diterapkan, antara lain:

1. Integrasi Survei dengan Kampanye Public Campaign Tolak Gratifikasi secara digital, di mana sebelum mengisi survei, responden disuguhi video singkat atau infografis komitmen anti-korupsi Loka Monitor untuk membangun kepercayaan..
2. Penerapan Fitur Anonymous Feedback yang menjamin kerahasiaan penuh identitas responden, sehingga pengguna layanan merasa aman dan tidak takut memberikan penilaian buruk jika menemukan indikasi kecurangan.
3. Pemanfaatan Saluran Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi pada tautan akhir survei, memberikan akses langsung bagi responden untuk melaporkan detail kejadian jika terindikasi adanya pungutan liar atau gratifikasi.
4. Edukasi “Biaya Resmi vs Pungli” yang disematkan pada kuesioner untuk meminimalisir kesalahpahaman responden dalam membedakan pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sah dengan pungutan liar.

e. Dampak

Capaian kinerja sebesar 107.5% dengan nilai indeks 3,87 pada survei IIPP/IPAK tahun 2025 memberikan dampak fundamental terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Loka Monitor SFR Ternate. Keberhasilan melampaui target responden dan nilai standar ini membuktikan adanya kepercayaan publik yang tinggi serta pengakuan nyata atas integritas aparatur dalam memberikan layanan perizinan ISR dan sertifikasi operator radio tanpa praktik pungli, gratifikasi, maupun percaloan. Dampak strategisnya, hasil ini menjadi fondasi kuat bagi Loka Monitor Ternate dalam akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sekaligus menjamin kepastian hukum dan transparansi biaya bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Maluku Utara. Dengan data evaluasi yang objektif ini, instansi dapat terus melakukan perbaikan layanan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna sesuai dengan standar reformasi birokrasi nasional.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Dalam upaya peningkatan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan atas pelayanan yang disediakan. Langkah perbaikan strategis yang telah dikembangkan di antaranya adalah optimalisasi penyediaan layanan konsultasi berbasis digital (WhatsApp Center) yang responsif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi, melakukan konsultasi, menyampaikan pengaduan, ataupun mendapatkan asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio tanpa harus bertemu secara tatap muka (contactless) dengan petugas, sehingga meminimalisir potensi terjadinya praktik gratifikasi atau pungutan liar.

g. Efisiensi Sumber Daya

Survei kualitas pelayanan publik dilakukan secara mandiri oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei kualitas pelayanan publik adalah ASN (terdiri dari PNS dan atau PPNN) di lingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate.

Dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang disesuaikan dengan indeks yang akan diukur, yaitu kuesioner Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Dalam pelaksanaannya, pengisian kuesioner pengukuran kualitas pelayanan publik ini dilakukan secara mandiri dan online melalui tautan *) atau melalui pemindaian barcode yang dikirimkan kepada pengguna layanan melalui email maupun media komunikasi lainnya, seperti WhatsApp.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

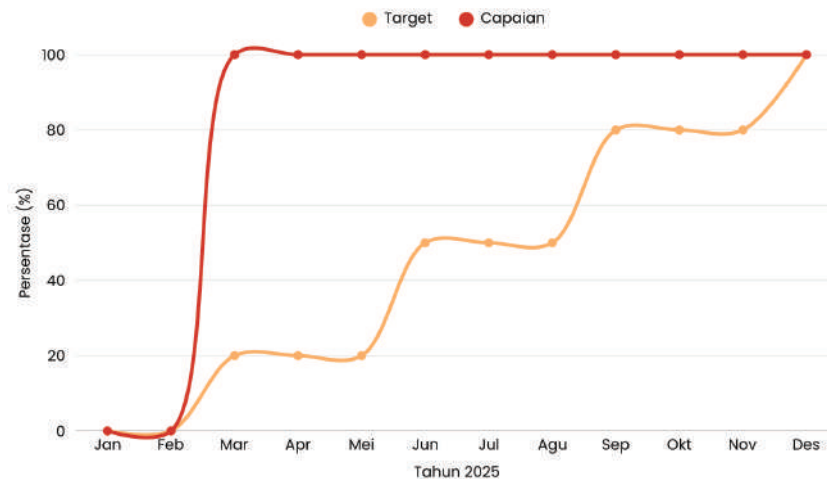
Dalam pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat merupakan salah satu core value ASN, yaitu Berorientasi pelayanan. Dalam mewujudkan komitmen ini, kami menjadikan hasil IIPP/IPAK sebagai cerminan mutu layanan untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi kepuasan masyarakat.
2. Bertanggungjawab, jujur, disiplin dan berintegritas tinggi dengan tidak menerima imbalan apapun menjadi komitmen kami dalam mengabdikan sebagai ASN yang Akuntabel.
3. Dalam memberikan layanan yang berkualitas, Loka Monitor SFR Ternate senantiasa meningkatkan kemampuan petugas agar menjadi SDM yang Kompeten melalui pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis yang berkelanjutan.
4. Harmonisasi lingkungan kerja yang kondusif sangat diperlukan, hal ini terlihat pada kepekaan petugas layanan dalam membangun sikap saling bekerjasama, peduli, tolong-menolong serta saling menghargai perbedaan.
5. Tidak hanya petugas pelayanan, seluruh pegawai Loka Monitor SFR Ternate memiliki dedikasi tinggi dan menjunjung tinggi nama baik instansi sebagai bentuk Loyalitas kami terhadap bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
6. Petugas layanan senantiasa Adaptif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan perkembangan teknologi, serta terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan yang prima.
7. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan, kami selalu melakukan Kolaborasi yang aktif dan bersinergi, baik dengan pihak internal maupun eksternal demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

13. Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)



Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Ternate pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Verifikasi data koordinat site merupakan langkah krusial dalam memastikan akurasi dan konsistensi informasi geografis yang menjadi dasar sistem informasi manajemen spektrum frekuensi. Untuk memastikan validitas data teknis stasiun radio yang berizin dan meminimalisir risiko operasional, diperlukan verifikasi faktual terhadap data koordinat site Izin Stasiun Radio (ISR).

Beberapa alasan utama kegiatan verifikasi ini dilakukan:

1. Validitas Informasi Geografis – Memastikan bahwa data koordinat yang tercatat dalam sistem sesuai dengan lokasi fisik sebenarnya di lapangan.
2. Pencegahan Kesalahan Keputusan – Data lokasi yang tidak akurat dapat memicu kesalahan dalam analisis teknis dan pengalokasian sumber daya frekuensi.
3. Mitigasi Potensi Gangguan – Ketidaktepatan koordinat dapat menghambat identifikasi sumber gangguan yang berpotensi merugikan masyarakat dan penyelenggara.
4. Peningkatan Kualitas Data – Proses verifikasi terstruktur membantu mengurangi kesalahan data yang digunakan dalam perencanaan operasional.

Maksud Kegiatan Verifikasi Data Koordinat Site Izin Stasiun Radio (ISR) bermaksud untuk mengukur tingkat keakuratan dan validitas data koordinat yang dimiliki oleh setiap site, serta memastikan tanggung jawab operasional pemilik izin terhadap kesesuaian data yang dilaporkan.

Tujuan Kegiatan Yaitu Memastikan Kesesuaian Data, Mengecek apakah koordinat site sinkron dengan posisi geografis sesungguhnya di lapangan, Meminimalkan Risiko Kesalahan, Menjamin keputusan terkait pengelolaan spektrum frekuensi diambil berdasarkan data yang valid agar lebih tepat dan efektif, Meningkatkan Efisiensi Operasional, Memastikan proses pemetaan dan monitoring berjalan lebih efisien dan dapat diandalkan, serta Mendukung Perencanaan Infrastruktur yang akurat dan berbasis fakta.

Dengan adanya kegiatan verifikasi ini, diharapkan pengelolaan database ISR menjadi lebih berkualitas, akurat, dan dapat diandalkan untuk mendukung manajemen spektrum frekuensi radio yang tertib dan efisien.

b. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) bertujuan untuk memastikan keakuratan lokasi dan legalitas penggunaan frekuensi. Berikut adalah sasaran utama kegiatan ini:

1. Memastikan koordinat lokasi stasiun sesuai dengan dokumen perizinan.
2. Melakukan pengecekan ulang terhadap stasiun radio yang telah memiliki izin untuk memastikan tidak ada perubahan lokasi atau penyimpangan.
3. Mengidentifikasi keberadaan stasiun radio yang beroperasi tanpa izin guna penertiban dan pembinaan.

c. Capaian Target

Tabel Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

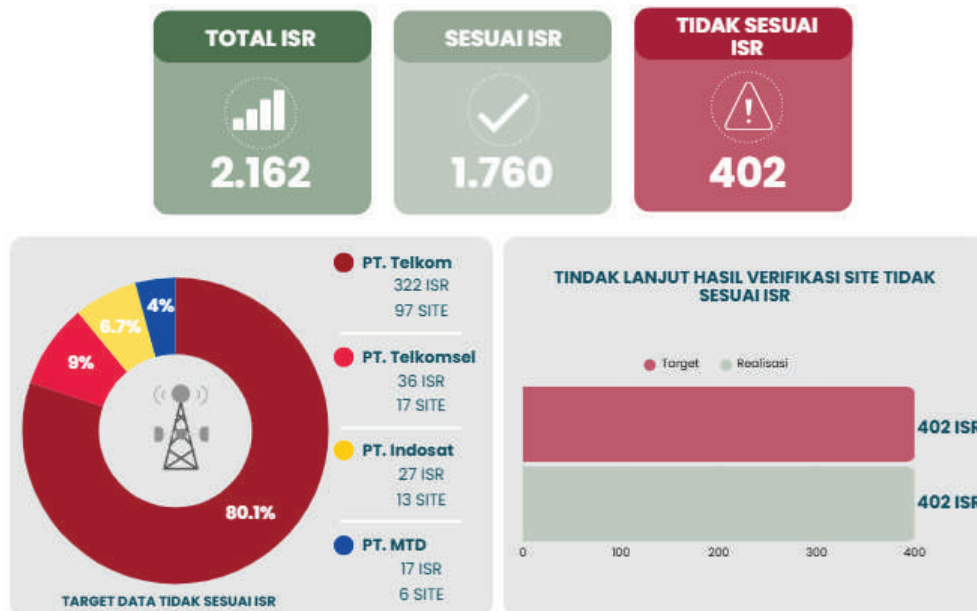
Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%

Kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data dan kepatuhan perizinan. Berikut adalah capaian target yang ingin dicapai:

1. Menurunnya Penolakan Pengajuan ISR
2. Menurunnya temua ketidaksesuaian data ISR oleh UPT (Data ISR Sesuai dengan data di lapangan)
3. Tersedianya referensi koordinat site ISR atau Master Data Referensi Site (MDRS)

Tahapan Pelaksanaan:

Kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) dilaksanakan dengan melakukan analisis hasil verifikasi koordinat site ISR tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan serta menetapkan data yang tidak sesuai sebagai target. Pemegang ISR menindaklanjuti temuan data koordinat site ISR yang tidak sesuai dan UPT bersama Direktorat Layanan Infradigi melakukan analisis dan monitoring tindaklanjut hasil temuan UPT berdasarkan SIMS terkini.



**Grafik Capaian Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR
Microwave Link (Prima Aksi) 2025**

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Untuk meningkatkan efektivitas verifikasi data koordinat stasiun radio, beberapa inovasi diterapkan, di antaranya:

1. Penggunaan GPS presisi tinggi untuk memastikan koordinat sesuai dengan yang tercantum dalam izin.
2. Pemanfaatan drone untuk survei udara guna memverifikasi lokasi dengan cepat dan akurat.
3. Integrasi data dengan sistem perizinan online agar memudahkan akses dan validasi lokasi.

Analisis Keberhasilan Kegiatan

1. Peningkatan Keakuratan Data Lokasi Mengurangi risiko kesalahan koordinat yang dapat menyebabkan gangguan frekuensi.
2. Efisiensi Waktu dan Biaya Verifikasi Proses verifikasi menjadi lebih cepat dengan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi survei.
3. Penguatan Pengawasan dan Koordinasi Antarinstansi dengan adanya sistem yang lebih transparan, sinkronisasi data antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait menjadi lebih baik.

Ketidaktercapaian

1. Terbatasnya Akses ke Wilayah Terpencil sehingga Infrastruktur komunikasi yang minim menyulitkan pengumpulan data koordinat secara real-time.
2. Keterbatasan jumlah petugas di lapangan menyebabkan beberapa lokasi belum terverifikasi secara optimal.
3. Perlu lebih banyak pendekatan edukatif dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan.

e. Dampak

Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link memberikan dampak strategis dalam penguatan infrastruktur digital di wilayah Maluku Utara. Dengan sinkronisasi data lapangan yang akurat, validitas perizinan ISR meningkat signifikan sehingga analisis teknis perizinan menjadi lebih presisi dan tepat sasaran. Dampak langsungnya adalah penurunan potensi interferensi frekuensi di wilayah kerja, karena setiap titik stasiun radio telah disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, verifikasi ini mendukung optimalisasi pengawasan spektrum frekuensi radio melalui standarisasi data koordinat dalam sistem Master Data Referensi Site (MDRS), yang pada akhirnya memperkuat kepastian hukum serta transparansi layanan perizinan bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi maupun regulator di daerah.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi), hasil evaluasi dari laporan kinerja sebelumnya telah digunakan sebagai dasar perbaikan. Berikut adalah tindak lanjut dan pemanfaatan data dari laporan sebelumnya:

1. Identifikasi Permasalahan dari Laporan Kinerja Sebelumnya
 - Ditemukan beberapa kasus di mana koordinat stasiun radio tidak sesuai dengan yang tercatat dalam izin.
 - Kesalahan input data, keterbatasan alat ukur, dan perubahan lokasi tanpa pembaruan izin.
2. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pemilik Stasiun Radio
 - Masih banyak pemilik stasiun radio yang tidak memahami pentingnya pembaruan dan verifikasi data koordinat.
3. Kendala Akses ke Wilayah Terpencil
 - Verifikasi di daerah terpencil sulit dilakukan karena minimnya infrastruktur komunikasi dan transportasi.

g. Efisiensi

1. Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk mengecek apakah lokasi sudah sesuai dengan regulasi dan tidak bertabrakan dengan site lain.
2. Memanfaatkan peta digital dan citra satelit untuk memverifikasi lokasi tanpa harus melakukan inspeksi fisik yang tidak perlu.
3. Mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan petugas lapangan mengunggah hasil verifikasi langsung ke sistem, sehingga data dapat dianalisis secara real-time.
4. Memberikan akses transparan kepada pemohon untuk mengecek progres permohonan secara online.
5. Menyediakan fitur laporan kendala teknis yang dapat dikirim oleh pemohon untuk mempercepat solusi jika ada kesalahan data.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

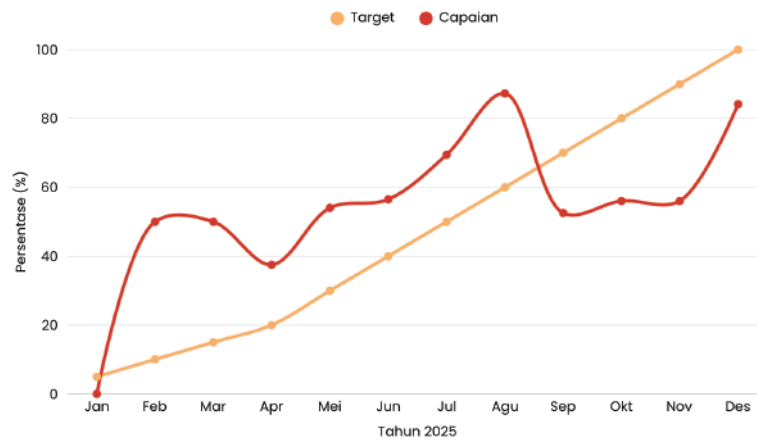
Dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi), Loka Monitor SFR Ternate menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :

1. Sebagai garda terdepan dalam pengawal keamanan dan ketertiban frekuensi di Nusantara yang notabene Berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat, Loka Monitor SFR Ternate mendedikasikan diri untuk menyajikan data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dalam penyajian data koordinat ISR, tentu saja Loka Monitor SFR Ternate menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan Akuntabilitasnya.
3. Tentu saja setiap personel yang bertugas memiliki Kompetensi yang cukup disetiap bidangnya.
4. Diskusi antar tim yang Harmonis menciptakan kerjasama yang baik dalam tim kerja.
5. Personel tim selalu Loyal terhadap aturan yang telah ditetapkan, sehingga setiap data yang diverifikasi berpatokan pada aturan yang ada.
6. Adaptif terhadap setiap pembaruan informasi dan selalu memperbarui data pada sistem, membuat data yang kami miliki selalu aktual.
7. Kolaboratif dalam segala lini mempermudah proses tim kerja dalam melakukan kegiatan Verifikasi Data Koordinat Site Izin Stasiun Radio (ISR).

SASARAN KINERJA 2

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien.”

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Ternate Tahun 2025



Grafik Perbandingan Target dan Capaian Bulanan

a. Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan

Loka Monitor SFR Ternate selaku UPT Ditjen Infrastruktur Digital bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Maluku Utara (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu).

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut, perlu dukungan Bagian Umum dan Rumah Tangga khususnya dalam hal keuangan, kepegawaian dan kerumah tanggaan.

Sasaran kinerja menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2025 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien dengan indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT Ternate Tahun 2025 sebesar 86,95. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital meliputi kualitas perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggran, dengan didukung oleh monitoring dan evaluasi sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien dengan indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT Ternate Tahun 2025 sebesar 86.95 Dengan Perhitungan sebagai berikut :

1. Capaian Nilai Kinerja SMART DJA (bobot 50%)
2. Nilai Kinerja IKPA (bobot 50%)

c. Capaian Target

Capaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital pada Loka Monitor SFR Ternate yaitu sebesar 84,17.



Gambar Capaian nilai kinerja anggaran Loka Monitor SFR Ternate TA 2025

Meskipun pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan baik dengan nilai IKPA di atas 89, nilai perencanaan anggaran yang belum optimal menyebabkan capaian akhir sebesar 84.17 belum memenuhi target 86.95. Perbaikan pada aspek sinkronisasi sistem perencanaan dan penyesuaian pencatatan kegiatan menjadi langkah strategis untuk peningkatan nilai kinerja anggaran pada tahun berikutnya.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) tahun 2025 ditetapkan target nilai sebesar 97 dan capaian berdasarkan perjanjian Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate sebesar 90.61 di tahun 2025. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan suatu parameter pencapaian pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, penilaian pelaksanaan anggaran terdiri dari beberapa parameter dan Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Indikator	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	a. Revisi DIPA b. Deviasi Halaman III DIPA	100 82,13	91.07
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	a. Penyerapan Anggaran b. Belanja Kontraktual c. Penyelesaian Tagihan d. Pengelolaan UP dan TUP	91,92 63,33 100 95.76	87.75
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	a. Capaian Output	100	100
			Nilai Total	91,61
4	Pengurangan (Dispensasi SPM)	a. Pengurangan (Dispensasi SPM)	1	1
			Nilai Akhir	90.61

Grafik Capaian Nilai IKPA TA. 2025

A. Analisa Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan dokumen **Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker Tahun 2025** untuk **Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate (Satker 694723)**, diperoleh nilai akhir IKPA sebesar **90,61** dengan kategori kinerja yang tergolong **baik**. Berikut analisis capaian kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan empat aspek utama:

a. Kualitas Perencanaan Anggaran

- Revisi DIPA
Nilai indikator Revisi DIPA mencapai **100,00** dengan bobot 10% sehingga menghasilkan nilai kontribusi sebesar **10,00**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan revisi anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik dan perubahan anggaran yang dilakukan tidak mempengaruhi kualitas perencanaan secara signifikan
- Deviasi Halaman 3 DIPA
Indikator Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai **82,13** dengan bobot 15% sehingga menghasilkan nilai aspek sebesar **12,32**. Nilai tersebut menunjukkan masih terdapat deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori baik
- Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran
Nilai aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar:
 $10,00 + 12,32 = 22,32$
Dari total bobot 25%, satker berhasil mencapai **91,07%** dari nilai maksimum aspek perencanaan.

b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran menggambarkan efektivitas dan kepatuhan satker dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan.

- Penyerapan Anggaran
Nilai penyerapan anggaran mencapai **91,92**, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan mendekati target yang direncanakan.

- Belanja Kontraktual
Indikator belanja kontraktual memperoleh nilai **63,33** dengan kontribusi sebesar **6,33**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian masih relatif rendah dibandingkan indikator lainnya dan menunjukkan masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga atau penyampaian dokumen pembayaran, keterlambatan disebabkan adanya kekeliruan dalam penyampaian data ADK kontrak ke KPPN karena adanya cut off DIPA kode satker yang baru.
- Penyelesaian Tagihan
Nilai penyelesaian tagihan sebesar 100 dengan kontribusi 10. Nilai ini menunjukkan penyelesaian tagihan sesuai dengan target dan tepat waktu.
- Pengelolaan UP dan TUP
Indikator pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan memperoleh nilai **95,76** dengan kontribusi sebesar **9,58**, yang menunjukkan pengelolaan kas satker telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan.
- Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 87,75

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan baik, meskipun aspek belanja kontraktual masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Kualitas hasil pelaksanaan anggaran menggambarkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan output sesuai target yang telah ditetapkan

- Capaian Output
Nilai capaian output sebesar **100** dengan kontribusi **25**. Hal ini menunjukkan bahwa target output kegiatan berhasil dicapai dengan baik.
- Nilai Aspek Hasil Pelaksanaan
Nilai aspek hasil pelaksanaan anggaran tercatat sebesar **100 poin**. Dengan bobot 25%, indikator ini memberikan kontribusi sebesar **25,00**, yang menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan telah mencapai kategori sangat baik.

d. Dispensasi SPM (Pengurangan)

Satker memperoleh pengurangan nilai akibat dispensasi SPM sebesar: **1,00 poin**

Pengurangan ini menunjukkan masih terdapat kondisi tertentu dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang memperoleh dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun nilainya relatif kecil, kondisi ini tetap menjadi perhatian agar ke depan seluruh pengajuan SPM dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

e. Nilai Akhir Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai akhir kinerja pelaksanaan anggaran terdiri atas Nilai Total Capaian sebesar 91,651 di kurang Dispensasi SPM 1 poin maka nilai yang didapatkan sebesar 90,61.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate memperoleh **Nilai Total sebesar 91,61** dengan pengurangan akibat dispensasi SPM sebesar **1,00 poin**, sehingga menghasilkan **Nilai Akhir IKPA sebesar 90,61**.

Secara umum, kinerja pelaksanaan anggaran satker berada pada kategori **sangat baik**. Aspek yang memperoleh capaian optimal meliputi revisi DIPA, pengelolaan UP/TUP, dan capaian output. Adapun indikator yang masih memerlukan perhatian adalah **deviasi Halaman III DIPA** serta **penyelesaian tagihan**, sehingga diperlukan peningkatan ketepatan perencanaan kas dan percepatan penyelesaian dokumen pembayaran guna meningkatkan nilai IKPA pada periode berikutnya

B. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate mengalami 2 (dua) kali pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi yaitu menindaklanjuti Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 dengan nilai blokir anggaran Rp1.832.030.000 dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan nilai blokir anggaran Rp1.399.506.000 sehingga total anggaran yang diblokir menjadi Rp3.231.536.000.

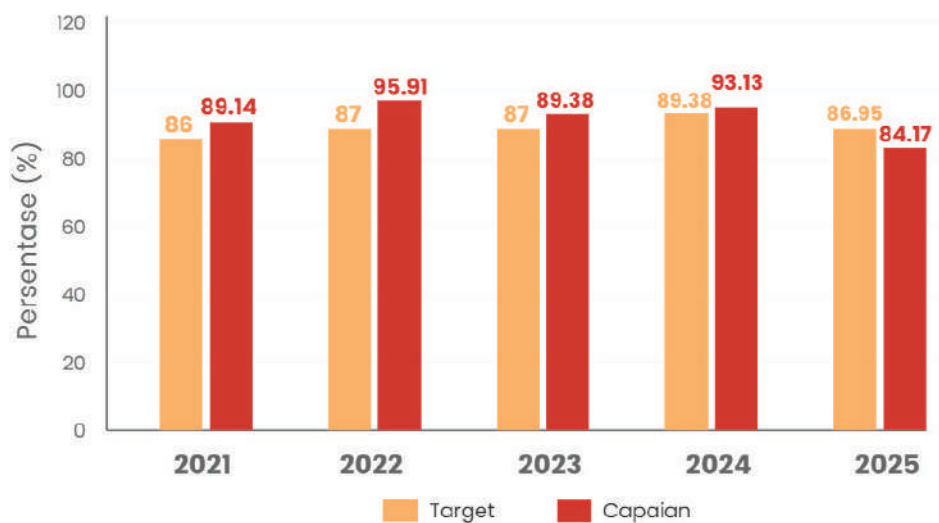
Sesuai dengan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 2937/DJID.1/KU.01.02/10/2025 tanggal 29 Oktober 2025 terkait Revisi Relaksasi Anggaran dilingkungan Ditjen Infrastruktur Digital TA 2025 dan pengesahan DIPA Revisi tanggal 20 November 2025 terdapat transfer pagu blokir sebesar Rp2.067.701.000 sehingga pagu blokir menjadi Rp1.163.835.000 dan nilai relaksasi anggaran sebesar Rp. 501.004.000,- yang terdiri atas relaksasi belanja perjalanan dinas Rp. 177.280.000,- non perjalanan dinas

sebesar Rp. 100.000.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 223.724.000,-

Dengan adanya efisiensi tersebut terdapat berdampak pada pelaksanaan kegiatan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate, antara lain sebagai berikut :

1. Pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yaitu koordinasi dan konsultasi, undangan pelaksanaan rapat dan pelatihan dari pusat dihadiri secara online. Untuk offline ditujukan untuk kegiatan yang bersifat strategis;
2. Untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan penyesuaian seperti pengurangan jumlah personel pelaksana perjalanan dinas.
3. Pengurangan jumlah peserta pada kegiatan seperti sosialisasi tatap muka, Bimtek SRC/LRC, UNAR, Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio;
4. Efisiensi dalam Operasional dan Pemeliharaan Kantor seperti pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2, operasional perkantoran dan pimpinan, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan kantor;

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Monitor Spektrum Radio Ternate, namun dengan beberapa penyesuaian dapat berhasil mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.



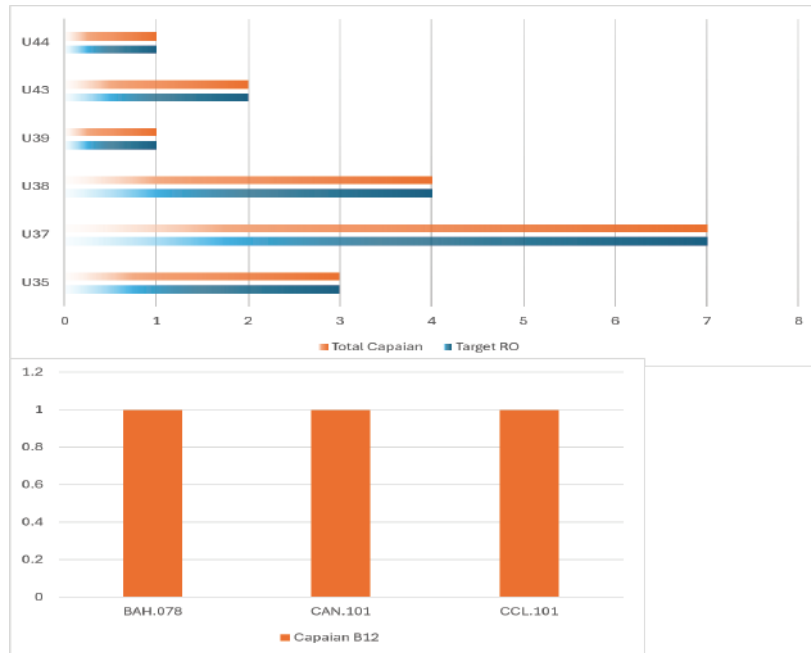
Grafik Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

C. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kinerja

Pelaporan pelaksanaan Realisasi Anggaran setiap bulannya dilakukan pengisian capaian berupa realisasi Anggaran dan realisasi Capaian Fisik yaitu pada aplikasi Emonev Bappenas, pelaporan LPJ bendahara dan capaian output. Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate terkait Perjajian Kinerja pada Unit Es I Ditjen Infrastruktur Digital, juga dilakukan pelaporan rutin setiap bulannya terhadap capaian Kinerja yang telah ditetapkan.

No	Kode Satker	Nama Satker	Dipa revisi Ke	Jumlah Output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			Validasi Capaian Output			% Data Masuk/ Upload
					Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	Data Valid	Data Tidak Valid	Jumlah	
1	694723	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate	6	12	12	0	12	12	0	12	100.00
Total				12	12	0	12	12	0	12	100

Grafik Rekap Kertas Kerja Capaian Output



Grafik Rekap Capaian Emonev Bappenas

D. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

1. Implementasi paperless office untuk mengurangi birokrasi berbasis dokumen fisik yang lambat dan boros anggaran.
2. Penerapan e-Audit & e-Procurement untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
3. Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang meningkatkan efisiensi pelayanan.
4. Penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih agar layanan publik lebih cepat dan tidak berbelit.
5. Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam satu sistem terpadu.
6. Tidak tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran terutama dipengaruhi oleh rendahnya Nilai Perencanaan Anggaran (75). Hal ini disebabkan karena DJID pada Tahun 2025 tidak memperoleh nilai efisiensi maksimal pada sistem monitoring Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut terjadi akibat kegiatan SBKK Tahun 2025 masih ter-tagging pada Ditjen SDPPI sebagai dampak dari proses restrukturisasi organisasi. Akibatnya, sebagian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DJID tidak sepenuhnya tercermin dalam sistem penilaian, sehingga SBKK tidak dapat diakui sebagai kinerja DJID dalam aspek perencanaan anggaran.

E. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya Yang Telah Digunakan Untuk Perbaikan Indikator Tersebut

Laporan kinerja sebelumnya merupakan sumber data penting untuk mengevaluasi keberhasilan dan hambatan dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi tata kelola birokrasi. Untuk memastikan laporan tersebut dimanfaatkan secara optimal berikut adalah langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan:

1. Analisis dan Evaluasi Data Laporan Kinerja Sebelumnya.
2. Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk Perbaikan Indikator.
3. Implementasi Perbaikan Berdasarkan Laporan Kinerja.

F. Efisiensi

Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan terintegrasi dengan UPT, kegiatan dalam hal pengajuan usulan kenaikan pangkat, pelatihan dan sistem keuangan dapat dilakukan secara daring sehingga sangat efisien dalam setiap prosesnya.

G. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran UPT Ternate Tahun 2025, Loka Monitor SFR Ternate memegang teguh nilai-nilai dari budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :

1. Melalui pengelolaan anggaran yang baik, Loka Monitor SFR Ternate dapat mewujudkan dengan baik tugas dan fungsi UPT dari Ditjen Infrastruktur Digital ini yang Berorientasi pada pelayanan. Dukungan anggaran yang tepat sasaran membuat kegiatan berbasis pelayanan dan konsultasi publik dapat berjalan dengan maksimal.
2. Dalam setiap kegiatan, perlu dilakukan pelaporan penggunaan anggaran yang Akuntabel.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang Kompeten, Loka Monitor SFR Ternate merancang kegiatan peningkatan disiplin pegawai. Kegiatan tersebut mengikutsertakan seluruh pegawai ASN maupun PPNPN Loka Monitor SFR Ternate.

4. Untuk membangun rasa nyaman dalam lingkungan kerja, Loka Monitor SFR Ternate membangun konsep open-working space. Melalui konsep ini, suasana area kerja terasa lebih Harmonis.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai Loka Monitor SFR Ternate dengan penuh rasa tanggungjawab dan Loyal terhadap pimpinan dan instansi.
6. Loka Monitor SFR Ternate sangat Adaptif terhadap perkembangan teknologi yang ada. Kami terus berinovasi dan sigap terhadap perubahan.
7. Setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi, Loka Monitor SFR Ternate selalu melibatkan pihak internal maupun eksternal sehingga terjadi hubungan kerja yang Kolaboratif dan efektif.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

a. Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan

Setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dari keuangan negara, wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya secara akuntabel dan transparan. Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Loka Monitor SFR Ternate disusun sebagai informasi yang relevan mengenai pengelolaan keuangan dan keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh Loka Monitor SFR Ternate selama tahun 2025.

Maksud dari Penyusunan Laporan adalah untuk menjabarkan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Keuangan ini bertujuan untuk menyajikan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan ini bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana serta bertujuan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

b. Sasaran Kegiatan

Meningkatkan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Akuntabilitas Kinerja Loka Monitor SFR Ternate.

c. Capaian Target

Capaian nilai Target Realisasi Anggaran untuk Loka Monitor SFR Ternate tahun 2025 adalah sebesar 100 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Capaian Nilai UAKPA Loka Monitor SFR Ternate

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Satuan Kerja	Bobot	Faktor Pengurang	Nilai Pengurang
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%		
1.1	Jumlah transaksi koreksi audit 0 s.d. 5		0%	0
1.2	Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d. 10		-5%	-2,5
1.3	Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d. 15		-15%	-7,5
1.4	Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d. 20		-30%	-15
1.5	Jumlah transaksi koreksi audit lebih dari 20		-50%	-25
2	Kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK	20%		
2.1	Kesalahan akun Rp0 – Rp150jt		0%	0
2.2	Kesalahan akun di atas Rp150jt – Rp300jt		-5%	-1
2.3	Kesalahan akun di atas Rp300jt – Rp600jt		-15%	-3
2.4	Kesalahan akun di atas Rp600jt – Rp1,2Miliar		-30%	-6
2.5	Kesalahan akun lebih dari Rp1,2Miliar		-50%	-10
3	Saldo kas di bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun buku	10%		
3.1	Tidak terdapat saldo kas		0%	0
3.2	Terdapat saldo kas		-100%	-10
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%		
4.1	Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0
4.2	Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5

5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%		
5.1	Efektif		0%	0
5.2	Efektif dengan Pengecualian		-30%	-3
5.3	Mengandung Kelemahan Material		-70%	-7
6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%		
6.1	Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0
6.2	Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5
Nilai Akhir		100		

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Keberhasilan nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dimulai dari :

1. Perencanaan anggaran;
2. Rencana Penarikan Dana yang sesuai dengan jadwal setiap bulan;
3. Kecepatan dan ketepatan dalam GU;
4. Pengelolaan UP yang baik.

e. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya Yang Telah Digunakan Untuk Perbaikan

Tindak lanjut dan pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya untuk perbaikan nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

1. Analisis Tren Data: Membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi pola atau area yang perlu diperbaiki.
2. Identifikasi Kesalahan Umum: Melihat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan sebelumnya, seperti kesalahan pencatatan, rekonsiliasi yang kurang optimal, atau keterlambatan dalam pelaporan.
3. Review Prosedur Internal: Menyesuaikan prosedur pelaporan agar lebih efisien dan akurat berdasarkan evaluasi laporan sebelumnya.
4. Otomatisasi Proses: Mengurangi proses manual untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kesalahan manusiawi (human error).
5. Pengukuran Kinerja Secara Periodik: Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk memantau peningkatan kualitas pelaporan.

f. Efisiensi

Efisiensi nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sangat penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Berikut beberapa faktor yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan keuangan UAKPA:

1. Standarisasi dan Kepatuhan
2. Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi
3. Pengelolaan Data yang Efektif
4. Pengawasan dan Audit Internal
5. Peningkatan Kompetensi SDM

g. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025, Loka Monitor SFR Ternate mengimplementasikan nilai-nilai dari budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut :

1. Dalam menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam penjaga frekuensi di negeri ini, Loka Monitor SFR Ternate Berorientasi pada pelayanan yang informatif.
2. Setiap laporan keuangan, kami selalu berusaha menyajikan laporan yang Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Loka Monitor SFR Ternate memiliki SDM yang Kompeten dan dapat diandalkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Pimpinan Loka Monitor SFR Ternate selalu membuat program-program kegiatan yang dapat meningkatkan keHarmonisan dalam suasana kerja.
5. Tim kerja yang Loyal membuat pelaporan keuangan ini dapat berjalan dengan maksimal.
6. Setiap pegawai di Loka Monitor SFR Ternate sangat mudah dalam berAdaptasi dengan perkembangan terbaru.
7. Dalam melaksanakan setiap kegiatan, Loka Monitor SFR Ternate selalu bersinergi dengan pihak-pihak terkait sehingga terjalin hubungan yang Kolaboratif.

3. Kinerja Lainnya Tahun 2025

A. Kepegawaian

Data ASN Loka Monitor SFR Ternate Tahun 2025 terdiri atas 30 orang ASN dengan komposisi 15 orang PNS dan 15 Orang PPPK, untuk non ASN antara lain PJLP sebanyak 1 orang, tenaga outsourcing tenaga kebersihan 2 orang, dan tenaga outsourcing tenaga keamanan 2 orang.

NO URUT	NAMA LENGKAP NIP	GOLONGAN T.M.T	JABATAN T.M.T JABATAN	PENDIDIKAN	CALON PEGAWAI/ T.M.T PENGANGKATAN	KET.
1.	SYAHRIL AMIR, S.T., M.Eng.	IV/A	Kepala Loka Monitor SFR Ternate	Pascasarjana	19-03-2008	PNS
2.	FAHRIADI SURYABAKTI, S.Sos., M.Si.	IV/A	Pengevaluasi Bidang Pemeliharaan DAN Perbaikan	Pascasarjana	01-12-2009	PNS
3.	Ir. DIDMAN RANTEMANGILING, S.T., M.Si.	III/D	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	Pascasarjana	01-04-2006	PNS
4.	RISDAN, S.Sos., M.Si.	III/D	Analisis Sumber Daya Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Level 3	Pascasarjana	01-02-2005	PNS
5.	RISNY RARANTI, S.T.	III/D	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	S-1	01-01-2011	PNS
6.	EDI MULYADI, A.Md.	III/D	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	D-3	01-02-2005	PNS
7.	ERNA HUSEN, S.T.	III/D	Analisis Sumber Daya Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Level 2	S-1	01-12-2009	PNS
8.	SRI DHAMA YANTI, S.H.	III/C	Analisis Sumber Daya Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Level 2	S-1	01-02-2005	PNS
9.	SYAH ALAM AFIF SAHUBAWA, S.Kom.	III/B	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	S-1	01-02-2019	PNS
10.	ANITA	III/B	Analisis Sumber Daya Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Level 1	SLTA	01-12-2001	PNS
11.	HANDRIAN HABEAHAN, S.E.	III/A	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S-1	01-04-2025	PNS
12.	HASRIADI, A.Md.	II/D	Pengendali Frekuensi Radio Terampil	D-3	01-02-2019	PNS
13.	PARADITA SEKAR BANGSA, A.Md.T.	II/C	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana	D-3	01-04-2025	PNS

14.	ANDI ADRIANI ADIWIJAYA, A.Md.T.	II/C	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana	D-3	01-04-2025	PNS
15.	ARDI, A.Md.	II/C	Pengelola Manajemen Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Informatika	D-3	01-03-2022	PNS
16.	ASRIL S. DIALY, S.T.	IX	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	S-1	01-10-2023	PPPK
17.	NURSALIM, S.Kom.	IX	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	S-1	01-02-2024	PPPK
18.	DJAINUDDIN	IX	Penata Layanan Operasional	S-1	01-04-2025	PPPK BATCH 1
19.	SARTIKA M. BODJA, S.T.	IX	Penata Layanan Operasional	S-1	01-04-2025	PPPK BATCH 1
20.	JUHRIA	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-04-2025	PPPK BATCH 1
21.	SITI RAHMADHANY SYAKILA SUGIO	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-04-2025	PPPK BATCH 1
22.	MUSLIM S PATTY	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-04-2025	PPPK BATCH 1
23.	ASRIYANI DJALAL, S.T.	IX	Penata Layanan Operasional	S-1	01-10-2025	PPPK BATCH 2
24.	NAHRAWI MAHMUD	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-10-2025	PPPK BATCH 2
25.	ISAM ADAM LASAKU	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-10-2025	PPPK BATCH 2
26.	MUHAMMAD JENG ELANG	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-10-2025	PPPK BATCH 2
27.	ISMAIL DJUMA SAU	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-10-2025	PPPK BATCH 2
28.	SAFRUN SUNARTO	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-10-2025	PPPK BATCH 2
29.	RIYAT	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-10-2025	PPPK BATCH 2
30.	NUR ALI RUMATUMIA	V	Administrasi Perkantoran	SLTA	01-10-2025	PPPK BATCH 2

Tabel Daftar ASN Loka Monitor SFR Ternate 2025

NO URUT	NAMA LENGKAP	JABATAN	PENDIDIKAN	TMT/ Tanggal dan No kontrak	KET.
1.	SEMARLA JELANI	Desain Grafis dan Publikasi	S-1	01-11-2023	Kontrak diperbaharui tiap tahun

Tabel Daftar PJLP Loka Monitor SFR Ternate 2025

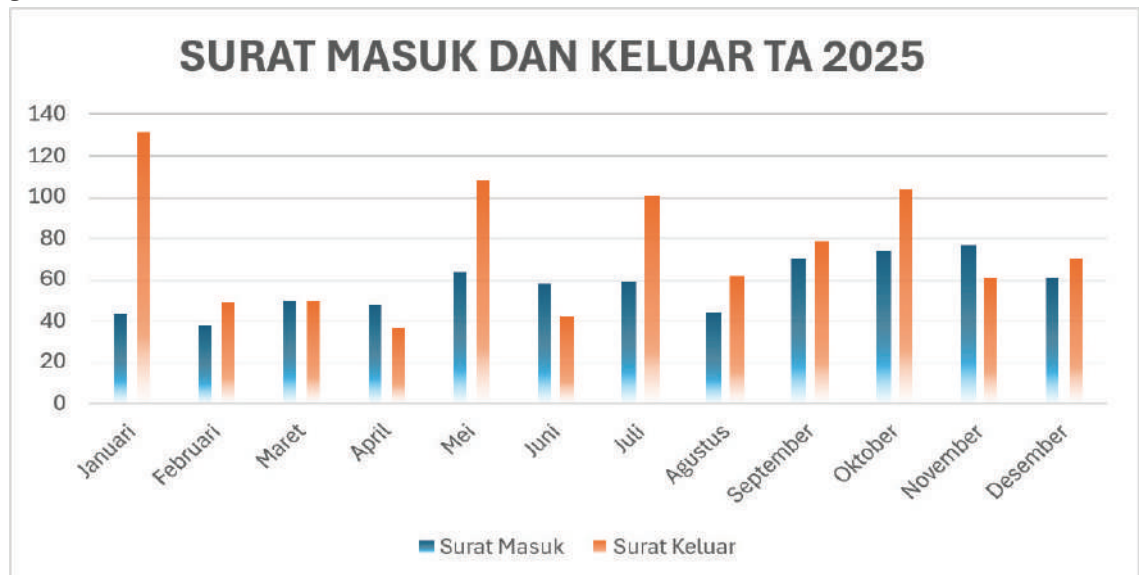
NO URUT	NAMA LENGKAP	JABATAN	PENDIDIKAN	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	MASA KONTRAK
1.	HARIS LB. KAIMUDDIN	Petugas Keamanan	SLTA	Ternate, 5/25/1994	2025
2.	AKBAR RIVANDI M NUR	Petugas Keamanan	SLTA	Ternate, 11/5/1996	2025
3.	AYU SAMAD	Cleaning Service	SLTA	Ternate, 2/8/1989	2025
4.	AHLIS ILYAS ABD SAMAD	Cleaning Service	SMP	Ternate, 1/12/1995	2025

Tabel Daftar Pegawai Outsourcing Loka Monitor SFR Ternate 2025

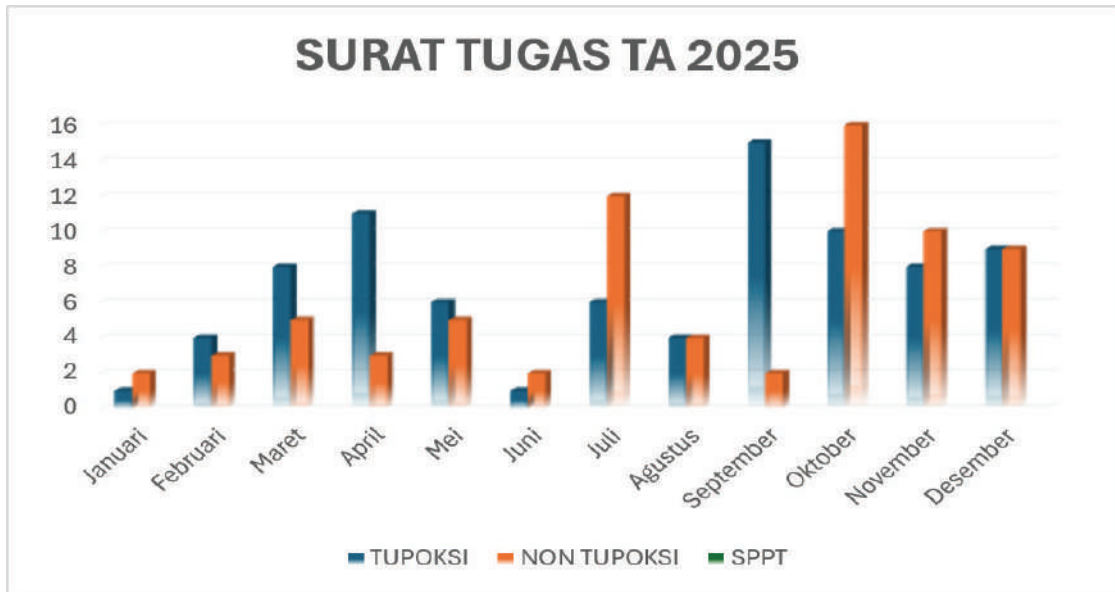
B. Ketatausahaan dan Rumah Tangga

a. Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi persuratan baik surat masuk dan surat keluar dilingkungan internal Kementerian Komunikasi dan digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio maupun dengan pihak eksternal baik instansi pemerintah maupun swasta serta para Penyelenggara/Pengguna Spektrum Frekuensi Radio. proses persuratan telah diproses secara elektronik melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran (SIMAYA), total dokumen penatausahaan surat tahun 2025 antara lain surat masuk sebanyak 686 Nomor Surat, surat keluar sebanyak 895 Nomor Surat. Sedangkan untuk penerbitan Surat Tugas kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi sebanyak 83 Nomor Surat Tugas dan penerbitan Surat Tugas Non Kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi sebanyak 73 Nomor Surat Tugas.



Grafik Surat Masuk dan Keluar 2025



Grafik Surat Tugas Tahun 2025

b. Rumah Tangga

Kegiatan rumah tangga terkait dengan kegiatan :

1. Kebutuhan Operasional dan Non Operasional yang menunjang pelaksanaan rutinitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor yang meliputi pemeliharaan dan perawatan gedung kantor termasuk kebersihan dan keamanan kantor, pemeliharaan peralatan kantor serta rumah tangga, pemeliharaan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, memberikan kenyamanan lingkungan kerja.
3. Pengadaan Barang dan Jasa berupa belanja modal yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pengadaan	Nama Perusahaan	Jumlah	Nilai Kontrak	Ket.
1.	Pengadaan A.C Floor Standing	CV. Rafa Mandiri Jaya Teknik	1 Unit	15.021.630	Selesai
2.	Pengadaan Gordyn	CV. Fajar Jaya Gordyn	1 Paket	32.449.000	Selesai
3.	Pengadaan Soundsystem	CV. Shourai Engineer	1 Paket	36.463.500	Selesai
4.	Pengadaan Laptop	CV. Sulhaz	1 Unit	10.656.000	Selesai
5.	Pengadaan Battery	PT. Malpi Network Basari	1 Unit	12.800.000	Selesai
6.	Pengadaan Connector	PT. Malpi Network Basari	1 Unit	15.000.000	Selesai
7.	Pengadaan Frequency Cuonter	PT. Malpi Network Basari	1 Unit	3.312.000	Selesai
8.	Pengadaan Laptop	CV. Sulhaz	11 Unit	105.600.000	Selesai

Grafik Pengadaan Belanja Modal Tahun 2025

4. Publikasi dan Informasi Layanan Masyarakat

Publikasi dan informasi layanan masyarakat oleh instansi pemerintah sangat krusial untuk menjamin transparansi, memastikan hak warga negara atas informasi terpenuhi sesuai regulasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. Ini memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pengelolaan anggaran dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Untuk itu inovasi yang dilakukan oleh Loka Monitor Ternate antara lain melalui website, media sosial, serta nomor layanan konsultasi dan pengaduan.



Gambar Website dan akun media sosial Loka Monitor SFR Ternate

BENCHMARKING 2025

Loka Monitor SFR Ternate dan Balai Monitoring SFR Kelas II Mataram memiliki wilayah kerja UPT yang sama, yakni sama-sama memiliki 10 Kabupaten/Kota wilayah Kerja UPT. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Infrastruktur Digital, kedua UPT ini bertanggung jawab dalam memastikan tertib penggunaan frekuensi, penanganan gangguan, serta optimalisasi layanan komunikasi. Laporan ini menyajikan perbandingan capaian kinerja antara Loka Monitor SFR Ternate dengan Balai Monitoring SFR Kelas II Mataram berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

No	Indikator Kinerja	Loka Monitor SFR Ternate		Balmon SFR Kelas II Mataram		Analisa Perbandingan
		Target	Capaian	Target	Capaian	
I. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio						
1	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80%	100%	80%	100%	Kedua UPT mencapai nilai yang sama yakni 100% dan melebihi target yang telah ditetapkan
2	Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%	100%	Kedua UPT mencapai sama persis dengan dengan target yang telah ditetapkan
3	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	95%	100%	Kedua UPT mencapai nilai yang sama yakni 100% dan melebihi target yang telah ditetapkan
4	Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	75%	100%	75%	100%	Kedua UPT mencapai nilai yang sama yakni 100% dan melebihi target yang telah ditetapkan
5	Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	98.75%	85%	98.96%	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
6	Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	80%	100%	Kedua UPT mencapai nilai persentase yang sama yakni 100%, melebihi target yang telah ditetapkan

7	Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	125%	100%	125%	Kedua UPT mencapai nilai yang sama yakni 125% dan melebihi target yang telah ditetapkan
8	Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%	208.33%	UPT Ternate mencapai sama persis dengan dengan target yang telah ditetapkan, UPT Mataram mencapai nilai lebih tinggi yakni 208.33%
9	Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	Kedua UPT mencapai sama persis dengan target yang telah ditetapkan
10	Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	Kedua UPT mencapai sama persis dengan target yang telah ditetapkan
11	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	122%	100%	123.44%	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
12	Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	107.50%	100%	110.56%	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
13	Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%	100%	Kedua UPT mencapai sama persis dengan target yang telah ditetapkan

II. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

1	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate Tahun 2025	86,95	84.17	86,95	86	UPT Mataram memiliki capaian Nilai Kinerja Anggaran lebih tinggi dibanding UPT Ternate
2	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	97	100	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan



Kegiatan Pendataan Alat/Perangkat Telekomunikasi



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Loka Monitor SFR Ternate Tahun 2025 adalah laporan resmi atas hasil kinerja Loka Monitor SFR Ternate selama satu tahun anggaran. Selain keberhasilan yang dicapai, laporan ini juga memuat tantangan maupun kendala yang dihadapi dalam usaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan.. LAKIN Loka Monitor SFR Ternate Tahun 2025 juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Selama tahun 2025, Loka Monitor SFR Ternate terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan regulasi dalam penyelenggaraan spektrum frekuensi radio dan perlindungan konsumen terhadap produk telekomunikasi. Melalui upaya pengawasan dan penertiban yang ketat, kami berhasil menegakkan kepatuhan standar yang diperlukan. Secara umum, capaian atas indikator-indikator kinerja sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan Loka Monitor SFR Ternate selama tahun 2025. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi sudah semakin memadai, akan tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang kami miliki. Sehingga sangat dibutuhkan penambahan personil untuk meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.
2. Program kerja tahun anggaran 2025 secara garis besar telah dilaksanakan dengan baik mengikuti koridor yang telah ditetapkan bersama.
3. Tindakan penegakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio telah dilaksanakan sesuai perundangan yang berlaku. Pemberian sanksi administratif dalam rangka tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sekaligus motivasi untuk masyarakat agar lebih taat pada aturan yang berlaku.

Dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan zaman dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas, Loka Monitor SFR Ternate berkomitmen untuk adaptif terhadap pesatnya laju perkembangan teknologi. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan loyalitas dengan kolarobasi yang harmonis dengan pihak terkait. Juga dengan meningkatkan efisiensi kinerja yang akuntabel dan transparan.

Dengan berakhirnya periode tahun 2025, ucapan terimakasih kami yang tulus kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, Direktur Layanan Infrastruktur Digital yang telah memberikan bimbingan dan arahan dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian program kerja tahun 2025. Melalui kolaborasi yang harmonis antara tim internal hingga *stakeholder* terkait, kami berhasil mencapai sejumlah target yang signifikan.





AKTIFITAS LOKA MONITOR SFR TERNATE TAHUN 2025





Direktorat
Jenderal
Infrastruktur
Digital

LOKA MONITOR SFR TERNATE

Jl. Toboleu puncak No. 839 RT 017/006
Kel. Toboleu, Kec. Ternate Utara, Ternate
Maluku Utara 97726

☎ 0921 - 3128354
☎ 0921 - 3111138
✉ upt_ternate@postel.go.id
📷 @lokaternate
📘 Loka Ternate

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
LOKA MONITOR SFR TERNATE

08114423232

